



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6757);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGNAN DAERAH TAHUN 2023-2026 KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan serta Pelaksanaan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman:
 - a. Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - b. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.
 - c. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 menjadi pedoman untuk Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis
 - e. Bab V Tujuan dan Sasaran
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
 - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
 - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

i. Bab IX Penutup

- (2) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 Mei 2022



BAKHTIARAHMAD SIBARANI

RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4	Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.5	Sistematika Penulisan	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-40
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-26
3.3	Kerangka Pendanaan	III-33
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Isu Strategis	IV-22
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-8
6.3	Program Prioritas Daerah	VI-27
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VII-1
BAB VIII	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	VIII-1
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tenga	II-2
Tabel II.2	Nama Pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah	II-3
Tabel II.3	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan	II-5
Tabel II.4	Jumlah Rata-rata Suhu Udara, Kecepatan Angin dan Curah Hujan	II-5
Tabel II.5	Data Penggunaan Lahan Kabupaten Tapanuli Tenga	II-16
Tabel II.6	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021	II-17
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020	II-17
Tabel II.8	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 (dalam Milyar Rupiah)	II-18
Tabel II.9	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020 (dalam persen)	II-20
Tabel II.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021 (dalam persen)	II-21
Tabel II.11	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020	II-22
Tabel II.12	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021	II-23
Tabel II.13	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2021	II-24
Tabel II.14	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015-2019	II-26
Tabel II.15	Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021	II-27
Tabel II.16	Tingkat Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2021	II-28
Tabel II.17	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021	II-30
Tabel II.18	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021	II-31
Tabel II.19	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021	II-32
Tabel II.20	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021	II-34
Tabel II.21	10 Jenis Kejahatan Tertinggi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021	II-34
Tabel II.22	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021	II-36
Tabel II.23	Produksi Ikan (Ton) dan Sarana Prasarana Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2020	II-38
Tabel II.24	Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2020	II-42



Tabel II.25	Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2010) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2020	II-57
Tabel II.26	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2021	II-68
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-4
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (juta)	III-10
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022(Dalam Jutaan)	III-15
Tabel III.5	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan)	III-18
Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-20
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III-23
Tabel III.8	Rasio Hutang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III-24
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III-25
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III-25
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018- 2021 (dalam Jutaan)	III-26
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-27
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-29
Tabel III.14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-31
Tabel III.15	Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-32
Tabel III.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-32



Tabel III.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III-33
Tabel III.18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam jutaan)	III-38
Tabel III.19	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2026 (Juta Rupiah)	III-43
Tabel III.20	Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)	III-45
Tabel III.21	Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)	III-47
Tabel III.22	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)	III-51
Tabel III.23	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	III-53
Tabel III.24	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	III-54
Tabel IV.1	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	IV-9
Tabel IV.2	Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2020	IV-10
Tabel IV.3	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	IV-19
Tabel IV.4	Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	IV-20
Tabel V.1	Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	V-4
Tabel V.2	Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026	V-5
Tabel V.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026	V-9
Tabel V.4	Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026	V-11
Tabel V.5	Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026	V-18
Tabel VI.1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VI-2



Tabel VI.2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VI-13
Tabel VI.3	Indikasi Program Tahap ke III (2023-2027) RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah	VI-18
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel VII.2	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	VII-4
Tabel VII.3	Proyeksi Pagu OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	VII-5
Tabel VIII.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VIII-1
Tabel VIII.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VIII-2
Tabel VIII.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah	II-2
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam jutaan)	III-7
Gambar III.2	Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (rupiah)	III-8
Gambar III.3	Realisasi Belanja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	III-13
Gambar III.4	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	III-17
Gambar IV.1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	IV-4
Gambar IV.2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	IV-8
Gambar IV.3	Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	IV-12
Gambar IV.4	Tingkat Kemiskinan (%) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	IV-14
Gambar IV.5	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Per Kapita/Tahun) Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2021	IV-15
Gambar IV.6	Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%) Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2021	IV-16
Gambar IV.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	IV-17
Gambar VI.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	VI-9
Gambar VI.2	Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah	VI-17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mamajukan wilayahnya. Keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui pemeliharaan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023–2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2022. Oleh karena itu, Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023–2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023–2026 yang ditetapkan oleh Perkada paling lambat Bulan Maret pada Minggu ke-dua. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara serta Nasional. RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026 dengan Visi : ***“Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”***. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2023–2026.

Penetapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050–5859 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Renstra Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023–2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023–2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan, serta implementasi dari misi tahap terakhir dari RPJPD untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Penyusunan RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi pada era Pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian indikator serta target pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Seri E); dan
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 ini dimaksudkan sebagai jembatan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di Tahun 2022 untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam rencana pembangunan tahunan. RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2023-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurun waktu 2023–2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

- Tengah Tahun 2017–2022;
4. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
 5. Isu–isu strategis yang berkembang;
 6. Kebijakan Nasional; dan
 7. Regulasi yang berlaku.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Keterkaitan dokumen RPD dengan dokumen lainnya yaitu sebagai berikut:

A. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dengan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi *“Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”*.

B. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017–2037

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013–2033. Keselarasan RPD dengan RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah telah melalui proses penelaahan dan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai perencanaan spasial diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tapanuli



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Tengah, sehingga pelaksanaan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Tapanuli Tengah.

C. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu - isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang akan berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan,

D. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Rencana Pembangunan Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

E. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2023–2026 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dengan RKPD

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta pagu anggaran setiap tahunnya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah periode yang lalu secara umum. Gambaran umum merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk lima tahun kedepan.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah, aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun ke depan dapat terpetakan dengan baik.

2.1.1. Kondisi Geografi Wilayah

1. Administrasi dan Geografi Wilayah

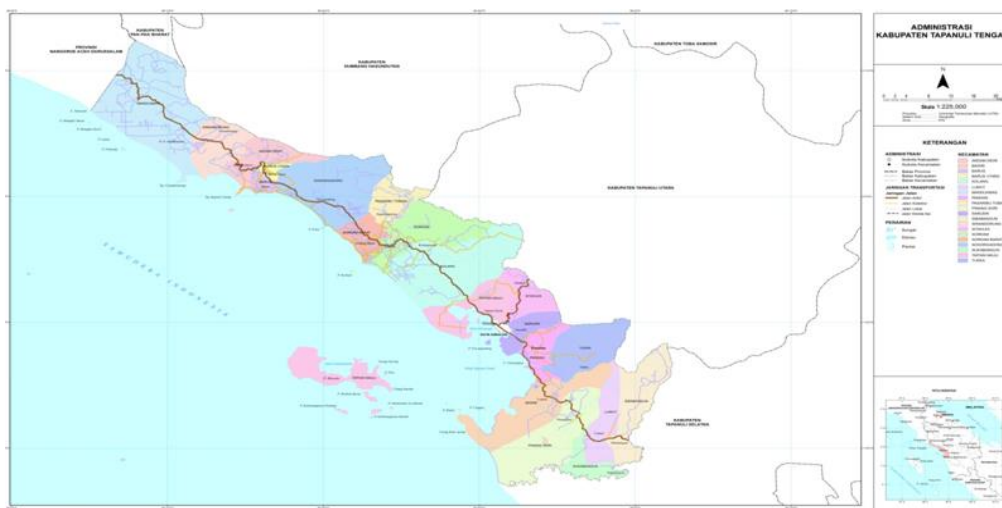
Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m di atas permukaan laut dan terletak pada 1°11'00"-2°22'00" Lintang Utara (LU) dan 98°07'-98°12' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah pada sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Gambar II.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 Km² 3,06 persen luas Provinsi Sumatera Utara dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 Km², sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah ± 6.194,98 Km². Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 Km² (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 Km² (0,99 persen). Secara rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.1.
Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persen (%)
1.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2.	Badiri	7	2	129,49	5,90
3.	Sibabangun	6	1	284,64	12,97
4.	Lumut	5	1	105,98	4,83
5.	Sukabangun	6	-	49,37	2,25
6.	Pandan	2	20	36,31	1,65
7.	Sarudik	1	4	25,92	1,18
8.	Tukka	4	5	148,92	6,78
9.	Tapan Nauli	8	1	83,01	3,78
10.	Sitahuis	5	1	50,52	2,30



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persen (%)
11.	Kolang	12	2	400,65	18,25
12.	Sorkam	17	4	116,25	5,30
13.	Sorkam Barat	10	2	44,58	2,03
14.	Pasaribu Tobing	9	-	103,36	4,71
15.	Barus	11	2	21,81	0,99
16.	Sosor Gadong	8	1	143,14	6,52
17.	Andam Dewi	13	1	122,42	5,58
18.	Barus Utara	6	-	63,02	2,87
19.	Manduamas	17	3	99,55	4,54
20.	Sirandorong	7	1	87,72	4,00
	Jumlah	159	56	2.194,98	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) pulau yang hanya sebagian kecil dihuni oleh penduduk. Sebaran ke-32 pulau tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu di Kecamatan Barus terdapat 2 pulau, Kecamatan Sorkam 1 pulau, Kecamatan Badiri 3 pulau, Kecamatan Tapanuli Tengah 20 pulau, Kecamatan Manduamas 4 pulau, Kecamatan Sosorgadong 1 pulau, dan Kecamatan Pandan 1 pulau. Adapun seluruh pulau-pulau tersebut telah memiliki nama sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.2.

Nama Pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Nama Pulau	Titik Koordinat	Keterangan
1.	Barus	Karang	01°58'23" LU 98°21'09" BT	-
2.	Barus	Dundun	01°50'45" LU 98°01'37" BT	-
3.	Sorkam	Sorkam	01°51'07" LU 98°32'47" BT	-
4.	Badiri	Bakar	01°34'38" LU 98°43'04" BT	-
5.	Badiri	Ungge	01°34'29" LU 98°45'33" BT	-
6.	Badiri	Lipat Kain	01°34'08" LU 98°43'07" BT	-
7.	Tapanuli Tengah	Karang Jambe	01°34'26" LU 98°31'46" BT	-
8.	Tapanuli Tengah	Putri	01°38'42" LU 98°35'51" BT	Berpendudu



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Kecamatan	Nama Pulau	Titik Koordinat	Keterangan
			BT	k
9.	Tapian Nauli	Pune	01°39'42" LU 98°35'02" BT	-
10.	Tapian Nauli	Janggi	01°38'31" LU 98°36'09" BT	-
11.	Tapian Nauli	Tarida	01°34'44" LU 98°36'04" BT	-
12.	Tapian Nauli	Talam	01°37'08" LU 98°35'16" BT	-
13.	Tapian Nauli	Batumandi	01°33'52" LU 98°34'24" BT	-
14.	Tapian Nauli	Sitaban Barat	01°35'52" LU 98°34'34" BT	Berpenduduk
15.	Tapian Nauli	Batulayar	01°34'53" LU 98°34'25" BT	-
16.	Tapian Nauli	Kalimantung Nagodang	01°34'26" LU 98°31'46" BT	-
17.	Tapian Nauli	Kalimantung Namenek	01°34'26" LU 98°31'46" BT	-
18.	Tapian Nauli	Tarida Menek	01°34'37" LU 98°36'06" BT	-
19.	Tapian Nauli	Batuhitam	01°40'53" LU 98°32'19" BT	-
20.	Tapian Nauli	Silabulabu Godang	01°34'24" LU 98°35'08" BT	-
21.	Tapian Nauli	Bangke	01°43'80" LU 98°45'12" BT	-
22.	Tapian Nauli	Silabulabu Namenek	01°34'50" LU 98°36'31" BT	-
23.	Tapian Nauli	Mursala	01°38'15" LU 98°31'33" BT	Berpenduduk
24.	Tapian Nauli	Porlak	01°46'12" LU 98°44'30" BT	-
25.	Tapian Nauli	Jambe	01°39'15" LU 98°30'47" BT	-
26.	Tapian Nauli	Pulau Panjang	01°45'24" LU 98°44'58" BT	-
27.	Manduamas	Lipan	02°07'12" LU 98°43'04" BT	-
28.	Manduamas	Mangkir Ketek	02°08'26" LU 98°08'37"	-



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Kecamatan	Nama Pulau	Titik Koordinat	Keterangan
			BT	
29.	Manduamas	Mangkir Gadang	02°08'49" LU 98°07'29" BT	-
30.	Manduamas	Panjang	02°05'43" LU 98°10'40" BT	-
31.	Sosor Godang	Pane	01°56'15" LU 98°29'54" BT	-
32.	Pandan	Situngkus	01°35'14" LU 98°41'50" BT	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0-1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorong.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ± 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0-8 %), Berombak (8-15 %), Bergelombang (15-25 %), Curam (25 - 40 %) dan Terjal (> 40 %).

3. Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20 °C dan suhu minimum mencapai 22,00°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40°C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71 mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

Tabel II.3.
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan

Tahun	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
2016	267	15,67
2017	251	15,61
2018	254	15,23
2019	210	4.045
2020	244	4.304,50

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas III Pinangsori-Sibolga.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki hari hujan yang cukup tinggi di Indonesia dengan jumlah hari hujan 244 hari pada tahun 2020 (BPS Kabupaten Tapanuli Tengah). Sementara Kota Bogor yang dijuluki “Kota Hujan” memiliki jumlah hari hujan 244 hari pada tahun 2020 sama dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Juni sampai September dan musim penghujan biasanya terjadi pada Bulan November sampai Bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

Tabel II.4.

Jumlah Rata-rata Suhu Udara, Kecepatan Angin dan Curah Hujan

Tahun	Rata-Rata Suhu Udara Minimum	Rata-Rata Suhu Udara Maksimum	Rata-Rata Kecepatan Angin	Rata-Rata Curah Hujan
2016	22,10	32,16	7,16	15,67
2017	22.03	31.65	11.25	13.60
2018	20,50	32,60	21,21	15,23
2019	20,48	34,43	1,27	337,08
2020	22.00	36.20	2,68	358,71

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas III Pinangsori-Sibolga

4. Kondisi Geologi

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorong, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

5. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas permukiman, sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, peternakan, hutan sekunder, hutan mangrove, badan air dan ruang terbuka. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah merupakan salah satu daerah yang memiliki terumbu karang, mangrove, dan lamun. Terumbu karang terdiri atas keanekaragaman kehidupan hayati laut termasuk karang keras dan lunak, jenis moluska, krustasea, dan jenis mikro biota lainnya seperti berbagai jenis plankton, yang merupakan rumah bagi banyak organisme. Luas terumbu karang sebesar $\pm 25,36 \text{ Km}^2$ dengan rata-rata tutupan karang hidup sebesar $\pm 26,98\%$, luas karang hidup sebesar $\pm 6,84 \text{ Km}^2$, jumlah jenis karang batu ± 140 jenis sehingga jika ditinjau dari persentase tutupan karang hidupnya secara umum dikategorikan cukup.

Hutan mangrove adalah suatu kelompok dari berbagai vegetasi palma, semak, tanaman merambat dan pakis bersama-sama tinggal di lahan tergenang air pasang surut dan sekitar muara sungai. Vegetasi mangrove merupakan unsur penting bagi organisme lain yang hidup di hutan bakau. Luasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah 6.931 Ha, namun luasannya di kawasan perairan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar ± 1.011 Ha dengan kondisi tutupan kanopi berkisar 75%, dikategorikan dalam kondisi baik.

Padang lamun berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi habitat mikro, ikan kecil, larva udang dari predator yang lebih besar, dan mendaur ulang nutrisi,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

memproduksi dan mengekspor detritus serta menstabilkan sedimen. Adapun luas lamun yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah \pm 95 Ha dengan dominan adalah jenis en halus. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi kawasan lindung 58.647 Ha; kawasan perlindungan setempat seperti sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau dan ruang terbuka hijau; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam.

Kawasan budidaya yang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan, Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan, Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan, Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya serta Kawasan peruntukan lainnya. Pada tahun 2016 luas wilayah ber HPL/HGB seluas 139.248,67 km² dan cakupan luas ruang terbuka hijau sebesar 7,74 persen.

a. Kawasan Lindung

Ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungannya. Mengingat terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan perlu dituangkan ke dalam kebijaksanaan pengembangan tata ruang dalam bentuk ditetapkan kawasan lindung yang memberikan arahan bagi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten):

1) Kawasan Hutan Lindung;

Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 58.647 hektar yang kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam penanganan rehabilitasi kedepannya kawasan hutan ini perlu melibatkan masyarakat yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan pengamanan hutan dari pencurian kayu maupun perambah melalui peran aparat dan pemerintah kabupaten.

2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Meliputi: Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air;

Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kawasan tanah bergambut adalah tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat di bagian hulu sungai/rawa.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Pada Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada ketinggian 105 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 40 persen, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

kelas lereng lebih besar dari 15%, memiliki bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan ini meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;

4) Kawasan Suaka Alam

Pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan ini meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;

6) Kawasan Lindung Geologi,

Kawasan ini meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan

7) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan ini meliputi cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1) Kawasan Hutan Produksi.

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana eksplorasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapan Nauli.

- Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Kawasan hutan produksi adalah hutan produksi dimana eksplorasinya dapat dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan di Kecamatan Sibabangun, Tukka, Tapan Nauli, dan Kolang seluas 7.662 Ha.

2) Kawasan Pertanian:

- Kawasan pertanian lahan basah
- Kawasan pertanian lahan kering
- Holtikultura
- Kawasan peternakan

3) Kawasan Tanaman Perkebunan

Kawasan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori dengan luas kurang lebih sebesar 40.386 Ha.

4) Kawasan Perikanan

Kawasan Budidaya Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- b) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- c) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapian Nauli;
- d) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

5) Kawasan Pertambangan

Kawasan Budidaya Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi. Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Adapun Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- a) Kecamatan Sibabangun;
- b) Kecamatan Sukabangun;
- c) Kecamatan Lumut;
- d) Kecamatan Pinangsori;
- e) Kecamatan Badiri;
- f) Kecamatan Tukka;
- g) Kecamatan Manduamas;
- h) Kecamatan Sitahuis;
- i) Kecamatan Tapian Nauli;
- j) Kecamatan Kolang;
- k) Kecamatan Sorkam;
- l) Kecamatan Sorkam Barat;
- m) Kecamatan Sirandorung;
- n) Kecamatan Barus Utara; dan
- o) Kecamatan Andamdewi;

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- a) Kecamatan Sibabangun;
- b) Kecamatan Pinangsori; dan
- c) Kecamatan Tukka;
- d) Kecamatan Tapian Nauli;
- e) Kecamatan Sitahuis;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

- f) Kecamatan Kolang;
- g) Kecamatan Manduamas;
- h) Kecamatan Andamdewi;
- i) Kecamatan Barus;
- j) Kecamatan Sorkam;
- k) Kecamatan Sorkam Barat;
- l) Kecamatan Pasaributobing;
- m) Kecamatan Sosorgadong;
- n) Kecamatan Pandan;
- o) Kecamatan Sarudik;
- p) Kecamatan Badiri;
- q) Kecamatan Sibabangun dan
- r) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

- a) Kecamatan Badiri;
- b) Kecamatan Kolang; dan
- c) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang diusahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi:

- a) Kecamatan Sibabangun;
- b) Kecamatan Pinangsori; dan
- c) Kecamatan Tukka;
- d) Kecamatan Tapian Nauli;
- e) Kecamatan Sitahuis;
- f) Kecamatan Kolang;
- g) Kecamatan Manduamas;
- h) Kecamatan Andamdewi;
- i) Kecamatan Barus;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

- j) Kecamatan Sorkam;
- k) Kecamatan Sorkam Barat;
- l) Kecamatan Pasaributobing;
- m) Kecamatan Sosorgadong;
- n) Kecamatan Pandan;
- o) Kecamatan Sarudik; dan
- p) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6) Kawasan Perindustrian

Kawasan Budidaya Industri di Kabupaten Tapanuli Tengah dikelompokkan atas 3 kelompok industri yang terdiri atas:

- a) Industri kecil dan menengah yang diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- b) Industri besar yang diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapian Nauli;
- c) Industri menengah yang diarahkan di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus.

7) Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

- a) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, dan air terjun. Di Kecamatan Pinangsori terdapat Danau Pandan, Pemandian Sungai Lubuk Nabolon, Sungai Ramayana dan Air Terjun Aek Nabobar. Di Kecamatan Badiri terdapat Pantai Ujung Batu Pari, Pantai Kampung Sawah Sitandus, Pantai Maloko, Pantai Sikapas, Pantai Kampung Danau, Pulau Situngkus, Pulau Batu Mandi, Pulau Batu Layar, Pantai Bottot, Pantai Monyet, Pulau Bakar, Pulau Ungge, dan Pantai Sijago-Jago. Di Kecamatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Pandan terdapat Pantai Bosur, Pantai Kalangan, Pantai Hajoran, Pantai Pandan Cerita, Pantai Labuan Mandailing, Pantai Sibuluan, Pantai Muara Sibuluan, Pantai Muara Nibung, Air Terjun Labuan Sonang, Sungai Sibuluan. Di Kecamatan Sarudik Terdapat Bukit Pondok Batu, Sungai Sarudik, Pantai Ujung Batu, Pantai Labuan Nasonang, Pantai Batu Lubang, Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek dan Air Terjun Sibuni-Buni. Di Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata Bukit Anugerah, Puncak Bonan Dolok, Sungai Aek Maranti, Sungai Aek Raison, Air Terjun Batu Lobang dan Air Terjun Bonan Dolok. Di Kecamatan Tapan Nauli dengan Objek Wisata Pantai Labuan Angin, Pantai Mela, Pulau Mursala, Air Terjun Mursala, Pulau Silaban Barat, Pulau Talam, Pulau Silabu Na Menek, Pulau Silabu Na Godang, Pulau Kalimantan Na Menek, Pulau Kalimantan Na Godang, Pulau Putri Runduk, Pulau Raja Janggi, Pulau Putih, Air Terjun Aloban Dan Pantai Kuta. Di Kecamatan Kolang dengan objek wisata Air Terjun Silaklak, Sungai Aek Sibundong, Pantai Muara Kolang, Pantai Kayu Putih, Pantai Tanah Hitam, Pantai Rintis, Pantai Bandang. Di Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata Pantai Aek Raso, Pantai Binasi, Pantai Pasar Sorkam. Di Kecamatan Barus dengan objek wisata Pantai Pasar Tarandam, Pantai Pasar Batu Gerigis, Pantai Kade Gadang. Di Kecamatan Sorkam Dengan Objek Wisata Sungai Aek Sibundong, Pantai Teluk Roban/Bottot, Pulau Sorkam. Di Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata Sungai Aek Husor, Pantai Sitiris-Tiris, Pantai Sipaubat, Pantai Aek Busuk, Pantai Kinati, Pantai Kedai Tiga, Pulau Karang, Pulau Panjang, Pulau Dundun. Di Kecamatan Manduamas dengan objek wisata Pantai Sitiris Tiris, Pantai Simanuk Manuk;

- b) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis yaitu tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang. Di Kecamatan Kolang yaitu Liang Gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing. Di Kecamatan Barus terdapat Makam Papan Tinggi,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Makam Mahligai, Makam Tuan Madhdud, Makam Ibrahim Syeh, Makam Tuan Ambar, Benteng Portugis, Pasar Tarandam, Rumah Tradisional Barus, dan Desa Nelayan Pasar Tarandam. Di Kecamatan Barus Utara yaitu Batu Cawan Perjamuan Kudus. Di Kecamatan Andamdewi Batu Ping, Makam Raja Uti, Lobu Tua, Sungai Aek Busuk, Permandian Putri Andam Dewi, dan Aek Raja. Di Kecamatan Sorkam terdapat dengan objek wisata yaitu Makam Tuan Hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata yaitu Liang Pagar Gunung. Di Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata yaitu Makam Raja Sasi Hutagalung; dan

- c) Pariwisata buatan meliputi di Kecamatan Pinangsori dengan objek wisata yaitu bandara Dr. Ferdinan L. Tobing, Kecamatan Pandan dengan objek wisata adalah PLTA Sipansihaporas, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata adalah kawasan Labuan Angin, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata yaitu Lapangan Terbang Sat. Radar TNI.

8) Kawasan Permukiman,

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan yang sehat dan layak huni (liveble), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun luasan untuk peruntukan kawasan permukiman yaitu 15.247 Ha.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya,

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnya. Untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) yang stabil dan mantap, maka perlu ditetapkan kawasan-kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan Hankamnas. pengembangan kawasan strategis Hankamnas dimaksudkan bagi menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap dan mendorong terciptanya penatan ruang yang



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

serasi antara kepentingan strategis Hankamnas dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Adapun luasan untuk peruntukan kawasan lain sebesar 6.165 Ha.

Tabel II.5.
Data Penggunaan Lahan Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
A	Kawasan Lindung	58.647	27
1	Hutan Lindung	58.647	27
B	Kawasan Budidaya	160.851	73
1	Hutan Produksi Terbatas	52.280	24
2	Hutan Produksi	7.662	3
3	Kawasan Perkebunan	40.386	18
4	Kawasan Pertanian	39.111	18
	- Pertanian Lahan Basah	12.458	6
	- Pertanian Lahan Kering	26.653	12
5	Kawasan Permukiman	15.247	7
6	Kawasan Lainnya	6.165	3
Total		219,498	100

2.1.2 Kondisi Demografi

2.1.2.1 Gambaran Umum Demografis

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebesar 365.177 jiwa penduduk dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 369.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 168,25 jiwa per km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pandan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.750 jiwa per km².



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

**Tabel II.6.
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km)
2017	363.705	78.056	166
2018	370.171	79.445	169
2019	376.667	80.839	171,60
2020	365.177	83.392	166,90
2021	369.300	na	168,25
Laju Pertumbuhan 2020-2021	1,13		

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2020, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dimana rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 sebesar 101,42.

Kecamatan Badiri merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar yaitu 105,62 dan Kecamatan Barus terbesar kedua sebesar 104,74. Sementara Kecamatan dengan rasio jenis kelamin yang terkecil terdapat di Kecamatan Barus Utara dengan nilai 95,09 dan Kecamatan Sorkam sebesar 97,45.

B. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan penyebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan tingkat kepadatannya di suatu daerah. Menurut kelompok umur, terlihat pada Tabel 2.9 bahwa kelompok umur 0-14 tahun (anak-anak) merupakan komposisi tertinggi yaitu 133.317 jiwa (37,35 persen) dan yang terkecil adalah kelompok umur 55 - 75+ tahun yaitu 36.334 jiwa (10,2 persen).



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

**Tabel II.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020**

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	44.954	46.628	44 694	44.560	29 647
2	5-9	46.360	48.375	47 894	48 333	34 317
3	10-14	42.003	43.161	43 772	44 769	36 761
4	15-19	36.111	38.515	36 941	37 430	37 939
5	21-24	27.005	29.274	27 946	28 334	35 701
6	25-29	24.340	25.192	24 851	25 224	32 735
7	30-34	23.514	24.329	23 944	24 149	31 131
8	35-39	22.090	22.688	22 813	23 130	26 007
9	40-44	20.017	19.911	20 852	21 242	22 651
10	45-49	18.237	18.131	19 139	19 569	19 570
11	50-54	15.953	15.318	16 920	17.400	16 433
12	55-59	13.067	12.411	14 123	14.620	13 693
13	60-64	9.977	9.343	11 428	12.117	10 865
14	65-69	5.915	5.133	6 930	7.511	7 956
15	70-74	3.630	2.826	3 901	4.105	5 045
16	75+	3.745	2.470	4 023	4.174	4 726

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan indikator-indikator kemiskinan.

a. Struktur Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB ADHB di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.8.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 (dalam Milyar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4512,63	4682,3	4906,09
2	Pertambangan dan Penggalian	26,28	26,2	27,62
3	Industri Pengolahan	1127,03	1133,1	1232,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	56,87	57,53	59,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,13	12,56	12,77
6	Konstruksi	1192,6	1170,78	1246,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1229,06	1246,49	1327,07
8	Transportasi dan Pergudangan	276,47	259,8	231,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	147,23	138,99	140,84
10	Informasi dan Komunikasi	60,42	65,35	70,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	97,04	98,92	108,86
12	Real Estate	201,85	208,59	215,09
13	Jasa Perusahaan	32,26	33,08	34,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	843,75	861,53	856,01
15	Jasa Pendidikan	98,21	99,16	103,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,79	35,16	35,22
17	Jasa lainnya	9,18	9,3	9,63
PDRB ADHB		9956,78	10138,83	10618,75



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka 2021

Dengan memperhatikan realisasi PDRB atas dasar harga berlaku maka dapat diketahui struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan nilai kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha selama Tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel II.9.
Kontribusi Sektor terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,32	46,18	46,2
2	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26
3	Industri Pengolahan	11,32	11,18	11,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,57	0,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12
6	Konstruksi	11,98	11,55	11,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,34	12,29	12,5
8	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,56	2,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,37	1,33
10	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,64	0,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	0,98	1,03
12	Real Estate	2,03	2,06	2,03
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,47	8,5	8,06
15	Jasa Pendidikan	0,99	0,98	0,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,35	0,33
17	Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Berdasarkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Distribusi persentase dari masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku seperti dikemukakan di atas berpengaruh langsung terhadap struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sektor



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 46,20 persen diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,50 persen, sektor konstruksi sebesar 11,74 persen dan industri pengolahan 11,61 persen. Sektor yang paling kecil memberikan kontribusi adalah jasa lainnya yaitu sebesar 0,09 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2021 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,47	1,02	2,34
2	Pertambangan dan Penggalian	6,1	-2,28	5,14
3	Industri Pengolahan	4,51	-2,78	4,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,26	0,84	3,53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,7	2,9	0,54
6	Konstruksi	6,01	-5,12	3,4



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,23	-1,53	5,73
8	Transportasi dan Pergudangan	5,96	-7,13	-9,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,14	-6,61	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	6,94	7,15	7,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,15	6,25
12	Real Estate	6,42	1,29	0,92
13	Jasa Perusahaan	5,04	-1,77	0,95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,11	-0,74	-0,58
15	Jasa Pendidikan	5,36	0,04	4,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,96	-0,22	-0,93
17	Jasa lainnya	5,69	-1,34	2,98
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		5,18	-0,76	2,56

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,76 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Namun seiring penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi daerah maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 2,56 persen. Diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi normal kembali maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

c. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 28,75 juta rupiah pada tahun 2021.

Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

**Tabel II.11.
PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)					
ADHB	23,49	24,93	26,12	27,87	28,75
ADHK	17,45	18,04	18,43	19,16	19,36

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022, data diolah

d. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.12.
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2017 sebesar 14,66 persen dan menurun hingga mencapai 12,38 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak COVID-19 yang mulai merambah hingga gelombang kedua terjadi di tahun 2021, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka kemiskinan yaitu hingga mencapai 12,67 persen.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel II.13.
Komponen Pembentuk
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	67,08	67,15	67,24
Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,62	8,84
Harapan Lama Sekolah	12,79	13,06	13,07
Pengeluaran per kapita	10.175	10.071	10.138
Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,23	69,61

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

(IPM) mencapai 69,61. IPM di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bermakna SEDANG meskipun masih cukup jauh dibandingkan angka Nasional.

Peningkatan IPM selama lima tahun terakhir hingga 2021 ini disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS). Sedangkan dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan) sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19.

b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 8,62 tahun menjadi 8,84 tahun pada tahun 2021. Meskipun meningkat akan tetapi capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih jauh berada di bawah angka capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,79 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,07 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,07 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2019 angka harapan hidup Tapanuli Tengah selama 67,08 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 67,24 tahun. Peningkatan ini tentu merupakan capaian yang positif bagi perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, untuk itu pembangunan dalam bidang ini juga penting untuk terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta memiliki raga yang sehat. Untuk mencapai pembangunan



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

pada bidang ini maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas kesenian dan olahraga. Berikut ini adalah data tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah,

**Tabel II.14.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cabang Olahraga	6	8	12	12	12
2	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1
3	Organisasi Kepemudaan	40	40	40	40	40
4	Induk Organisasi Olahraga	1	1	1	1	1
5	Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	4
6	Kegiatan Olahraga	12	12	12	12	6

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tapanuli Tengah

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olahraga.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

2.3.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah dapat mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Tetapi kenaikan APS tidak dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah murid karena bisa saja kenaikan APS tersebut dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah. Dari tabel di bawah ini, terlihat bahwa secara umum angka partisipasi pendidikan perempuan lebih baik daripada laki-laki. Adapun pada APS, semakin tinggi umur seseorang, maka partisipasi sekolahnya semakin rendah. Namun capaian Tapanuli Tengah cukup baik pada APS perempuan di mana pada umur pendidikan 16-18 tahun mencapai 97,55.

Tabel II.15.
Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APS			
7-12 tahun	98,55	99,59	99,09
13-15 tahun	98,83	97,66	98,26
16-18 tahun	76,70	97,55	86,68
APM			
SD	98,55	99,59	99,09
SMP	90,24	86,06	88,21
SMA	66,42	74,85	70,45
APK			
SD	115,60	117,46	116,56
SMP	100,33	101,44	100,87
SMA	80,35	88,07	84,04

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Selain APS, indikator pendidikan lain juga memiliki analisis yang cukup strategis seperti Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Pada APK, terlihat bahwa pada seluruh jenjang pendidikan, APK perempuan lebih baik dibandingkan dengan APK laki-laki. Namun pola yang perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka APK semakin menurun. Terlebih hingga 84,04 pada tahun 2021. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk lebih pemeratakan layanan pendidikan kepada masyarakat Tapanuli Tengah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM mengukur partisipasi penduduk yang bersekolah tepat waktu. Pola yang sama terjadi pada APM di mana pola yang perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka APM semakin menurun. Dibanding dengan APS dan APK, pola APM ini lebih rendah dibandingkan angka partisipasi pendidikan lainnya dimana pada tingkatan SD sebesar 99,09; tingkatan SMP sebesar 88,21; dan tingkatan SMA sebesar 70,45.

b. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf. Selain itu, AMH juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dan berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka melek huruf tahun 2021 di Tapanuli Tengah adalah sebesar 98,20 persen. Persentase terendah melek huruf berada pada usia 65 ke atas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang sudah memiliki umur 65 tahun ke atas memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kelompok umur di bawahnya karena fasilitas dan layanan pendidikan pada masa lalu kurang merata dan berkualitas.

Tabel II.16.
Tingkat Melek Huruf Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2021

Kelompok Umur	2020	2021
Umum	98,74	98,20



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Kelompok Umur	2020	2021
10-14	100,00	96,89
15-24	100,00	99,55
25-40	99,42	99,38
41-64	97,91	97,60
65+	91,13	93,70

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

2.3.2 Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat penggerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2020 adalah sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah Puskesmas tahun 2021 sama dengan jumlah Puskesmas pada tahun 2020 dan 2019, namun bila dibandingkan dengan tahun 2018 (23 Puskesmas), jumlah Puskesmas mengalami penambahan sebanyak 2 unit yaitu Puskesmas Kedai Tiga yang terletak di Kecamatan Barus dan Puskesmas Sijungkring yang terletak di Kecamatan Andam Dewi.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang aktif di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena bangunan puskesmas pembantu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tenaga kesehatan yang tidak tersedia. Tahun 2018 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 90 unit, tahun 2019 sebanyak 93 unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 91 unit.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, maka istilah balai pengobatan diubah menjadi klinik. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisasi atau pelayanan medik dasar dan spesialisasi. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebanyak 15 unit yang terdiri dari 14 unit klinik pratama dan 1 unit klinik utama. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Jumlah Poskesdes di kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir karena bangunan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan ketidakaktifan petugas dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2018 jumlah Poskesdes sebanyak 95 unit, tahun 2019 sebanyak 74 unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 42 unit.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas Kesehatan dan aparat desa/kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/ medis. Pada tahun 2020, jumlah posyandu di kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 385 unit. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 (383 posyandu). Penambahan 2 (dua) unit Posyandu berada di Kecamatan Sitahuis dan kecamatan Andam Dewi.

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit. Jumlah perawat Kabupaten Tapanuli tengah pada tahun 2018 adalah sebanyak 384 orang. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penambahan jumlah perawat sebanyak 32 orang, sehingga total perawat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 416 orang. Hal yang sama terjadi pula pada tahun 2020, di mana jumlah perawat Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 438 orang.

Jumlah bidan Kabupaten Tapanuli tengah pada tahun 2018 sebanyak 755 orang. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 773 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 788 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah bidan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 3 tahun berturut-turut selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap penduduk agar tercapai pembangunan kesehatan yang merata dan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jumlah dokter umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2018 sebanyak 38 orang. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah dokter tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 47 orang.

Jumlah dokter gigi di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2018 sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 19 orang dan pada tahun selanjutnya terjadi penambahan 1 orang, sehingga jumlah dokter gigi pada tahun 2020 sebanyak 20 orang.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Seiring dengan hal itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penambahan pusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.17.
**Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

Tahun	Puskesmas	Pustu	BPU	Poskesdes	Posyandu
2017	23	91	11	152	382
2018	23	90	12	95	382
2019	25	93	12	74	383
2020	25	91	15	42	385
2021	25	91*	15*	42*	385*

Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Selain penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.18.
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

Tahun	Perawat	Bidan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis
2017	227	416	34	11	-
2018	384	755	38	12	-
2019	416	773	47	19	-
2020	438	788	47	20	-
2021	413	785	60	18	-

Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan

Keluaran (*output*) dari kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah Jalan Hotmix 33.718 m¹, Jalan Lapen 1.177 m¹, Telford 240 m¹, Rabat 2047 m¹, Pembukaan Jalan 3.700 m, Sirtu 2560 m¹, Pembangunan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Jembatan 5 Unit, Pembangunan Jembatan Kayu 5 Unit, Rehab. Ramin 2 Unit, Plat Beton 31 Unit, Saluran Drainase 3.073 m¹, Dek 2.337 m¹ dan Saluran 2.186 m¹ dan gorong-gorong 10 m¹.

Hal ini memperlihatkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga keadaan ini dapat membuat

kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah di masa mendatang. Berikut capaian kondisi jalan Tapanuli Tengah.

Tabel II.19.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021

Keadaan Jalan	Panjang Jalan (Km)			
	2018	2019	2020	2021
Jenis Permukaan				
Aspal	499,45	499,45	521,05	521,05
Kerikil	84,12	84,12	62,52	62,52
Tanah	139,00	139,00	139,00	139,00
Kondisi Jalan				
Baik	281,17	301,88	363,37	391,2
Sedang	53,14	51,43	51,43	51,43
Rusak	247,80	244,30	182,91	154,98
Rusak Berat	140,46	124,96	124,96	124,96

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

b. Kondisi Daerah Irigasi

Keluaran (output) dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya adalah Bronjong 69 m¹, Saluran Pasangan 5.701 m¹, Rehab Saluran Pasangan 153 m¹, Rehab Bendung 5 Unit, Bangunan Bagi 1 Unit, Saluran Pipa 143 m¹, Dek Pengaman 48 m dan Box Kwarter 7 Unit. Keluaran (output) pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Irigasi Tahun 2019 yaitu Pembersihan Saluran 1.700 m¹, Rehab



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Saluran 981 m¹, Tembok Penahan 12 m¹, Bronjong 12 m¹ dan Bangunan Bagi 1 Unit

c. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus telah menyesuaikan RTRW terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033 adalah untuk mewujudkan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di kawasan barat Sumatera Utara. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber air bersih adalah sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama untuk digunakan sebagai air minum, memasak makanan, mencuci, mandi dan kakus. Keberadaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Hingga saat ini, penyediaan air bersih oleh pemerintah menghadapi keterbatasan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam aktivitas mereka sehari hari termasuk di antaranya adalah sanitasi.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Kondisi sanitasi layak di Tapanuli Tengah masih cukup rendah di mana pada tahun 2021 hanya sebanyak 57,56 persen rumah tangga dengan kondisi sanitasi layak. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun kondisi ini masih jauh dari harapan di mana sanitasi layak menjadi salah satu syarat peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

Tabel II.20.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Sanitasi
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021

Tahun	Kondisi Sanitasi		
	Layak	Tidak Layak	Total
2019	44,87	55,13	100,00
2020	49,67	50,33	100,00
2021	57,56	42,44	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

2.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi politik dan pertikaian antar kelompok masyarakat dapat mengganggu pembangunan dan stabilitas keamanan. Menyikapi dari permasalahan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang harus diselesaikan. Iklim daerah yang aman dan kondusif perlu diciptakan, salah satunya melalui pembinaan politik daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kelompok Kepemudaan (OKP).

Kejahatan yang paling banyak terjadi di Tapanuli Tengah adalah penganiayaan biasa dengan jumlah laporan sebanyak 168 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, 147 terselesaikan sedangkan 21 kasus masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, kasus pencurian juga marak terjadi di Tapanuli Tengah baik pencurian barang, pencurian pemberatan maupun pencurian kendaraan bermotor.

Tabel II.21.
10 Jenis Kejahatan Tertinggi
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021

Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
Penganiayaan Biasa	168	147	21
Pencurian	104	46	58



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
Narkotika Psicotropika	99	110	-
Pencurian dengan Pemberatan	87	40	47
Pencurian Kendaraan Bermotor	70	12	58
Pencabulan	61	39	22
Penipuan/Perbuatan Curang	42	11	31
KDRT	32	25	7
Pengrusakan/Penghancuran Barang	26	15	11
Penggelapan	27	13	14
Perjudian	25	19	6

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

2.3.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan program yang bertujuan untuk pemulihan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar masyarakat. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah Biaya Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendukung kelancaran program tersebut. Pada Tahun 2020 petugas pendamping PKH di 20 (duapuluh) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 64 (enampuluh empat) orang, terdiri dari operator komputer sebanyak 3 (tiga) orang, Koordinator kabupaten sebanyak 1 (satu) orang, pendamping Kecamatan sebanyak 61 (enampuluh satu) orang. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sebanyak 15.733 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau yang disingkat dengan SDGs, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program pemberian bantuan social bersyarat kepada



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun tujuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

2.3.7 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.22.
TPAK dan Kesempatan Kerja
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021

INDIKATOR		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Angkatan Kerja	107.233	93.863	201.096
	A. Bekerja	100.624	85.906	186.530
	B. Pengangguran	6.609	7.957	14.566
2	Bukan Angkatan Kerja	26.427	40.432	66.859
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		80,23	69,89	75,05
Tingkat Pengangguran Terbuka		6,16	8,48	7,24

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Tengah mencapai 7,24 persen. Angka ini menurun dari tahun 2020 yang mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni 7,54 persen. Adapun tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan masih cukup banyaknya perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

2.3.8 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, terkandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

2.3.9 Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, dan penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal tanam padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba. Keramba jaring apung merupakan alternatif yang dapat dikembangkan, mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan *restocking* di perairan umum berupa lubang larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas. Hal ini dilakukan agar musim penangkapannya dan alat yang boleh dioperasikan dapat diatur selain itu, budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Subsektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumberdaya perikanan tangkap, perairan umum dan budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

**Tabel II.23.
Produksi Ikan (Ton) dan Sarana Prasarana Perikanan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2020**

INDIKATOR		Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Penangkapan Ikan					
a.	Laut	Ton	52.183	40.430	40.515,24	42.321
b.	Perairan Umum	Ton	1.900	1.230	1.280	1.290



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

INDIKATOR		Satuan	2017	2018	2019	2020
2	Produksi Perikanan Budidaya					
a.	Kolam	Ton	286.000	278.895	282.995	801.271
b.	Sawah	Ton	-	-	-	-
c.	Tambak	Ton	158.000	139.447,55	150.997,55	2.663
d.	Budidaya Laut	Ton	55	92.965	148.215	1.210
e.	Keramba Jaring Apung (KJA)	Ton	0,5	46.482,5	68.282,5	1.856
3	Perahu Penangkap Ikan Laut					
a.	Perahu Tanpa Motor	Unit	790	210	100	110
b.	Perahu Motor Tempel	Unit	782	810	1.458	1.472
c.	Kapal Motor	Unit	1.242	1.254	1.009	1.020
4	Jumlah Nelayan					
a.	Nelayan Penuh	Orang	16.219	16.325	16.350	14.087
b.	Nelayan Sambilan	Orang	5.145	5.326	5.415	9.889
c.	Nelayan Sambilan Tambahan	Orang	13.162	13.396	13.560	1.094

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

2.3.10 Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan slogan Kabupaten Tapanuli Tengah “Negeri Wisata Sejuta Pesona” dan upaya pengembangan wilayah, peranan pariwisata menjadi sangat penting. Mengingat panjangnya mata rantai kegiatan usaha kepariwisataan yang meliputi biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran pemandu wisata/ pramuwisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata. Rantai kegiatan pariwisata ini akan membutuhkan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, cinderamata, bahan dan alat bangunan.

Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya atau dengan kata lain, sektor pariwisata mempunyai imbas secara multisektoral. Pada akhirnya diharapkan dengan pengelolaan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Objek wisata yang sangat potensial meliputi pantai-pantai yang indah di pesisir Barat Kabupaten Tapanuli Tengah seperti Pantai Indah Kalangan, Pantai Bosur di Kecamatan Pandan, Pantai Indah Muara Kolang di Kecamatan Kolang, Pantai Indah Binasi di Kecamatan Sorkam, Pantai Indah Batu Gerigis di Kecamatan Andam Dewi, Pantai Sitiris-Tiris dan Pantai Kedai Gedang di Kecamatan Barus.

Demikian juga objek wisata alam pegunungan, air terjun Sihobuk di Kecamatan Sarudik serta sungai di Kecamatan Pandan, Tukka, dan Tapan Nauli serta wisata sejarah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

meliputi Makam Mahligai di Kecamatan Barus, Makam Papan Tinggi dan Makam Syeikh Tuan Pinago di Kecamatan Barus Utara. Data menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari wisatawan nusantara dan mancanegara.

Mulai dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 229.193 kunjungan wisata dan pada tahun 2020 sebanyak 331.206 kunjungan. Dari kunjungan tersebut, tujuan wisata di Tapanuli Tengah dapat terdiri dari:

1. Pantai sebanyak 57 objek;
2. Situs Sejarah sebanyak 27 objek;
3. Pulau sebanyak 28 objek;
4. Air Terjun sebanyak 30 objek; dan
5. Pemandian sebanyak 32 objek.

2.3.11 Pertanian

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan mengenai struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan terhadap sektor ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produktifitas dan nilai tambah sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum.

Kabupaten Tapanuli Tengah mampu berswasembada beras di mana produksi beras yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan daerahnya. Terlihat bahwa



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

produksi berat di Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebesar 83.622 ton sedangkan kebutuhan beras hanya mencapai 47.473 ton. Selain itu, Tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa sawit, kakao, dan coklat dimana produksi yang paling tinggi adalah produksi karet yang mencapai 23.619,99 ton dengan rata-rata produksi 950,31 kg/ha/tahun.

2.3.12 Perindustrian

Jumlah industri kecil dan rumah tangga di Tapanuli Tengah sangat bergantung dengan kondisi perikanan. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya industri di bidang pengasinan ikan dalam rangka peningkatan nilai tambah produksi perikanan. Secara umum terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah usaha industri di Tapanuli Tengah di mana pada tahun 2018 terdapat 2.041 usaha industri dan meningkat menjadi 2.222 usaha industri, khususnya industri kecil menengah.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud dapat berkenaan dengan kemampuan ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Berikut ini adalah beberapa informasi yang berkenaan dengan kemampuan daya saing daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Berikut ini akan disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut,

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT maka akan semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT perkapita, yaitu



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan perjumlah penduduk.

Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 903.269,-. Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan berbagai faktor. Idealnya untuk mengukur daya beli, pendekatan yang terbaik adalah dengan mengukur tingkat pendapatan (income) dengan *disposable income*. Namun, permasalahannya sulit sekali untuk mengukur pendapatan seseorang karena setiap orang tidak hanya mendapatkan pendapatan dari gaji pokok mereka tetapi mereka juga kerap mendapat tambahan-tambahan dari sumber-sumber penghasilan yang lain. Nilai pengeluaran perkapita tidak dapat digunakan untuk keterbandingan antar wilayah mana yang daya belinya lebih baik. Selain itu 27 komoditi yang digunakan untuk mengukur daya beli tidak mencerminkan kondisi spesifik lokal dimana komoditas tiap daerah mungkin berbeda.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rencana Peruntukan RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi: Wilayah Hutan Produksi, Wilayah Hutan Produksi Terbatas, Wilayah Hutan Konversi, Wilayah Pertanian Tanaman Pangan, Wilayah Pertanian Tanaman Hortikultura, Wilayah Perkebunan, Wilayah Industri, Wilayah Pertambangan, Wilayah Pariwisata, dan Wilayah Permukiman. Sesuai dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi penyusunan RTRW yaitu rencana peruntukan wilayah dengan peruntukan yang telah ada di lapangan.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Dari sisi luasan wilayah produktif, maka wilayah budidaya menjadi fokus dalam pengimplementasiannya. Wilayah budidaya merupakan suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Kawasan budidaya diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan asas penatagunaan tanah yaitu Lestari, Optimal dan Seimbang/serasi (LOS).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban nasional (Kantrantibnas) dan pencegahan tindak kriminal diwujudkan melalui peningkatan kerjasama aparat dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah; serta pengawasan pengendalian dan evaluasi Perda. Selanjutnya peningkatan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui pengendalian keamanan lingkungan; pertemuan berkala Ormas, Orsospol, OKP dan LSM serta terselenggaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah kelompok penduduk usia kerja (PUK) merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Sedang kelompok penduduk di luar usia kerja (PDUK) merupakan penduduk yang tidak produktif untuk melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan PUK dan PDUK dapat diketahui tingkat beban/tanggung penduduk (*dependency ratio*). *Dependency ratio* adalah merupakan perbandingan jumlah penduduk di luar usia kerja (PDUK) dengan jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau variabel yang memperlihatkan perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif. Rasio ketergantungan di Tapanuli Tengah sendiri mencapai 48,08 yang mengindikasikan dari 100 penduduk yang produktif menanggung 48 penduduk usia non produktif.

Tingkat kemampuan daya saing daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari aspek sumber daya manusia dapat juga dilihat dari kemampuannya meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi daya saing suatu daerah maka akan semakin tumbuh berkembang unit ekonomi. Pada akhirnya



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

kondisi ini akan meningkatkan kesempatan kerja atau dalam artian akan mengurangi tingkat pengangguran.

Pengangguran terbuka yang lebih besar merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi daerah. Penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran terbuka adalah salah satu sasaran pembangunan ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen utama dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Secara makro ekonomi, perkembangan kesempatan kerja nasional dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional demikian juga untuk skala daerah (*regional*) perkembangan kesempatan kerja di daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kesempatan kerja yang tersedia dalam kurun waktu tertentu merupakan cerminan dari daya dukung ekonomi dalam penggunaan sumberdaya manusia yang tersedia.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.24.
Capaian Indikator Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,2	5,18	-0,76	2,56



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.2	PDRB ADH berlaku	Milyar Rp			9956,78	10138,83	10618,75
1.3	PDRB ADH berlaku per kapita	Juta Rp	23,49	24,93	26,12	27,87	28,75
1.4	PDRB ADH konstan per kapita	Juta Rp	17,45	18,04	18,43	19,16	19,36
1.5	Angka Kemiskinan	%	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67
1.6	IPM	-	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61
1.7	Pengeluaran Rata-rata perkapita	Ribu Rp.	9.582	10.067	10.175	10.071	10.138
1.8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%		1,78	1,75	-3,05	1,13
1.9	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	85,34	86,83	87,47	87,62	87,33
1.10	Indeks Gini	-	0,31	0,31	0,317	0,309	0,335
1.11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,39	6,38	7,26	7,54	7,24
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	%	100	99,98	99,9	98,74	98,2
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,28	8,29	8,48	8,62	8,84
1.3	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,65	12,66	12,79	13,06	13,07
2	Kesehatan						
2.1.	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	66,66	66,82	67,08	67,15	67,24
3	Ketenagakerjaan						
3.1.	Persentase Penduduk yang Bekerja	%	92,61	93,62	92,74	92,46	92,76
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1	Pemuda dan Olahraga						
1.1	Cabang Olahraga	Cabor	12	12	12		
1.2	Gedung Olahraga	Unit	1	1	1		
1.3	Organisasi Kepemudaan	Unit	40	40	40		
1.4	Induk Organisasi Olahraga	Unit	1	1	1		
1.5	Kegiatan Kepemudaan	Keg	3	3	4		
1.6	Kegiatan Olahraga	Keg	12	12	6		
Aspek Pelayanan Umum							
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.1.	Pendidikan						
1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini						
1.1.1.1	Angka Partisipasi PAUD	%	58	61,74			
1.1.2.	Pendidikan dasar:						
	SD/MI						
1.1.2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%					99,09
1.1.2.2.	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	%			82,33		
1.1.2.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	96,34	96,37			99,09
1.1.2.4	Angka Partisipasi Kasar	%					116,56



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	(APK)						
1.1.2.5	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,08	0,07	0,05		
1.1.2.6	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100		
1.1.2.7	Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs		97,56	98,43	91,47		
	SMP/MTs						
1.1.2.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%					98,26
1.1.2.12	Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	%			91,99		
1.1.2.13	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%					100,87
1.1.2.14	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	89,57	89,62			88,21
1.1.2.15	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,12	0,08	0,39		
1.1.2.16	Angka Kelulusan SMP/MTs Guru	%	100	100	100		
1.1.2.17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97,14	79,29			
1.2.	Kesehatan						
1.2.1	Cakupan Posyandu aktif	%	100				
1.2.2	Cakupan puskesmas per kecamatan	%	115	115	125	125	125
1.2.3	Jumlah Fasilitas Kesehatan						
	Puskesmas	Unit	23	23	25	25	25
	Pustu	Unit	91	90	93	91	
	BPU	Unit	11	12	12	15	
	Poskesdes	Unit	152	95	74	42	
	Posyandu	Unit	382	382	383	385	
1.2.4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH			0,07		
1.2.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100		
1.2.6	Cakupan komplikasi yang ditangani	%	100	100			
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94	89	92,1		
1.2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	57,21	45,12	63,72		
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	23,37	86,93	100		
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	38,84	37,48	21,3		
1.2.12	Cakupan kunjungan bayi	%	88,87	90,37	96,3		
1.3.	Pekerjaan Umum						
1.3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	205,132	281,17	353		
1.3.2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	28,39	38,91	48,85		
1.3.3	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82,87	82,48	63,34		
1.3.4	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	7,74	7,74	7,74		
1.4.	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman						
1.4.1	Persentase rumah tangga yang sudah terakses air bersih	%	55,8	55,9	61,4		
1.4.2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	16,36	16,57	18,51		
1.4.3	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04			
1.4.4	Rumah layak huni	%	74,27	74,27	78,76		
1.4.5	Persentase kawasan kumuh	%	0,04	0,04	0,04		
1.4.6	Rasio Rumah ber IMB	%	4,81	5,76	6,88		
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan			2		
1.5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan			2		
1.5.3	Angka Kriminalitas	kasus					
1.5.4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	3,06	8,01	0,01		
1.6.	Sosial						
1.6.1	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	3,08	97,9			
1.6.2	Persentase Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	3,49	2,96	33		
II.	Urusan wajib non Pelayanan Dasar						
2.1.	Ketenagakerjaan						



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,94				
2.1.2	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	359				
2.1.3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	57,2	69,9			
2.1.4	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	57,17				
2.1.5	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%			14,29		
2.1.6	Upah minimum Kabupaten	Rp	2.221.500				
2.1.7	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh	%	64,30	67,4			
2.2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	59,64	4,3			
2.2.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	95,92	95,92	60,08		
2.2.3	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun Keatas	%	69,39	100			
2.2.4	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%			100	100	
2.3.	Ketahanan Pangan						
2.3.1	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	ada	ada			
2.3.2	ketersediaan pangan utama	%	32,61	3,35	0,21		
2.4.	Pertanahan						
2.4.1	Luas lahan bersertifikat	%	15,73	19,85	21,89		
2.4.2	Penyelesaian jin lokasi	%	100	100			
2.5.	Lingkungan Hidup						
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	66,62	66,62	74,56		
2.5.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100				
2.5.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	1,11	1,1			
2.5.4	Penegakan hukum lingkungan	%	100	8,3	14,2		
2.5.5	Indeks Kualitas Lingkungan	%			63,72		



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Hidup						
2.6.	Admnsitrasi kependudukan						
2.6.1	Kepemilikan KTP	%	73,74	88,68	83,78		
2.6.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	27,68	42,2			
2.6.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-					
2.6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	100	100			
2.6.5	Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP	Orang	170.822		210.990		
2.7.	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
2.7.1	PKK aktif	%	85	100	84,84		
2.7.2	Posyandu aktif	%	100	100	100		
2.7.3	Jumlah BUMDes	kelompok	53				
2.7.4	Personil LPM	Orang	250				
2.8.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
2.8.1	Pravelansi peserta KB aktif	%	75,45	75,45			
2.8.2	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di Setiap Desa/Kelurahan	%	112,09	126,51			
2.9.	Perhubungan						
2.9.1	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit/tahun	1.174				
2.9.2	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus :						
	- Terminal bus	terminal	1				
2.9.3	Jumlah Angkutan:						
	- Darat	unit					
2.9.4	Angkutan Darat	%	0,03	0,03			
2.9.5	Jumlah Kecelakaan lalulintas	orang	115				
2.9.6	Frekuensi Pergerakan Pesawat						
	a. Kedatangan	kali	1.578				
	b. Keberangkatan	kali	1.578				
2.9.7	Jumlah Orang yang melalui Bandara	orang	164.508				
2.9.8	Jumlah Barang yang melalui Bandara	kg	1.080.578				
2.10.	Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	unit	60				
2.10.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	jenis					
	a. Stasiun radio	unit	1	1			



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	b. TV Nasional	channel	98				
2.10.3	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem					
	a. Website	sistem	1	1	1		
	b. Aplikasi/ Sistem Informasi Manajemen (SIM)	sistem	27		9		
2.10.4	Pameran/Expo	kali	5	3			
2.10.5	Jumlah penyedia jaringan internet	unit	9				
2.10.6	Jumlah menara telekomunikasi						
	a. Provider Site Swasta	unit	114				
	b. Provider Site KPU / USO	unit	4				
2.10.7	Jumlah Media Online yang masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah	unit	27				
2.11.	Koperasi dan UMKM						
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	50,7	50,7	51,09		
2.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	unit	24.776	24.935	24.823		
2.11.3	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%			0		
2.12.	Penanaman Modal						
2.12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	538	845	599		
2.12.2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	48,95	57,07	46,31		
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga						
2.13.1	Lapangan olahraga	unit	21	135	2		
2.13.2	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	unit	2	2	135		
2.13.3	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan				50,77		
2.14.	Statistik						
2.14.1	Jumlah Sistim data dan statistik yang terintegrasi	sistim	-	-	-	-	-
2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2.14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2.15.	Persandian						
2.15.1	Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi PD	%					
2.16.	Kebudayaan						



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.16.1	Jumlah penyelenggaraan event Festival, Seni dan Budaya	Event	4	3	3		
2.16.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg Dilestarikan	%	59	59			
2.17.	Perpustakaan						
2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	1.481	800	850		
2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah :	%	78,89	37,82	39,32%		
2.18.	Kearsipan						
2.18.1	Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku	%	100				
III.	Urusan Pilihan						
3.1.	Pariwisata						
3.1.1	Kunjungan wisatawan mancanegara	orang	152	162	215		
3.1.2	Kunjungan wisatawan nusantara	orang	198.276	208.190	228.978		
3.1.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,01	0,04	1,46		
3.2.	Pertanian						
3.2.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	46,72	46,3	45,81		
3.2.2	Produktivitas Padi / Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar (Kw/Ha)	kw/ha	44,06	42,36			
3.3.	Perikanan						
3.3.1	Realisasi produksi perikanan	%	85,62	85,62	77		
3.3.2	Realisasi konsumsi ikan	%	67,08	67,08	91		
3.4.	Perdagangan						
3.4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,44	11,38	12		
3.5.	Perindustrian						
3.5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,58	11,54	11,52		
3.5.2	Pertumbuhan Industri	%	2,92	1,44	1,57		
IV.	Penunjang Urusan Pemerintahan						
4.1.	Perencanaan Pembangunan						
4.1.1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.3	Tersedianya dokumen	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	perencanaan RKPd yang ditetapkan dengan PERKADA						
4.1.4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	%	98,63	100	100		
4.2.	Keuangan						
4.2.1	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah	-	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		
4.2.2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WDP		WDP	WTP	
4.2.3	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	94,27	89,16	90,35		
4.2.4	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	87,57	77,26	78,59		
4.2.5	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	73,03	73,03	84,57		

**Tabel II.25.
Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2010)
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019**

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) Pendidikan		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	6821%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,51
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,43
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	76,77
b) Kesehatan		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,24
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,09
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,74
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41,7
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,19
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7,41
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40,02
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	52,32
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	61,44%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,52%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	36,36%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	86,52%
d) Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	17,86
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	21,24%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	150 orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	750 orang



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
	kesiapsiagaan terhadap bencana	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700 orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10 mmit
f) Sosial		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	79,56%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	61,54%
3	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	0,23%
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	33,76%
5	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	71,43%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) Tenaga Kerja		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	24%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	80,86%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4010,94%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	5,63%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	80,86%
6	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	33,33%
7	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	75,00%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,89%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,01%
c) Pangan		
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,21%
d) Pertanian		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	25,85%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	476%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan	49,80%



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
	yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	85%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%
e) Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,72%
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,56%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	83,78%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	62,86%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	7,75%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	0,00%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	3,992
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,33%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	28,67%
i) Perhubungan		
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	5,33
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	25 ruas jalan
j) Komunikasi dan Informatika		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58,49%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,67%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	29,80%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,59%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	5,00%
l) Penanaman Modal		
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	46,31%
m) Kepemudaan dan Olahraga		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	11,84%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,52%
3	Peningkatan prestasi olahraga	12 medali
n) Statistik		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	100%



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
o) Persandian		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	24,14%
p) Kebudayaan		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	61,54%
q) Perpustakaan		
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	37%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-
r) Kearsipan		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	296%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-
Urusan Pilihan		
a) Kelautan dan Perikanan		
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	42.416 ton
b) Pariwisata		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	33%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-
3	Tingkat hunian akomodasi	42%
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	4%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,00%
c) Pertanian		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	380%38%
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	-
d) Kehutanan		
e) Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-
f) Perdagangan		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	51%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	33%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	41%
g) Perindustrian		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2775%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	IKK Outcome	Realisasi 2019
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	-
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-
h) Transmigrasi		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
a) Perencanaan dan Keuangan		
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13%
2	Rasio PAD	1%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	30%
6	Opini Laporan Keuangan	WDP
b) Pengadaan		
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,20%
c) Kepegawaian		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,88%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,88%
d) Manajemen Keuangan		
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	90,35%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-
3	Manajemen Aset	
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,73%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	98,83%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%

B. CAPAIAN PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TAPANULI TENGAH



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Dalam pelaksanaan pembangunan, capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel II.26
Capaian SPM Bidang Pendidikan 2020-2021

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
Tahun 2020					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.492	4.117	Orang	54,96
2.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	44.168	43.938	Orang	97,31
3.	Pendidikan Menengah Pertama				
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	20.248	18.554	Orang	91,63



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
4.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan Menengah	78.175	78.120	Orang	99,93
Tahun 2021					
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	6.147	3.366	Orang	54,75
2.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	45.747	45.168	Orang	98,73
3.	Pendidikan Menengah Pertama				
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	24.681	22.663	Orang	91,82
4.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan Menengah	85.173	85.130	Orang	99,95

Tabel II.27

CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN 2020-2021

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
Tahun 2020					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9836	6467	Orang	66%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	9389	6005	Orang	64%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	8942	5880	Orang	66%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan layanan kesehatan	44412	26076	Orang	59%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia anak pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	57582	25739	Orang	45%
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	227448	74633	Orang	33%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan	29564	22670	Orang	77%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72176	5300	Orang	7%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	3970	1156	Orang	29%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	516	207	Orang	40%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar	7083	915	Orang	13%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9836	4050	Orang	41%
Tahun 2021					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9381	8088	Orang	86%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8954	7124	Orang	80%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	8528	7017	Orang	82%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan layanan kesehatan	41469	34258	Orang	83%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia anak pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	78746	59412	Orang	75%
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	232746	177252	Orang	76%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan	34170	33641	Orang	98%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
	skrining kesehatan				
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82477	6108	Orang	7%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	4537	2295	Orang	51%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	555	229	Orang	41%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah oarng terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar	8670	1175	Orang	14%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10986	3156	Orang	29%

**Tabel II.28
CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 2019-2020**

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal/ Indikator	2019				2020			
		Target	Realisasi	Satuan	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	79.445	48.813	orang	61,44%	79.445	49.433	orang	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79.445	416	orang	0,52%	79.445	14.826	orang	100%

**Tabel II.29
CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 2020**

N	Jenis Standar Pelayanan	2019	2020
---	-------------------------	------	------



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

o	Minimal/Indikator	Targ et	Realisa si	Satua n	%	Targ et	Realisa si	Satua n	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota								
	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	--	0	0	0	--	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota								
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	--	0	0	0	--	0

Tabel II.30

**CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT 2019-2020**

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal/Indikator	2019				2020			
		Target	Realisa si	Satua n	%	Target	Realisasi	Satuan	%
Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:									
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perbup	363.823 Orang	363.823 Orang		100%				
Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:									
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana								
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	150 orang	150 orang	orang	100%	3.000 orang	3.000 orang	orang	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan								
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	750 orang	750 orang	orang	100%	450 orang	450 orang	orang	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700 orang	700 orang	orang	100%	7.143 orang	7.143 orang	orang	100%
Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:									
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran								
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	350 Orang	245 Orang	orang	70%	50	30	kejadia n	60%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

**Tabel II.31
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2020-2021**

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
Tahun 2020					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantas di luar panti				
	Jumlah penyandang cacat fisik mental / Disabilitas ,yang telah menerima bantuan sosial	20	20	Jiwa	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				
	Jumlah Anak Terlantar yang telah menerima bantuan sosial	20	20	Jiwa	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang telah menerima bantuan sosial	25	25	Jiwa	100
4.	Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya di Luar Panti				
	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya) yang mendapatkan bantuan	5	5	Jiwa	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten				
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	7.143	7.143	Jiwa	100
Tahun 2021					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	20	20	Jiwa	100
2	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten				
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1.891	1.891	Jiwa	100
3	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)				
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	115	155	KK	100
4	Pendataan Data dan Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Fasilitas SANKEM, SKTM, dan Biaya Sekretariat PKH di Kabupaten Tapanuli Tengah	355	355	Jiwa	100



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga turut harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 demi meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadi lebih mengawatirkan dengan munculnya varian delta dan omicron yang kemudian diikuti dengan kasus aktif yang naik secara eksponensial pada awal Juli 2021. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik gaya hidup, belajar maupun cara bekerja. Hingga saat ini, perubahan-perubahan masih terus terjadi dan secara pasti cara-cara konvensional mulai bergeser ke arah digital dan *online*.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kondisi saat ini memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan dan melakukan berbagai *refocussing* anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan sosial yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional telah mengalami kontraksi.

Dari periode *year on year*, ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

wilayah, kecuali di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Dari capaian hingga triwulan III-2021, tren penerimaan pajak terus meningkat karena dipicu oleh adanya pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Tercatat hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai angka sebesar Rp 953,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 15,3 persen dibanding kinerja pada periode yang sama di tahun lalu dengan angka kontraksi sebanyak 18,8 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19.

Kondisi pasar keuangan global masih terus diwarnai oleh ketidakpastian disebabkan adanya kekhawatiran dalam pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Hal ini berdampak pada nilai tukar Rupiah pada awal triwulan IV-2021 melemah 0,53 persen secara *point to point* dan 0,56 persen secara rata-rata dibandingkan dengan akhir triwulan III-2021. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Pembangunan perekonomian global juga memperlihatkan tanda kenaikan positif yang berarti perbaikan tatanan perekonomian sudah memberikan hasil. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan bahwa ekonomi dunia telah mulai pulih, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung. Berdasarkan asumsi, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021. Kondisi ini bermakna naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi sebesar 3,1 persen. Walau demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 4,9 persen pada tahun 2022. Hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang. Khusus pada perekonomian negara berkembang, ekonomi diproyeksikan tumbuh sebesar 6,4 persen pada tahun 2021 atau lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu akan melambat menjadi 5,1 persen pada 2022, termasuk Indonesia.

Berbagai skenario yang telah dirumuskan membuat postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kembali



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat; level pemerintah provinsi; dan level pemerintah kabupaten/kota kebijakan ekonomi secara lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 6,48% kemudian ditahun 2019 naik menjadi 7,33%, kemudian naik lagi hingga pada tahun 2020 mencapai 7,38%, namun pada tahun 2021 turun menjadi 7,26%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebesar 6,49% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiscal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus menggali sumber-sumber keuangannya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Gambar III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Pendapatan	1.183.737	1.206.241	1.185.787	1.161.138	1.411.383	1.229.657
Pendapatan Asli Daerah	76.660,88	88.441,12	87.469,32	84.353,11	88.164	85.018
Persentase	6,48%	7,33%	7,38%	7,26%	6,25%	6,94%

Sumber: *BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)*

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018-2022 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami penurunan sebesar -1% per tahun. Penurunan tersebut tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi sebesar 4%. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami realokasi dan refocusing sehingga mengalami penurunan sebesar -1%, sebagaimana bantuan keuangan dari provinsi juga hanya mendapatkan pada tahun 2018.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

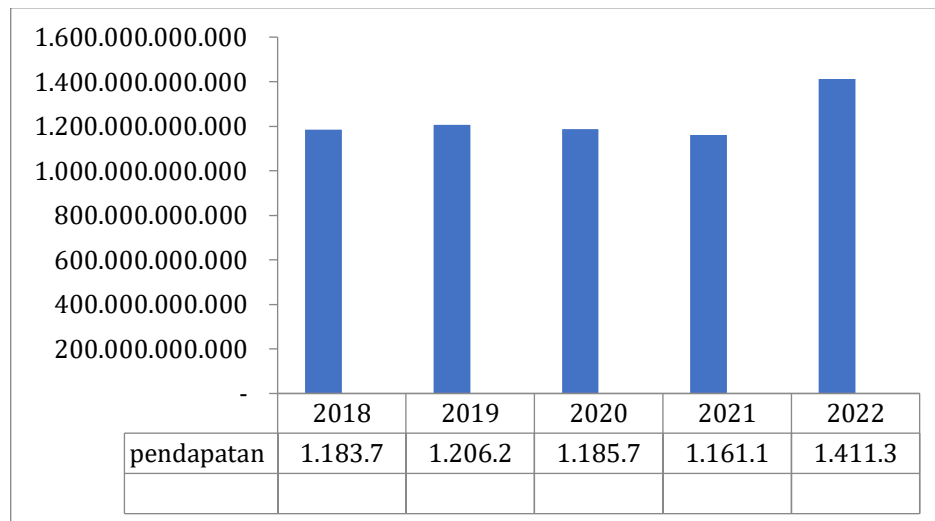
Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -1% pertahun dari Rp. 1.183 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 1.161 miliar di tahun 2021,



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam jutaan)**



Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah terbaik pada tahun 2019. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 4% pertahun dari Rp. 76 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 84 miliar di tahun 2021. Pendapatan transfer juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar -1% pertahun dari Rp. 1,060 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 1,016 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik hingga 10% pertahun dari Rp. 46 miliar di tahun 2018, meningkat hingga Rp 59 miliar di tahun 2021.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

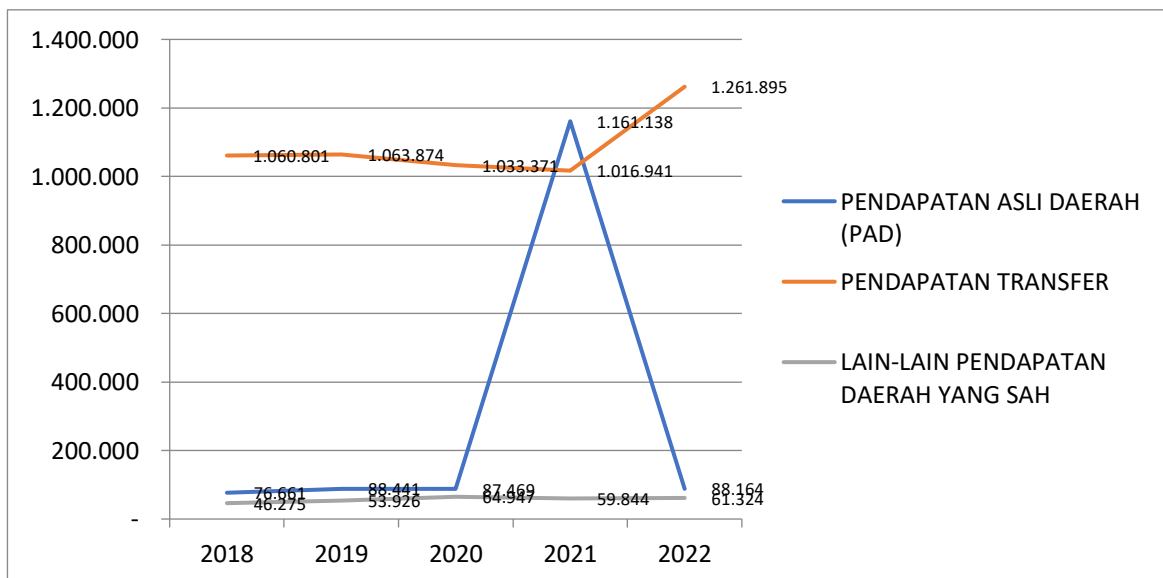
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

**Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (rupiah)**



Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022(diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2018-2021, PAD konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan 4% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor lain-lain PAD yang sah. Pembatasan kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta adanya stimulus pengurangan pajak/retribusi menjadi beberapa alasan turunnya PAD di tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Gambar III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (juta)**

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
PENDAPATAN DAERAH	1.183.736,80	1.206.241,25	1.185.787,16	1.161.137,92	-1%	1.411.383
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.660,88	88.441,12	87.469,32	84.353,11	4%	88.164
Pendapatan Pajak Daerah	18.015,23	20.293,41	18.988,07	21.778,78	7%	23.303
Pendapatan Retribusi Daerah	2.112,12	1.813,27	1.609,79	2.107,70	2%	2.150
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.674,63	11.965,47	9.475,07	8.736,25	-2%	8.911
Lain-lain PAD yang Sah	46.858,90	54.368,98	57.396,39	51.730,37	4%	53.800
PENDAPATAN TRANSFER	1.060.800,76	1.063.873,75	1.033.370,84	1.016.941,04	-1%	1.261.895
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	887.237,07	863.854,17	844.796,95	971.901,73	3%	1.001.059
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	120.966,78	140.541,97	154.553,40	-	-25%	157.644
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	#VALUE!	59.477,61	34.020,50	45.039,31	-5%	49.543
Bantuan Keuangan	52.596,91					53.649



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.275,15	53.926,37	64.947,00	59.843,77	10%	61.324
Pendapatan Hibah	46.275,15	53.926,37	64.947,00	9.436,62	-16%	9.908
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	50.407,15		51.415

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

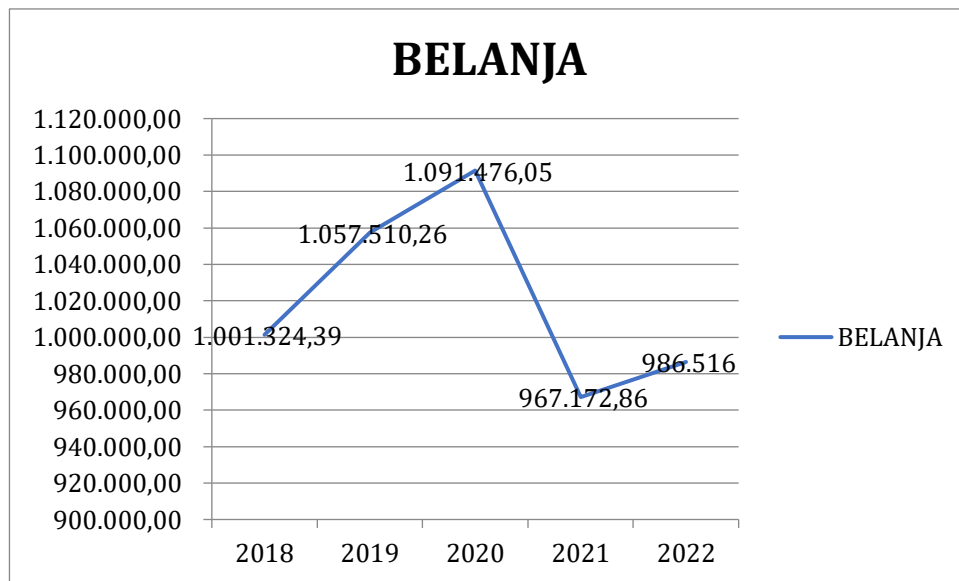
Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2018-2022 realisasi belanja daerah mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai -1% per tahun dari Rp. 1.001 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 967 miliar di tahun 2021. Penurunan belanja tersebut seirama dengan penurunan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022



Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan cenderung menurun dengan pertumbuhan -1%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Fluktuasi belanja tidak langsung sangat dipengaruhi oleh naik turunnya belanja pegawai, belanja hibah serta belanja bantuan keuangan. Untuk belanja pegawai mengalami penurunan -3% pertahun dari Rp. 778 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 753 miliar di tahun 2021. Sedangkan belanja hibah meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 13 miliar rupiah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2018-2021 mengalami rata-rata penurunan sebesar -1%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Gambar III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022(Dalam Jutaan)**

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
BELANJA	1.001.324,39	1.057.510,26	1.091.476,05	967.172,86	-1	986.516
BELANJA OPERASI	778.749,72	837.841,87	825.217,50	753.922,39	-1	769.001
Belanja Pegawai	484.358,43	464.345,25	473.257,67	444.375,48	-3%	453.263
Belanja Barang dan Jasa	282.768,75	360.446,60	334.160,53	298.924,53	3%	304.903
Belanja Bunga	-	-	1.509,78	6.804,19	#DIV/0!	6.940
Belanja Hibah	9.359,00	8.447,08	13.792,70	3.296,68	-8%	3.363
Belanja Bantuan Sosial	2.263,54	4.602,95	2.496,83	521,50	-7%	532
BELANJA MODAL	220.747,37	219.450,40	244.316,44	212.482,13	-1	216.732
Belanja Modal Tanah	1.763,85	926,65	280,62	-	-72%	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.451,51	27.040,64	36.601,87	25.714,77	0%	26.229
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.615,36	54.180,63	61.639,59	63.471,75	5%	64.741
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.105,45	121.900,58	128.307,58	120.741,17	-1%	123.156
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.811,20	15.401,91	17.486,77	2.554,45	-17%	2.606
BELANJA TAK TERDUGA	1.827,30	217,99	21.942,11	768,34	3260%	784



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis) 2022
	2018	2019	2020	2021		
Belanja Tak Terduga	1.827,30	217,99	21.942,11	768,34	3260%	784
TRANSFER	149.647,33	168.802,00	170.941,28	176.818,90	-6	180.355
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	149.647,33	168.802,00	170.941,28	176.818,90	-6	180.355
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	27.312,68	27.451,46	28.312,47	-	-32%	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	567,43	542,27	-	176.818,90		180.355
Transfer Dana Desa	121.767,23	140.808,27	142.628,80	-	-28%	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (diolah)



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

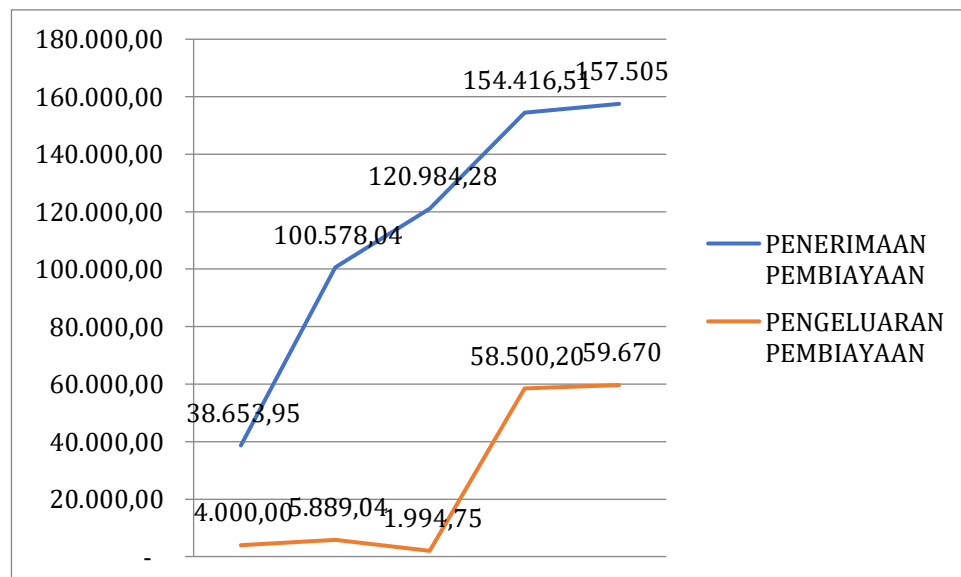
3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurun waktu tahun 2018-2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pinjaman dalam negeri.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi), Pembayaran Pokok Utang dan Pembentukan Dana Cadangan. Selama kurun waktu 2018-2021, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melakukan pembentukan dana cadangan.

**Gambar III.4
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022**



Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.653,95	100.578,04	120.984,28	154.416,51	30%	157.505
Penggunaan SiLPA	38.653,95	100.578,04	74.539,10	42.413,13	30%	43.261
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	46.445,18	112.003,39		114.243
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000,00	5.889,04	1.994,75	58.500,20	14%	59.670
Penyertaan Modal/Investasi	4.000,00	5.889,04	1.994,75	3.200,20	14%	3.264
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	55.300,00		56.406

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapanuli Tengah berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tapanuli Tengah disajikan pada Tabel berikut ini,

**Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)**

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021 (masih proses)
	ASET	-	-	-	-	-
	ASET LANCAR	-	-	-	-	
	Kas di Kas Daerah	37.630,99	97.487,40	71.032,91	40.916,17	
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	138,63	166,26	18,98	501,27	
	Kas di BLUD	1.416,49	470,30	588,28	176,77	
	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	
	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	-	
	Kas Lainnya	26,84	2.730,87	3.340,28	984,63	
	Setara Kas	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	
	Piutang Pendapatan	13.213,90	40.046,90	23.063,23	33.788,18	
	Piutang Lainnya	7.106,27	13.798,59	14.854,05	15.253,56	
	Penyisihan Piutang	- 9.358,70	- 9.261,67	- 10.282,57	- 12.130,64	
	Beban dibayar dimuka	5,44	14,17	82,45	77,48	
	Persediaan	7.903,25	9.327,78	8.510,66	9.991,36	
	JUMLAH ASET LANCAR	58.083,12	154.780,59	111.208,26	89.558,77	-
		-	-	-	-	
	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	
	Dana Bergulir	-	-	-	-	
	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021 (masih proses)
	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43.204,39	46.703,79	46.791,33	47.166,33	
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	43.204,39	46.703,79	46.791,33	47.166,33	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	43.204,39	46.703,79	46.791,33	47.166,33	-
		-	-	-	-	
	ASET TETAP	-	-	-	-	
	Tanah	152.800,27	142.276,15	143.945,27	147.831,26	
	Peralatan dan Mesin	292.701,93	315.936,24	349.898,12	370.307,77	
	Gedung dan Bangunan	586.724,80	640.388,20	684.403,04	713.419,55	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	903.630,78	982.471,67	1.190.979,91	1.359.963,52	
	Aset Tetap Lainnya	42.281,93	46.106,93	51.302,48	20.127,47	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.012,09	72.167,10	9.852,64	56.023,35	
	Akumulasi Penyusutan	-770.061,00	-882.223,96	-977.614,66	-1.089.671,09	
	JUMLAH ASET TETAP	1.221.090,80	1.317.122,34	1.452.766,80	1.578.001,84	-
		-	-	-	-	
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	
	Dana Cadangan	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	ASET LAINNYA	-	-	-	-	
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
	Aset Tidak Berwujud	1.307,72	1.307,72	-	32,07	
	Aset Lain-lain	83.271,78	74.370,56	73.099,42	65.884,74	
	JUMLAH ASET LAINNYA	84.579,49	75.678,28	73.099,42	65.916,81	-
	JUMLAH ASET	1.406.957,80	1.594.285,00	1.683.865,82	1.780.643,75	-
		-	-	-	-	
	KEWAJIBAN	-	-	-	-	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021 (masih proses)
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78,73	116,44	99,70	219,46	
	Utang Bunga	-	-	-	-	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	46.445,18	
	Pendapatan Diterima Dimuka	30,74	38,88	30,49	50,21	
	Utang Beban	9.461,97	16.784,24	18.579,67	17.772,51	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.969,98	19.434,66	41.900,66	69.229,55	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.541,43	36.374,23	60.610,52	133.716,91	-
		-	-	-	-	
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.541,43	36.374,23	60.610,52	133.716,91	-
	EKUITAS					-
		1.392.416,37	1.557.910,77	1.623.255,30	1.646.926,84	
	EKUITAS					
		1.392.416,37	1.557.910,77	1.623.255,30	1.646.926,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					-
		1.406.957,80	1.594.285,00	1.683.865,82	1.780.643,75	

Sumber: *BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (diolah)*

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021 membaik setiap tahun dan berada di atas angka 8%, sehingga kemampuan membayar hutang jangka pendek sangat baik sampai dengan 149,31% pada tahun 2020.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan),

Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Rasio Lancar
1	2018	154.780.587.848	36.374.226.212	23,50%
2	2019	111.208.256.306	60.610.519.095	54,50%
3	2020	89.558.769.271	133.716.907.747	149,31%
4	2021			

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

1. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026**

entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2018-2020 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,08% dan yang tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 0,02%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2018-2020 fluktuatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Tapanuli Tengah cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

**Tabel III.8
Rasio Hutang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)**

Uraian	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	36.374,23	60.610,52	133.716,91	-
EKUITAS	1.557.910,77	1.623.255,30	1.646.926,84	-
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,02	0,04	0,08	#DIV/0!

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif hingga ditahun 2020 mencapai angka 0,08%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 0,02%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2018-2021 tidak pernah lebih dari 0,10% dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2020. Artinya secara keseluruhan nilai total aset



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021
(dalam Jutaan)**

Uraian	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	36.374,23	60.610,52	133.716,91	
AKTIVA	1.594.285,00	1.683.865,82	1.780.643,75	
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,02	0,04	0,08	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (diolah)

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu 2018-2021 tren etap. Adapun rasio di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mencapai 0,06%. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

**Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021
(dalam Jutaan)**

Uraian	2018	2019	2020	2021
PAD	76.660,88	88.441,12	87.469,32	
AKTIVA TETAP	1.317.122,34	1.452.766,80	1.578.001,84	
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,06	0,06	0,06	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu 2018-2021 relatif tetap. Rasio ditahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mencapai 0,05%. Secara keseluruhan dari tahun 2018-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

**Tabel III.10
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018- 2021 (dalam Jutaan)**

Uraian	2018	2019	2020	2021
PAD	76.660,88	88.441,12	87.469,32	
TOTAL AKTIVA	1.594.285,00	1.683.865,82	1.780.643,75	
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,05	0,05	0,05	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 44% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 sebesar 48% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya menurun hingga mencapai 43% di tahun 2022.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	484.358	1.005.324,39	48%
2	2019	464.345	1.063.399,29	44%
3	2020	473.258	1.093.470,80	43%
4	2021	444.375	1.025.673,05	43%
5	2022	453.263	1.046.186,52	43%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
	Rata-rata	463.920	1.046.811	44%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2018-2022 cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 2% pertahun dari Rp. 651 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 691 miliar ditahun 2021. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya belanja transfer dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer pos belanja bagi hasil meningkat dengan rata-rata 13% pertahun dari Rp. 149 miliar ditahun 2018 menjadi Rp. 176 miliar di tahun 2021. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tabel III.12

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	651.455,61	652.304,30	685.935,11	691.085,29		704.907
BELANJA OPERASI	495.980,97	477.395,28	491.056,98	454.997,86		464.098
Belanja Pegawai	484.358,43	464.345,25	473.257,67	444.375,48	-3%	453.263
Belanja Bunga	-	-	1.509,78	6.804,19		6.940
Belanja Hibah	9.359,00	8.447,08	13.792,70	3.296,68	-8%	3.363
Belanja Bantuan Sosial	2.263,54	4.602,95	2.496,83	521,50	-7%	532
BELANJA TAK TERDUGA	1.827,30	217,99	21.942,11	768,34		784
Belanja Tak Terduga	1.827,30	217,99	21.942,11	768,34	3260%	784
TRANSFER	149.647,33	168.802,00	170.941,28	176.818,90		180.355
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	149.647,33	168.802,00	170.941,28	176.818,90		180.355
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	27.312,68	27.451,46	28.312,47	-	-32%	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	567,43	542,27	-	176.818,90		180.355
Transfer Dana Desa	121.767,23	140.808,27	142.628,80	-	-28%	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000,00	5.889,04	1.994,75	58.500,20		59.670
Penyertaan Modal/Investasi	4.000,00	5.889,04	1.994,75	3.200,20	14%	3.264



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021		2022
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	55.300,00		56.406

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) perkembangan defisit riil anggaran relatif fluktuatif namun mempunyai tren positif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2019 di mana defisit tahun 2019 sebesar -Rp 20 miliar dan tahun 2020 sebesar -Rp. 76 miliar rupiah. Adapun 2021 terjadi surplus riil anggaran dengan nilai sebesar Rp 17 miliar.

**Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)**

Uraian	Realisasi				APBD (Prognosis)
	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN DAERAH	1,183,736.80	1,206,241.25	1,185,787.16	1,161,137.92	1,411,383
BELANJA	1,001,324.39	1,057,510.26	1,091,476.05	967,172.86	986,516
SURPLUS/DEFISIT	32,765.07	(20,071.01)	(76,630.16)	17,146.17	244,511
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38,653.95	100,578.04	120,984.28	154,416.51	157,505
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,000.00	5,889.04	1,994.75	58,500.20	59,670
PEMBIAYAAN NETTO	34,653.95	94,689.01	118,989.53	95,916.32	97,835
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN	67,419.02	74,617.99	42,359.37	113,062.48	342,346

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dengan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 dapat ditutup oleh SiLPA dimana SiLPA yang dapat dimanfaatkan di tahun 2019 sebesar Rp 38 miliar dan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 120 miliar.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel III.15
Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	38,653.95	100,578.04	74,539.10	42,413.13	43,261
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	46,445.18	112,003.39	114,243
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	38,653.95	100,578.04	120,984.28	154,416.51	157,505

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

**Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah;	0%	0%	0%	0%	0%
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2018-2022 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)**

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A
Jumlah SiLPA	38,653.95	100 %	100,578.04	100 %	74,539.10	100 %	42,413.13	100 %	43,261	100 %
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	38,653.95	100 %	100,578.04	100 %	74,539.10	100 %	42,413.13	100 %	43,261	100 %
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapanuli Tengah. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 hingga 2022 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Sumatra Utara. Kondisi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2023-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Sumatra Utara dan Nasional.

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memerhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

keuangan lokal secara umum ditahun 2022 diproyeksikan mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang ditahun 2020 mengalami penurunan yaitu Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, maka ditahun 2022 dua komponen ini ditargetkan nilainya membaik seperti realisasi tahun 2019. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat pandemi Covid-19 sudah dalam tahap *recovery*. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar APBD 2022.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2022-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik sebesar 7%; 2%; 2%; dan 4% dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 92 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 105 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diperkirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2022. Pada awal tahun 2023 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

- 1) Dana Perimbangan;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus diproyeksikan nilainya naik 3% dari tahun 2022 menjadi 1.001 miliar pada tahun 2023 dan naik hingga Rp. 1.126 miliar pada tahun 2026; dan
- 3) Dana insentif daerah yang termasuk didalam pendapatan transfer bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau kinerja tertentu.

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah juga ditargetkan naik sebesar 3,50% nilainya dari tahun 2022 yaitu senilai Rp 62 miliar dan menjadi 67 miliar pada tahun 2026. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026
(dalam jutaan)**

Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	1,161,137.92		1,411,383	1,456,123	1,502,594	1,550,887	1,601,101
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,353.11		88,164	92,168	96,377	100,803	105,456
Pendapatan Pajak Daerah	21,778.78	7%	23,303	24,935	26,680	28,548	30,546
Pendapatan Retribusi Daerah	2,107.70	2%	2,150	2,193	2,237	2,281	2,327
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,736.25	2%	8,911	9,089	9,271	9,456	9,646
Lain-lain PAD yang Sah	51,730.37	4%	53,800	55,952	58,190	60,517	62,938
PENDAPATAN TRANSFER	1,016,941.04		1,261,895	1,301,107	1,341,800	1,384,052	1,427,947
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	971,901.73	3%	1,001,059	1,031,091	1,062,023	1,093,884	1,126,700
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2%	157,644	160,797	164,013	167,294	170,639



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	45,039.31	10%	49,543	54,498	59,947	65,942	72,536
Bantuan Keuangan	-	2%	53,649	54,722	55,816	56,933	58,071
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59,843.77		61,324	62,847	64,417	66,033	67,697
Pendapatan Hibah	9,436.62	5%	9,908	10,404	10,924	11,470	12,044
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,407.15	2%	51,415	52,444	53,492	54,562	55,654

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

Seperti yang terlihat pada tabel III.17 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
- c. Pemberian Reward dan Punishment ;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- 3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan
 - b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun Anggaran 2023 anggaran belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan sebesar Rp 1,006 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.784 miliar, belanja modal sebesar Rp 221 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 799 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 anggaran belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 832 miliar, belanja modal sebesar Rp 234 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 848 juta dan belanja transfer sebesar Rp 195 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1067 triliun. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.18 di bawah ini.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2026 (Juta Rupiah)**

Uraian	Realisasi	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA	967,172.86	986,516	1,006,247	1,026,372	1,046,899	1,067,837
BELANJA OPERASI	753,922.39	769,001	784,381	800,068	816,070	832,391
Belanja Pegawai	444,375.48	453,263	462,328	471,575	481,006	490,626
Belanja Barang dan Jasa	298,924.53	304,903	311,001	317,221	323,566	330,037
Belanja Bunga	6,804.19	6,940	7,079	7,221	7,365	7,512
Belanja Hibah	3,296.68	3,363	3,430	3,498	3,568	3,640
Belanja Bantuan Sosial	521.50	532	543	553	564	576
BELANJA MODAL	212,482.13	216,732	221,066	225,488	229,997	234,597
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,714.77	26,229	26,754	27,289	27,834	28,391
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,471.75	64,741	66,036	67,357	68,704	70,078
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120,741.17	123,156	125,619	128,131	130,694	133,308
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,554.45	2,606	2,658	2,711	2,765	2,820
BELANJA TAK TERDUGA	768.34	784	799	815	832	848
Belanja Tak Terduga	768.34	784	799	815	832	848
TRANSFER	176,818.90	180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	176,818.90	180,355	183,962	187,642	191,394	195,222



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Uraian	Realisasi	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	176,818.90	180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
Transfer Dana Desa	-	-	-	-	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2023-2026, meliputi:

- 1) Pemulihan pasca Covid-19 berikut dampaknya;
- 2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 2,00\%$ pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 2,00% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu mengalokasikan Belanja Tak Terduga sebagai antisipasi perkembangan pandemi Covid-19 varian Delta dan Omicron yang diperkirakan masih berlangsung. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini,



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel III.21
Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026
(Juta Rupiah)**

Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	691,085.29		704,907	719,005	733,385	748,053	763,014
BELANJA OPERASI	454,997.86		464,098	473,380	482,847	492,504	502,354
Belanja Pegawai	444,375.48	2%	453,263	462,328	471,575	481,006	490,626
Belanja Bunga	6,804.19	2%	6,940	7,079	7,221	7,365	7,512
Belanja Hibah	3,296.68	2%	3,363	3,430	3,498	3,568	3,640
Belanja Bantuan Sosial	521.50	2%	532	543	553	564	576
BELANJA TAK TERDUGA	768.34		784	799	815	832	848
Belanja Tak Terduga	768.34	2%	784	799	815	832	848
TRANSFER	176,818.90		180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	176,818.90		180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	2%	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	176,818.90	2%	180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
Transfer Dana Desa	-	2%	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,500.20		59,670	60,864	62,081	63,322	64,589
Penyertaan Modal/Investasi	3,200.20	2%	3,264	3,329	3,396	3,464	3,533



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55,300.00	2%	56,406	57,534	58,685	59,858	61,056

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 160 miliar naik menjadi Rp. 170 miliar pada tahun 2026 dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022-2026 antara lain dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada proyeksi APBD tahun 2022-2026 ini mencakup penyertaan modal diproyeksikan sebesar Rp.3,2 miliar pada tahun 2023 dan naik sebesar sebesar Rp. 3,5 miliar pada tahun 2026.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

- sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
- c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tabel III.22
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154,416.51		157,505	160,655	163,868	167,145	170,488
Penggunaan SiLPA	42,413.13	2%	43,261	44,127	45,009	45,909	46,828
Pinjaman Dalam Negeri	112,003.39	2%	114,243	116,528	118,859	121,236	123,661
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,500.20		59,670	60,864	62,081	63,322	64,589
Penyertaan Modal/Investasi	3,200.20	2%	3,264	3,329	3,396	3,464	3,533
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55,300.00	2%	56,406	57,534	58,685	59,858	61,056



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2023 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	1,161,137.92	1,411,382.80	1,456,122.92	1,502,593.96	1,550,887.37	1,601,101.15
Penerimaan Pembiayaan	154,416.51	157,504.84	160,654.94	163,868.04	167,145.40	170,488.31
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	691,085.29	704,907.00	719,005.14	733,385.24	748,052.94	763,014.00
KAPASITAS RIIL	624,469.14	863,980.65	897,772.72	933,076.76	969,979.82	1,008,575.46

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel III.24
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)**

No.	Uraian	Perubahan 2021	APBD	Proyeksi			
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.161.13 7,92	1.411.38 2,80	1.456.12 2,92	1.502.59 3,96	1.550.88 7,37	1.601.10 1,15
2	Penerimaan Pembiayaan	154.416, 51	157.505	160.655	163.868	167.145	170.488
Kapasitas Pagu OPD		1.315.55 4,43	1.568.88 7,64	1.616.77 7,85	1.666.46 2,00	1.718.03 2,77	1.771.58 9,46

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah pada periode 2023-2026 ini merupakan estafet dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga tak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2023-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah periode pembangunan 2023-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2023-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni: **“Belum Optimalnya Kemandirian Dan Pemerataan Pembangunan Masyarakat Tapanuli Tengah”**.

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*;
2. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur guna akselerasi perekonomian berkelanjutan.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada bagan berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Gambar IV.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026



Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum *reliabel*, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis *baseline* data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem *database* yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. Masih kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

capaian kinerja untuk mencapai sistem manajemen kinerja, lemahnya komitmen pimpinan dan kapasitas bagi kepala Perangkat Daerah dalam perbaikan manajemen di instansi pemerintahan. Pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengubah pola kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan *software* klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.

2. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

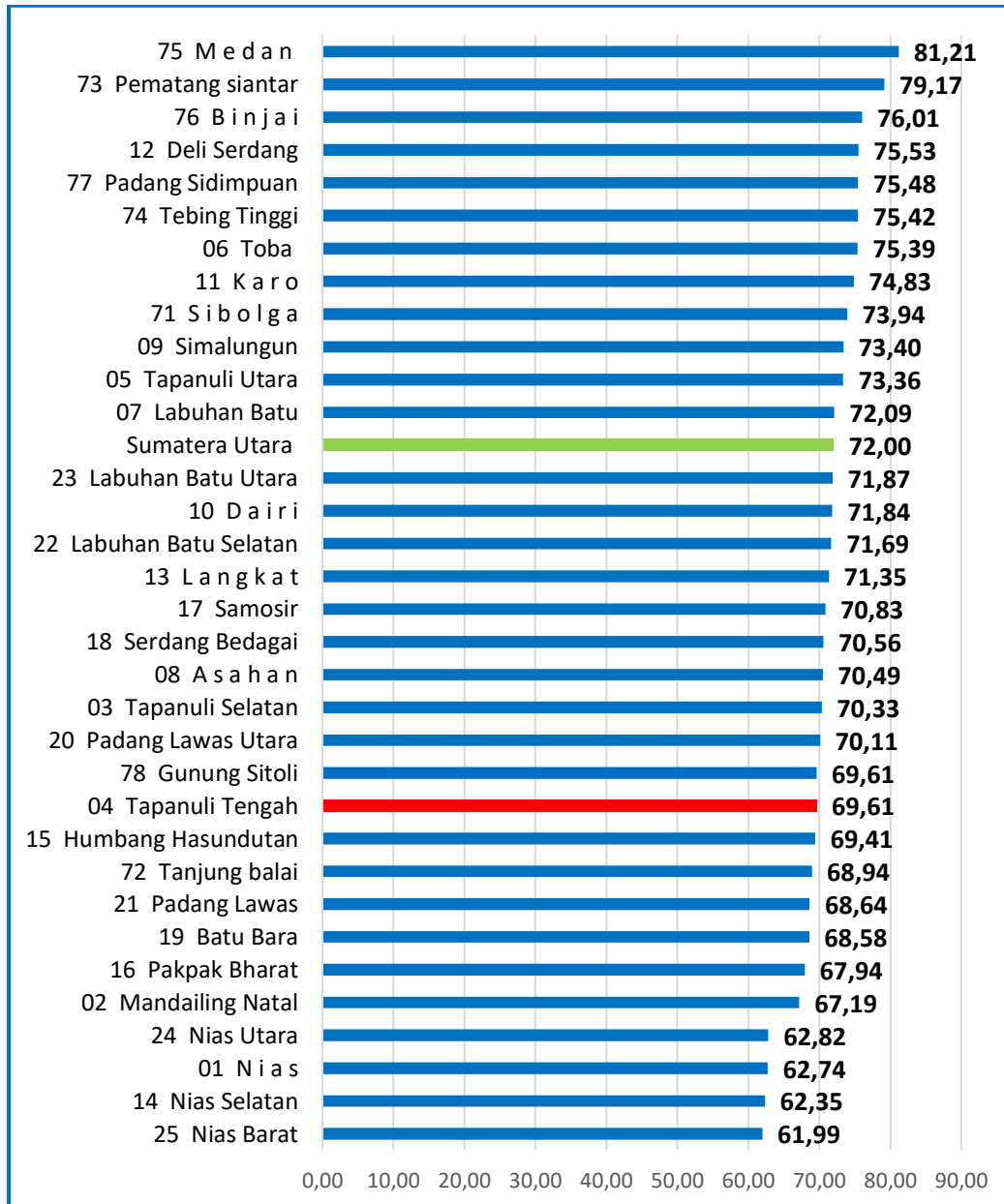
Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Tapanuli Tengah masih berproses untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan nasional.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada jauh di bawah angka Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. IPM Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 69,61 dimana angka ini berada di peringkat sebelas terbawah. Adapun IPM Provinsi Sumatera Utara berada di atasnya dengan capaian 72,00 dan capaian Nasional sebesar 72,29.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Tapanuli Tengah ini merupakan hasil dari capaian komponen penyusun IPM baik dari sisi pendidikan dan kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya untuk memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya sulitnya akses serta belum optimalnya pendanaan, masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah dibanding wilayah lain. Hal ini terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih cukup jauh dari harapan. Terlihat dari capaian rata-rata lama sekolah Tapanuli Tengah selama 8,84 tahun dan harapan lama sekolah Tapanuli Tengah selama 13,07 tahun masih jauh dibandingkan angka Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.

Tabel IV.1
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
INDONESIA	8,54	13,08
SUMATERA UTARA	9,58	13,27
Nias	5,64	12,84
Mandailing Natal	8,63	13,61
Tapanuli Selatan	9,29	13,35
Tapanuli Tengah	8,84	13,07
Tapanuli Utara	9,99	13,70
Toba Samosir	10,57	13,46
Labuhan Batu	9,25	12,74
Asahan	8,80	12,61



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
Simalungun	9,61	12,79
Dairi	9,59	13,11
Karo	10,00	12,77
Deli Serdang	10,10	13,36
Langkat	8,66	13,24
Nias Selatan	6,06	12,27
Humbang Hasundutan	9,71	13,29
Pakpak Bharat	9,14	13,87
Samosir	9,44	13,48
Serdang Bedagai	8,69	12,61
Batu Bara	8,07	12,64
Padang Lawas Utara	9,38	13,04
Padang Lawas	9,02	13,27
Labuhan Batu Selatan	8,90	13,01
Labuhan Batu Utara	8,41	13,19
Nias Utara	6,77	13,04
Nias Barat	6,69	12,95
Kota Sibolga	10,41	13,28
Kota Tanjung Balai	9,45	12,62
Kota Pematang Siantar	11,29	14,57
Kota Tebing Tinggi	10,44	12,73
Kota Medan	11,48	14,75
Kota Binjai	10,94	13,63
Kota Padangsidimpuan	11,09	14,56
Kota Gunungsitoli	8,62	13,75

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021

Kondisi ini juga diperkuat dari angka partisipasi murni Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih berada di bawah 100 baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP.

Tabel IV.2
Angka Partisipasi Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Wilayah	Angka Partisipasi Kasar per kabupaten		Angka Partisipasi Murni per kabupaten	
	SD	SMP	SD	SMP
Kabupaten				
01 Nias	114,10	89,08	98,68	78,03



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

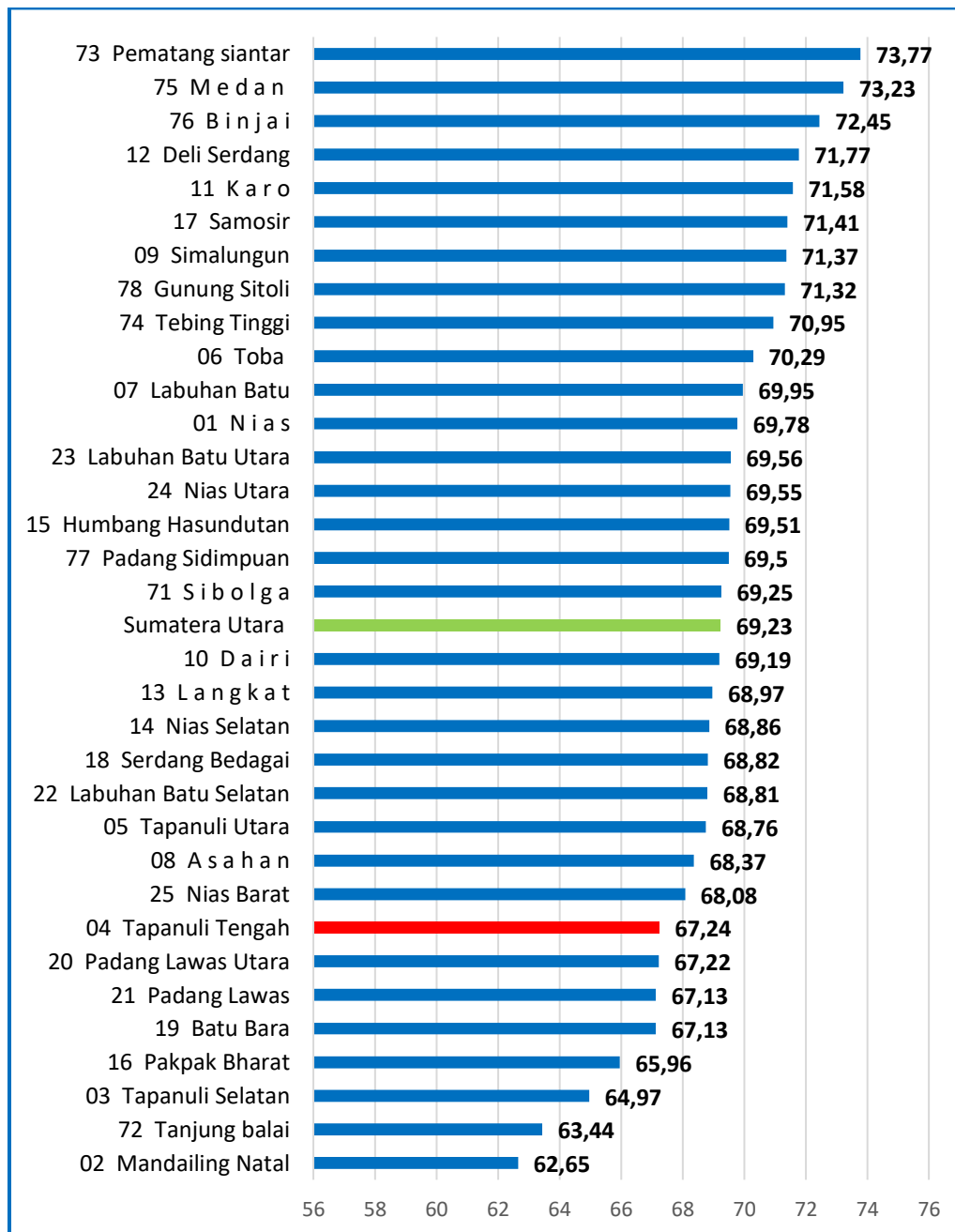
Wilayah	Angka Partisipasi Kasar per kabupaten		Angka Partisipasi Murni per kabupaten	
	SD	SMP	SD	SMP
02 Mandailing Natal	108,54	96,45	99,46	83,99
03 Tapanuli Selatan	110,96	89,50	98,39	81,81
04 Tapanuli Tengah	115,62	102,75	99,37	88,57
05 Tapanuli Utara	113,17	95,67	99,40	88,80
06 Toba	106,97	107,01	98,90	89,95
07 Labuhanbatu	106,06	101,79	99,21	86,14
08 Asahan	107,76	90,01	99,66	82,78
09 Simalungun	110,34	83,37	99,35	78,88
10 Dairi	111,00	98,24	99,19	90,21
11 Karo	106,58	90,55	98,74	84,05
12 Deli Serdang	106,03	87,42	95,15	71,59
13 Langkat	113,34	97,39	98,64	78,97
14 Nias Selatan	111,59	80,78	96,08	70,44
15 Humbang Hasundutan	110,70	97,60	99,31	92,94
16 Pakpak Bharat	110,04	103,67	98,73	88,99
17 Samosir	117,57	98,31	99,04	90,92
18 Serdang Bedagai	112,93	86,00	99,03	80,02
19 Batu Bara	113,70	83,57	99,26	75,32
20 Padang Lawas Utara	112,93	94,49	98,85	83,65
21 Padang Lawas	109,67	102,96	98,98	84,47
22 Labuhanbatu Selatan	104,95	95,93	99,08	85,99
23 Labuhanbatu Utara	111,92	100,95	99,23	77,17
24 Nias Utara	110,32	88,95	98,74	81,50
25 Nias Barat	120,12	95,27	99,41	82,98
Kota				
71 Sibolga	109,54	92,30	99,52	88,70
72 Tanjungbalai	106,35	84,68	98,50	81,49
73 Pematangsiantar	112,44	89,90	99,38	81,46
74 Tebing Tinggi	111,43	87,05	98,26	82,41
75 Medan	105,90	114,07	93,26	79,88
76 Binjai	105,93	88,07	99,11	84,57
77 Padangsidimpuan	108,77	88,21	99,69	85,04
78 Gunungsitoli	116,21	91,14	99,03	82,89
Sumatera Utara	109,46	94,72	97,72	80,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Gambar IV.3
Angka Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021





RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, AHH menjadi salah satu *impact* yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah.

Terlihat bahwa capaian AHH Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 adalah 67,24 tahun dengan capaian tersebut, AHH Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada peringkat 22 di antara seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara di mana capaian AHH Provinsi Sumatera Utara berada di atas Tapanuli Selatan selama 69,23 tahun.

3. Belum optimalnya kesejahteraan sosial masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

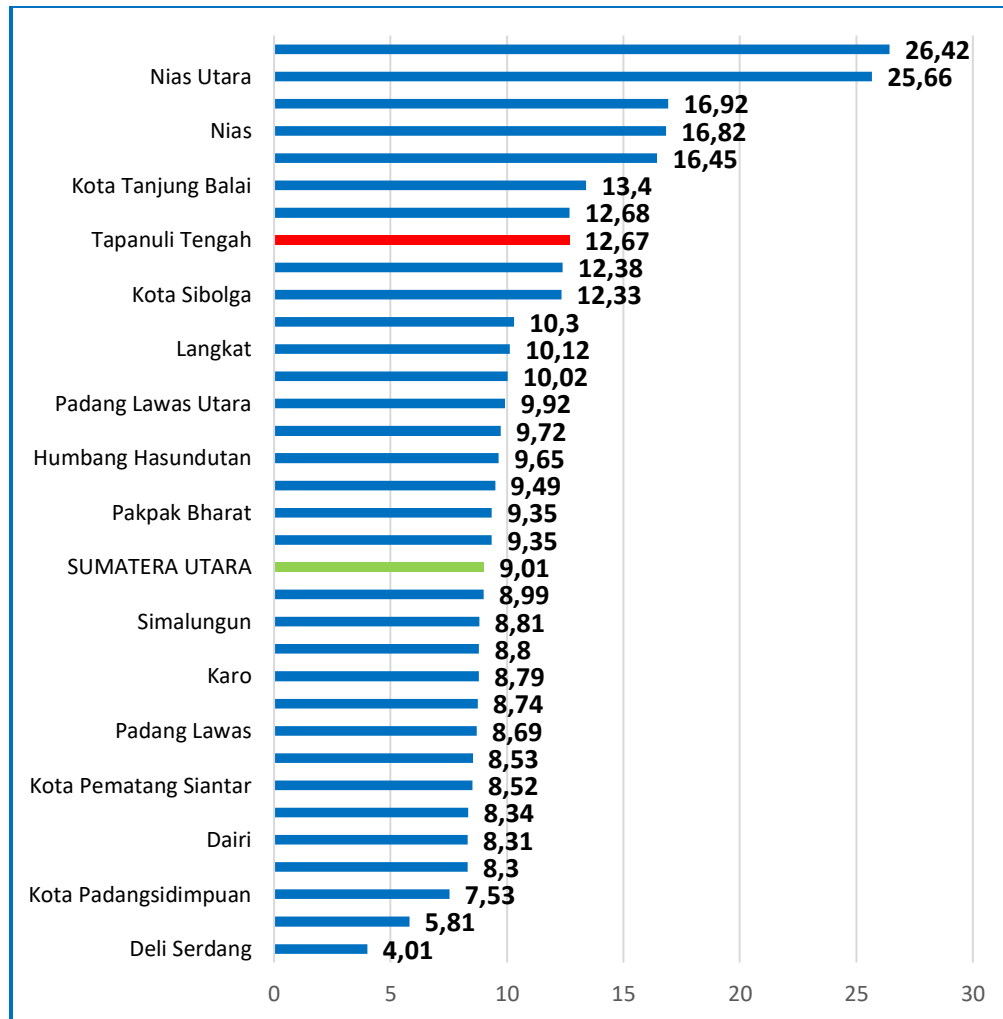
Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Angka kemiskinan Tapanuli Tengah mencapai 12,67 persen pada tahun 2021 dimana capaian ini jauh di bawah angka kemiskinan Sumatera Utara yang mencapai 9,01 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, kemiskinan Tapanuli Tengah berada di peringkat 8 tertinggi.

Gambar IV.4
Tingkat Kemiskinan (%)
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026



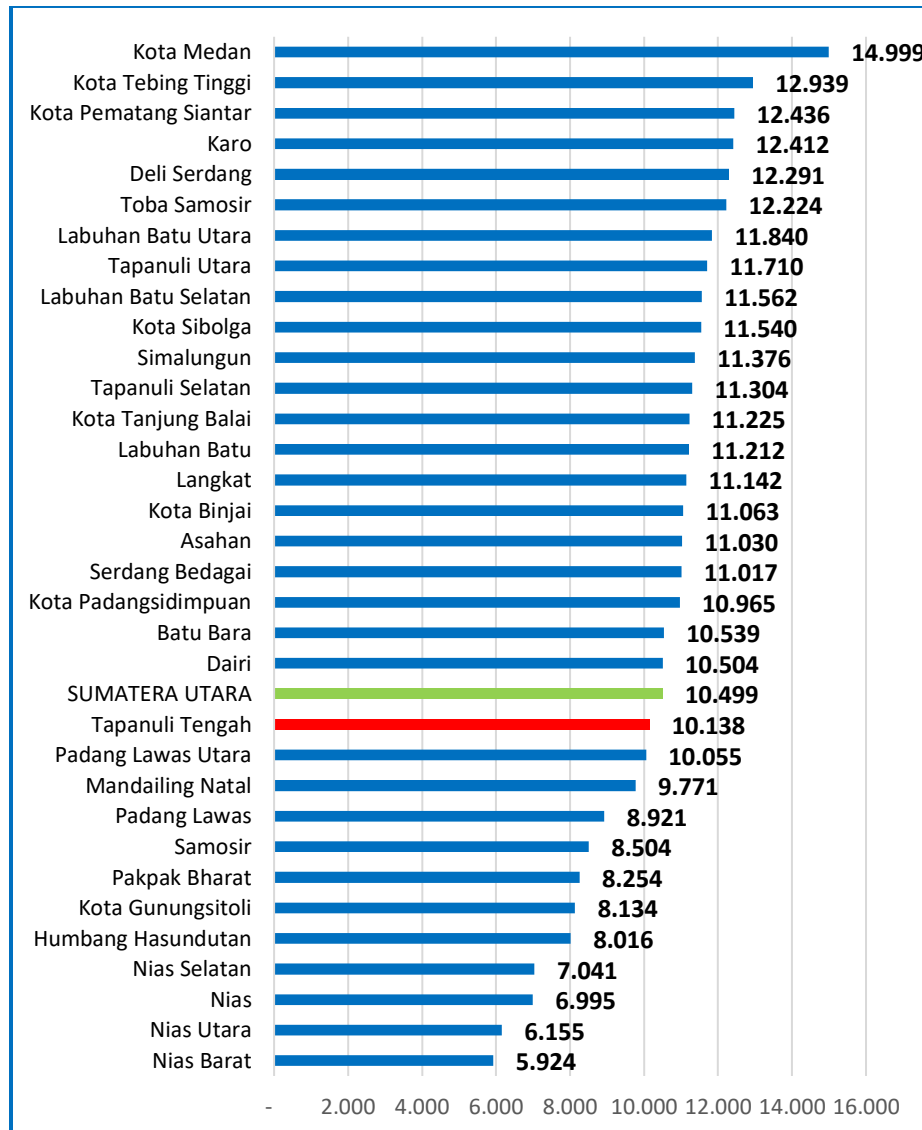
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021

Dari sisi pengeluaran per kapita yang merupakan proxy dari pendapatan masyarakat, maka terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Tapanuli Tengah masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dan angka Nasional. Capaian pengeluaran per kapita Tapanuli Tengah sebesar Rp. 10.138 ribu per kapita per tahun berada tepat di bawah angka Provinsi Sumatera Utara (Rp. 10.499 ribu/kapita/tahun) dan angka Nasional (Rp.11.156 ribu/kapita/tahun).

Gambar IV.5
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Per Kapita/Tahun)
Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021

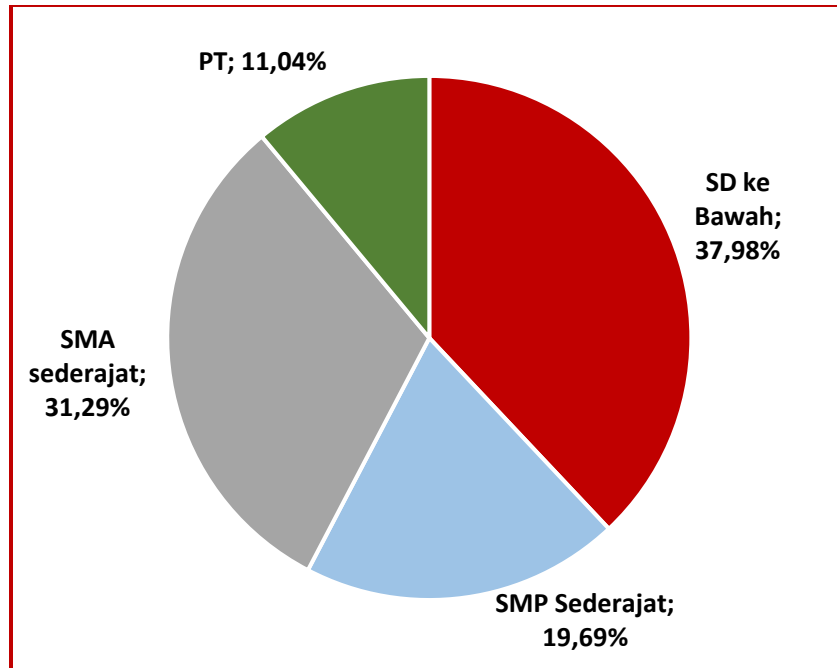
Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah masih minimnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Tapanuli Tengah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pendidikan tenaga kerja Tapanuli Tengah di mana pada tahun 2021 sebanyak 37,98 persen tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya memiliki pendidikan SD/MI sederajat bahkan di bawahnya. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi hanya sebanyak 11,04 persen, yaitu tenaga kerja berpendidikan perguruan tinggi dan 31,29 persen tenaga kerja berpendidikan SMA sederajat.

Gambar IV.6



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%) Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur guna akselerasi perekonomian berkelanjutan

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya, mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dengan kondisi yang belum ada kepastian. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2020, dimana Pandemi COVID-19 menyebar hingga seluruh wilayah Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen. Pada tahun 2021, upaya pemulihan ekonomi Tapanuli Tengah membuahkan hasil di mana pertumbuhan ekonomi berada pada capaian positif kembali di angka 2,56 persen. Jika dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara, maka



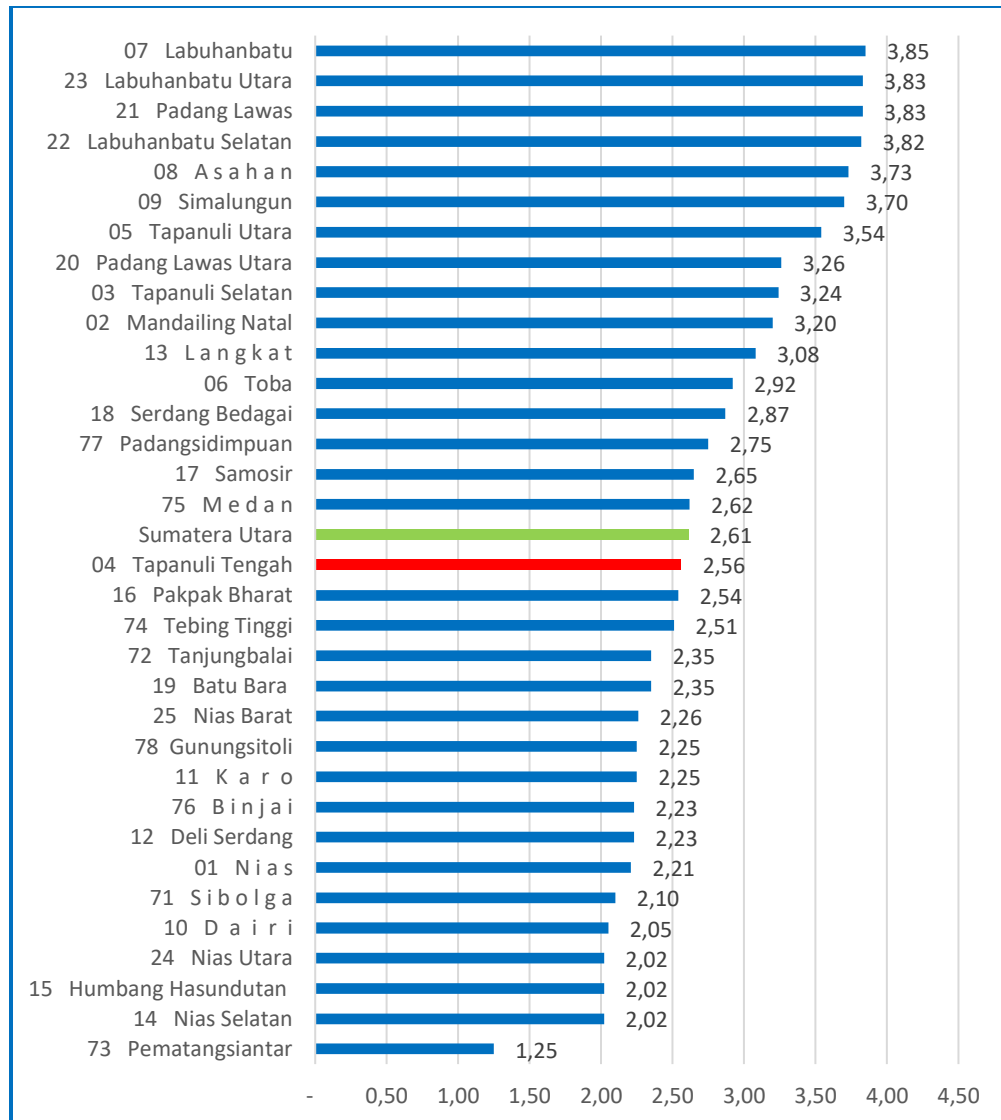
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

kondisi ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada posisi moderat dengan capaian berada tepat di bawah angka Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 2,61 persen. Penjabaran lebih jelas mengenai Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut ini,

Gambar IV.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Kontribusi perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah masih di tingkatan bawah dimana hanya memiliki peran sebesar 1,22 persen pada perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Angka ini menjadi peringkat 18 dari kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Dalam pencapaian perekonomian daerah tersebut, pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Pada tahun 2021, 54,14 persen kondisi jalan kabupaten baik dan 17,29 persen rusak berat. Sementara panjang jalan aspal tahun 2021 mencapai 521,05 km pada jenis jalan kabupaten. Akan tetapi, panjang jalan dengan kondisi tanah masih terhitung tinggi yaitu sebesar 139,00 km dan dengan kondisi masih kerikil adalah sepanjang 62,52 km.

Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Tapanuli Tengah maupun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Hal ini terlihat dimana capaian kedua indikator tersebut berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dengan capaian Tapanuli Tengah sebesar 50,85 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan 80,70 persen rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak.

Tabel IV.3
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Sumber Air Minum Layak (%)
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Wilayah	Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Sumatera Utara	81,08	89,68
Nias	17,84	49,46
Mandailing Natal	33,81	67,95
Tapanuli Selatan	38,64	68,09
Tapanuli Tengah	50,85	80,70
Tapanuli Utara	83,62	89,27
Toba Samosir	89,61	92,73
Labuhan Batu	79,06	90,37
Asahan	90,67	96,61



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Wilayah	Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Simalungun	90,96	99,10
Dairi	88,61	87,75
Karo	85,99	91,50
Deli Serdang	95,70	95,79
Langkat	87,60	92,52
Nias Selatan	11,48	62,80
Humbang Hasundutan	90,27	93,71
Pakpak Bharat	91,83	57,30
Samosir	88,52	65,67
Serdang Bedagai	91,15	99,23
Batu Bara	84,14	97,56
Padang Lawas Utara	60,26	63,79
Padang Lawas	52,46	66,63
Labuhanbatu Selatan	83,27	83,49
Labuanbatu Utara	77,41	87,64
Nias Utara	42,67	62,40
Nias Barat	33,84	55,55
Sibolga	33,23	97,06
Tanjungbalai	86,32	83,20
Pematangsiantar	88,98	99,71
Tebing Tinggi	92,09	97,38
Medan	93,16	98,79
Binjai	96,20	99,08
Padangsidempuan	42,60	43,29
Gunungsitoli	35,77	79,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Tapanuli Tengah “Belum optimalnya kemandirian dan pemerataan pembangunan masyarakat Tapanuli Tengah” akan dirincikan



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

menjadi lima permasalahan pokok dengan penjabaran permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4
Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya Penyelenggaraan sistem kerja yang belum tertib, rapi dan efisien
		Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal
		Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik		Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah
		Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada tingkatan rumah sakit, puskesmas sampai ke posyandu.
		Ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan masih terus perlu ditingkatkan
Belum optimalnya pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Masih adanya kasus stunting di beberapa wilayah kabupaten Tapanuli Tengah
		Kurang meratanya penempatan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sampai ke tingkat desa
		Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata
Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan		Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi masih kurang dan



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		penyebarannya masih belum merata di semua wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti Perpustakaan dan laboratorium masih belum mencukupi
		Implementasi pendidikan anak usia dini belum optimal
Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja daerah	Ketersediaan Lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha masih kurang
		Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
	Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Belum seluruh PPKS dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial
		Cukup tingginya ketimpangan kesejahteraan masyarakat
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur guna akselerasi perekonomian berkelanjutan	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan bagi UKM, IKM dan Koperasi
		Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM, IKM dan koperasi belum optimal
		Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan komoditas dan produk unggulan belum optimal
		Sarana dan prasarana pendukung pengembangan komoditas dan produk unggulan masih perlu ditingkatkan
		Masih rendahnya pengembangan inovasi dalam pengelolaan produk unggulan
		Pengembangan sistem informasi dan promosi potensi komoditas dan produk unggulan belum optimal
		Regulasi dan kebijakan untuk kemudahan berinvestasi belum efektif
		Sektor pariwisata dan industri kreatif belum diberdayakan secara optimal
	Minimnya dukungan pengembangan ekonomi kreatif	
		Belum optimalnya



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan	dan jembatan belum optimal mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
		Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi masih belum mencukupi
		Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman
	Adanya aktivitas pembangunan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
		Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Topografi yang ekstrim. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukiman. Hal ini tentu saja berdampak



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Tapanuli Tengah juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen pada tahun 2020.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 58.647 ha (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) kawasan hutan lindung, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa langka yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah seperti harimau sumatera, orang utan tapanuli, tapir dan trenggiling.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

d) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pertama, transformasi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk mempermudah investasi akan berdampak pada



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

***Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia.** Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (Human Capital Index, World Bank, 2020), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.*

2) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah Sumatera pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Sumatera Utara yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya. Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri, proyek prioritas nasional yang dilaksanakan seperti Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung untuk Koridor V (Tebing Tinggi – Sibolga) yang tertuang dalam Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan *Food Estate* di Sumatera Utara dimana salah satu dari 4 (empat) kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskanlah beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kabupaten Tapanuli Tengah. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

4.2.3. Isu Strategis Regional

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke-Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi Pertama

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua,

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga,

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- Misi Keempat,

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima,

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada Perubahan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- 1) Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender;
- 2) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- 4) Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi;
- 5) Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih;
- 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban; dan
- 7) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup ta berkelanjutan.

Adapun **Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah Sekitar

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SEKITAR**

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026

RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah sudah memasuki periode terakhir dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Tapanuli Tengah berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 yaitu:

" Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera Demokratis dan Berkeadilan."

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu 2006 - 2026, telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terwujud pada kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparat serta mengurangi praktek-praktek KKN pada semua level jajaran dalam birokrasi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi; serta melakukan pembenahan dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil sehingga dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan kepastian investasi.

2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat

Pembangunan yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, melalui peningkatan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang; meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan akses yang sama terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi gender, etnis, dan agama dengan dilandasi penghormatan pada hak-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

hak asasi manusia (HAM); meningkatkan kesadaran dan kualitas beragama dan toleransi antar umat beragama, serta kesadaran akan pluralisme.

3. Memberdayakan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; optimalisasi pemanfaatan sumber daya darat dan atau laut melalui pengembangan pembangunan berbasis kawasan guna mendorong pertumbuhan dan memperkuat perekonomian wilayah serta berorientasi dan berdaya saing pada tingkat internasional; menerapkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang efisien, efektif, berlandaskan hukum, berwawasan lingkungan, berkeadilan, transparan, dan demokrasi.

4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan sosial yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan memperkuat peran serta semua lapisan masyarakat dalam pembangunan melalui pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol tanpa diskriminasi sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* berjalan, menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*); menciptakan wadah terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan sehingga tercapai kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan, menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan penghormatan terhadap nilai pluralisme dan HAM; meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

5. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan daya saing melalui strategi pengembangan ekonomi terintegrasi berbasis kawasan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan atau laut dan daya dukung wilayah; mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada keunggulan sumber daya daerah dan daya dukung lingkungan; mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh melalui pembangunan perekonomian yang merata dan berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Pelaksanaan visi dan misi diatas diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat dan harmonis di bawah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pelaksanaan dan pencapaian RPJMD ke-4 yang merupakan lanjutan dari Pencapaian sebelumnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up*.

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan dalam merancang rumusan kebijakan pembangunan daerah adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033. Perencanaan yang merupakan perencanaan berbasis spasial ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas keseluruhan sebesar $\pm 2.19,98$ Km² (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima kilometer persegi). Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk mewujudkan ruang kabupaten sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di Kawasan Barat Sumatera Utara.

Pada perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

1. Pengembangan prasarana wilayah kabupaten. Adapun Strateginya meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. Meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan Peruntukan industri;
 - e. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah. Adapun Strateginya meliputi:
 - a. Membagi wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

- b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKLp;
 - c. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL.
 - d. Membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk kluster;
 - e. Mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. Mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan; dan
 - g. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
3. Pengembangan dan pembangunan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa. Adapun Strateginya meliputi :
- a. Meningkatkan potensi kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang utama di Kabupaten;
 - b. Meningkatkan pengembangan sarana transportasi udara, laut, dan darat; dan
 - c. Menyediakan lahan bagi pengembangan kawasan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perikanan. Adapun Strateginya meliputi:
- a. Mengembangkan lokasi pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang lengkap;
 - b. Mengembangkan perekonomian kelautan dan perikanan dengan pendekatan minapolitan; dan
 - c. Meningkatkan hasil perikanan dengan memperluas teknologi penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Pengembangan kawasan-kawasan industri yang mendukung kegiatan perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Adapun Strateginya meliputi:
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan pada kawasan industri;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

- b. Mengembangkan dan membangun pusat industri dan simpul transportasi pemasaran hasil produksi sebagai kawasan strategis ekonomi;
 - d. Meningkatkan produksi hasil perkebunan dan pertanian melalui pendekatan agropolitan;
 - e. Melakukan revitalisasi dan pembangunan prasarana pertanian dan perkebunan secara memadai; dan
 - f. Melakukan survei pertambangan dan memanfaatkannya secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Pengembangan sektor pariwisata. Adapun Strateginya meliputi:
- a. Memperluas kawasan-kawasan wisata dengan memanfaatkan potensi alam dan laut;
 - b. Membangun sarana dan prasarana di kawasan pariwisata; dan
 - c. Menciptakan jaringan antar kawasan wisata.
7. Pengembangan sistem pencegahan dan penanganan bencana yang terintegrasi. Adapun Strateginya meliputi:
- a. Menetapkan kawasan-kawasan lindung;
 - b. Menetapkan jalur-jalur evakuasi bencana.
8. Pengembangan sumber daya manusia dengan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Strateginya meliputi:
- a. Pengembangan pendidikan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal.
 - b. Pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah kawasan-kawasan miskin dan terpencil.

e. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2039

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Selatan (RPIK) Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatra Utara 2018-2038 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Adapun di dalam RIPIN,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki satu wilayah yang diajukan sebagai Wilayah Pertumbuhan Industri (WPI) yaitu Labuan Angin, selain itu Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengajukan Labuan Angin yang berada di Kecamatan Tapian Nauli menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sebagai perwujudan dari pembangunan industri, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2039 menetapkan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah yakni “Mewujudkan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Tapanuli Tengah”. Adapun dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi pembangunan industri Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri pertanian, perikanan dan pariwisata yang mengutamakan inovasi dan teknologi.
2. Meningkatkan daya saing industri yang mandiri dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan Industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan industri serta perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan peran pasar dalam pergerakan ekonomi masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi pembangunan industri Tapanuli Tengah dalam RPIK Tahun 2019 - 2039 yang ditetapkan di atas, berikutnya juga dengan mempertimbangkan pada telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka tujuan pembangunan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam RPIK ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri berbahan baku lokal dan regional sehingga meningkatkan peran sektor industri dalam PDRB Tapanuli Tengah.
2. Mengembangkan industri berteknologi tinggi berbasis migas dan sumber daya kelautan yang berorientasi ekspor.
3. Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui dukungan pembangunan lembaga pendidikan tinggi berbasis migas dan kelautan sehingga membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil dan kompeten, utamanya berasal dari masyarakatan daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

4. Membangkitkan industri skala besar melalui pengembangan industri menengah yang sudah ada dan memperkuat sinergitas antara industri kecil, menengah, dan besar.
5. Menjaga terus iklim industri yang selalu kondusif dan meningkatkannya, untuk memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi dan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2023-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

b. Percepatan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis IT

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari sisi pendidikan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis. Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan layanan menggunakan teknologi maupun secara manual pada kondisi tertentu.

c. Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius di mana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19. Secara umum beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

d. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

e. Perwujudan SDG's

Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor pertanian menjadi awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi “pekerjaan rumah” yang cukup menantang bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

f. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan sumber daya dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan kota padangsidempuan adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki faktor produksi yang besar. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan hidup sumber daya alam dan lingkungan hidup, merupakan modal pembangunan sekaligus penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

g. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi dan pelayanan dasar di kabupaten Tapanuli Tengah sehingga diharapkan dapat menjadi pendukung penggerak pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa yang akan datang melalui urutan pilihan atau prioritas dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam waktu tertentu. Berdasarkan pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka sebagai salah satu kabupaten dengan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2026, serta menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023–2026 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya hingga tahun 2026. Dalam menentukan tujuan dan sasaran daerah, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 didasarkan kepada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 202. Sementara itu, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan didasarkan kepada tahap keempat RPJPD dan isu yang aktual.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama dengan para pemangku kepentingan dan berbagai pihak berkomitmen dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini ditunjukkan dalam tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

berkelanjutan. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki visi yaitu : ***“Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”***. Visi ini memberikan ruang yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan guna memberikan manfaat melalui pelaksanaan pembangunan. Dalam mewujudkan visi RPJPD di atas, ditentukanlah misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Misi dalam mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan sosial yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan; dan
5. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatannya.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke - 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up*.

Sesuai dengan tahapan keempat RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 diharapkan fokus untuk dapat mencapai arahan tahap keempat RPJPD, yaitu terwujudnya pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya pelayanan prima, sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dengan tetap memiliki nilai – nilai luhur budaya lokal, sumber daya manusia yang berdaya saing, semakin meningkat dan merata akses pendidikan, semakin efisien dan efektif manajemen pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang kesejahteraan perlindungan anak, terbangunnya industri berbasis hasil pertanian lokal, menjadi sentra industri dan perdagangan di Kawasan Barat Sumut, jangkauan lembaga jaminan sosial yang menyeluruh dan meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pada visi serta pembangunan tahap keempat RPJPD, maka di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditentukan berdasarkan pada visi yang telah ditentukan dan memperhatikan permasalahan dan isu–isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai oleh Kabupaten Tapanuli Tengah dari masing–masing tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator serta target yang akan dicapai. Rumusan tujuan dan sasaran



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2005 – 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran V.I.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Untuk menjaga keselarasan pembangunan antara Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, perlu upaya sinkronasi indikator makro yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Berikut ini adalah perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. ,



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel V.1.
Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

No	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPD Kab. Tapanuli Tengah						
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	71,12	71,67	71,50-72,00	72,00-72,50	72,50-73,00	IPM	70,36	70,74	71,11	71,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	8,87	8,63	9,00-8,00	8,90-7,90	8,80-7,80	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00	11,67	11,33	11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,45	6,00-5,75	5,75-5,50	5,50-5,25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,7444	6,496	6,248	6,000
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,325	0,32	0,313	0,311	0,309	Indeks Gini	0,318	0,312	0,306	0,300
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	5,4	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3	3,25	3,5	4
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	55	59	68,50-68,75	68,75-69,00	69,00-69,25	PDRB per Kapita (Juta Rp)	26,74	26,83	26,91	27,00



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

Tabel V.2.
Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	70,50 (BB)
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	69,61	71,49
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	12,67	11,00
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,76	4,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing–masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
- b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,76. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

**Tabel V.3.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	60,00 (B)	60,50 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	na	71,00 (BB)	72,00 (BB)	73,50 (BB)	75,00 (BB)
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	na	3,25	3,30	3,35	3,40
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	na	70,00	70,50	71,00	71,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	-	na	65,00	66,00	68,00	70,00
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah		Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36	70,74	71,11	71,49
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,727	0,730	0,731	0,732	0,734
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,658	0,673	0,681	0,688	0,696
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah		Tingkat Kemiskinan	%	12,67	12,00	11,67	11,33	11,00
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710	0,712	0,714	0,716
		PDRB per Kapita	Juta Rp	26,48	26,74	26,83	26,91	27,00
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,744	6,496	6,248	6



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target			
					2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,335	0,318	0,312	0,306	0,300
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,76	3	3,25	3,5	4
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,02	2,75	3,00	3,25	3,50
		LPE kategori industri pengolahan	%	-2,78	2,60	2,90	3,20	3,50
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	LPE Sektor Pariwisata	%	na	3,00	3,15	3,30	3,45
		LPE Subsektor Ekonomi Kreatif	%	na	2,75	2,90	3,05	3,20
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	na	71,00	71,50	72,00	72,50
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00	68,49	68,98	69,47
		Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10	180,40	177,70	175,00



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator .

Tabel V.4.
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional																																								
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">} 80%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPAIAN KINERJA</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %	Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %	} 80%					CAPAIAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL		5%	5%	10%	20%
	Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																					
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %																																						
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %																																						
Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %																																						
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %																																						
} 80%																																										
CAPAIAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																						
	5%	5%	10%	20%																																						
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	<p>Melalui survey pihak eksternal</p> <p>DIMENSI IPK</p> <p>Prevalensi, Preferensi, Severity, Akuntabilitas, Efektivitas</p> <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=U}^{T_k} \frac{X_k}{n}$																																								



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) 4. Penyerapan anggaran (20) 5. Kondisi keuangan daerah (15)Opini BPK atas LKPD (15)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">Penghitungan Indeks</div> </div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$ </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; margin-top: 10px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; text-align: center;">Menentukan nilai INDIKATOR</div> <div style="margin: 5px 0;">↓</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; text-align: center;">Menentukan nilai ASPEK</div> <div style="margin: 5px 0;">↓</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; text-align: center;">Menentukan nilai INDEKS</div> </div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ </div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>3. Menentukan indeks</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai indeks: $\sum(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ </div> <p>Pembobotan Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Profesionalisme SDM (18%) 3. Sarana Prasarana (15%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%) 6. Inovasi (7%)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$ <p>Ket.AHH = Angka Harapan Hidup</p>
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$ $I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$
	PDRB per Kapita	$\frac{\text{PDRB adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ <p>BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota</p>
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
		$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>
	LPE kategori industri pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan</p>
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	LPE Sektor Pariwisata	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Sektor-sektor terkait pariwisata</p>
	LPE Subsektor Ekonomi Kreatif	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan</p>



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
		t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori yang masuk industri kreatif
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	$0,4122 \times jalan + 0,4149 \times air + 0,4620 \times sanitasi + 0,4368 \times pkpl + 0,5037 \times i_kom_inv$ Keterangan: Jalan= Kondisi jalan mantap Air = Keluarga dengan akses terhadap air minum layak Sanitasi= Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak Pkpl= KEluarga pengguna listrik PLN dan Non PLN I_kom_inv= Wilayah yang memiliki telekomunikasi baik (sinyal telepon dan internet)
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Indeks Risiko Bencana	<p>The diagram illustrates the operational definition of the Disaster Risk Index (R). It starts with three input boxes: 'Indeks Bahaya (H)' (yellow), 'Indeks Kerentanan (V)' (blue), and 'Indeks Kapasitas (C)' (green). Arrows from these three boxes converge into a central grey box containing the formula $R = (H * V * (1 - C))^{1/3}$. An arrow from this formula box points down to an orange box labeled 'Indeks Risiko'.</p>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran setiap perangkat daerah yang ada, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Keterkaitan IKU Daerah dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5.

Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai LPPD	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Sekretariat Daerah
				Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	Sekretariat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	BPSDM
			Indeks Sistem Merit	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	BKD
			Indeks Perencanaan Pembangunan	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Bappeda
				Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Bappeda



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
			Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi daerah yang diterapkan/ditetapkan	Bappeda
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP	Inspektorat
				Indeks Manajemen Resiko	Inspektorat
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal	Tingkat Pertumbuhan PAD	BPKPAD
	Opini BPK			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	BPKPAD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	DISKOMINFO
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
			Persentase penegakan Perda	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP
				Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	Bakesbangpol
				Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Bakesbangpol
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas	Persentase penduduk wajib KTP yang	Dinas Dukcapil



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
			Kependudukan dan Pencatatan Sipil	memiliki KTP elektronik	
				Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Dinas Dukcapil
			Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Setwan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kecamatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Usaha	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	DPMPPTSP
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan
			Tingkat Akreditasi RSUD	Nett Death Rate	RSUD PANDAN
				Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD	RSUD PANDAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	RSUD PANDAN
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dinas Pendidikan



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidikan
			Persentase pelestarian warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DPPPA
			Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Skor Kabupaten Layak Anak	DPPPA
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Pertumbuhan wirausaha muda	Dispora
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dispora
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Dispora		
Meningkatkan kesejahteraan		Indeks Pengeluaran	Persentase penurunan jumlah PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Dinas Sosial



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
masyarakat Tapanuli Tengah Indikator: Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Indeks Desa Membangun	Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri	Dinas PMD
Laju Pertumbuhan Penduduk				ASFR 15-19 tahun (Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 tahun)	DPPKB
Total Fertility Rate				DPPKB	
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Kontribusi kategori Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura terhadap PDRB	Produktivitas pertanian komoditas unggulan per hektar per tahun	Dinas Pertanian
			Skor Pola Pangan Harapan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	Produktivitas perkebunan komoditas unggulan per hektar per tahun	Dinas Pertanian



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
			Kontribusi kategori Perikanan terhadap PDRB	Volume produksi perikanan	DKP
		LPE kategori industri pengolahan	Persentase UMKM yang naik skala usaha	Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi UMKM
				Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Dinas Koperasi UMKM
			Persentase peningkatan investasi daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	DPMPTSP
			Ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	Disperindag
			Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	Disperindag
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	LPE Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata
				Rata-rata lama kunjungan	Dinas Pariwisata
		LPE Subsektor Ekonomi Kreatif	LPE Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur		Indeks angkutan jalan	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi darat
Indeks Konektivitas Wilayah				Rasio kemantapan jalan kabupaten	DPUPR
				Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	DPUPR
				Persentase drainase dalam kondisi baik	DPUPR



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

Tujuan/Sasaran		Indikator	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
			Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Rasio kepatuhan IMB	DPUPR
			Persentase luasan kawasan kumuh	Rasio rumah layak huni	Dinas Perkim
	Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	Dinas Perkim			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH - - -	IKU	Dinas LH
				IKA	Dinas LH
				IKTL	Dinas LH
				Persentase penanganan sampah	Dinas LH
	Indeks Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	BPBD	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	BPBD	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

LAMPIRAN V.1

**Keterkaitan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan						
RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparat serta mengurangi praktek-praktek korupsi pada semua level jajaran dalam birokrasi	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai "public servant" pada semua tingkatan dan lini pemerintahan	Terwujudnya pemerintah daerah yang Bersih dan bebas KKN	Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		2. Penegakan disiplin serta penegakan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan praktek KKN di lingkungan birokrasi				
		3. Menciptakan sistem kerja yang tertib, rapih dan efisien untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas aparat pemerintah				



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

VSJ RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
	Penegakan supremasi hukum tanpa ada diskriminasi terhadap suatu golongan, kelompok ataupun etnis tertentu serta memulihkan kepercayaan semua lapisan masyarakat terhadap penegakan hukum	4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang	Terwujudnya pelayanan prima			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
		5. Meningkatkan kemampuan penanggulangan ketertiban dan penanggulangan bencana				
		6. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan berbagai aktivitas sehari-hari termasuk keamanan dalam berinvestasi dan bekerja				
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih	7. Peningkatan Rasa Nasionalisme				
		8. Peningkatan peran serta semua lapisan masyarakat				
		9. Peningkatan Kelembagaan Demokrasi yang Kuat				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan						
RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
	baik, meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dan menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata baik di perkotaan dan perdesaan	10. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan nilai-nilai budaya luhur				
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, terkendalinya pertumbuhan penduduk	1. Peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Percepatan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis IT Penanganan dan pemulihan Pandemi COVID-19	Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Pengembangan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja	Semakin meningkat dan merata akses pendidikan			Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
		3. Peningkatan pendidikan yang berkualitas	Semakin efisien dan efektif manajemen pendidikan			



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dan membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama	4. Pembinaan kualitas kehidupan beragama	Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal			
	Meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	5. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Sumber daya manusia yang berdaya saing			
		6. Pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang Kesejahteraan dan perlindungan anak			



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
3. Memberdayakan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat	Membaiknya infrastruktur yang tersedia, dengan ditandai oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan	1. Peningkatan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
		2. Peningkatan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut				
		3. Peningkatan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman				
		4. Peningkatan dan percepatan pembangunan sumber daya air dan irigasi				
		5. Peningkatan dan percepatan pembangunan sumber daya energi yang dapat diperbaharui				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
		6. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup		Perwujudan SDG's		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
		7. Pemetaan dan pemantauan wilayah rawan bencana				
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan sosial yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	1. Penyusunan kajian potensi sumber daya alam				
		2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup				
		3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan aparatur daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam				
		4. Mendorong kemitraan dengan lembaga masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan						
RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
5. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan terutama pada daerah-daerah tertinggal dan terisolir dalam rangka mendorong peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Revitalisasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan		Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah		Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah
		2. Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, dengan kebijakan				
		3. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi serta Pembangunan Usaha Daerah				
		4. Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Tertinggal				
		5. Pembangunan Kepariwisata dengan kebijakan				
		6. Pembangunan Ketenagakerjaan dengan kebijakan	Meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat			Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

VSI RPJPD: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

RPJPD				ISU STRATEGIS AKTUAL	RPD	
Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	RPJMD KE IV		Tujuan	Sasaran
						Meningkatnya pendapatan masyarakat
		7. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial dengan kebijakan	Jangkauan lembaga jaminan sosial yang menyeluruh			Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dapat diartikan merumuskan langkah yang diambil oleh Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mencapai tujuan dasar yang telah dirumuskan dalam dokumen RPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026. Perencanaan strategis tidak saja menggambarkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung strategi dan arah kebijakan sehingga dapat mengukur kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi yang ada dilapangan.

6.1. STRATEGI

Dalam dokumen RPD, penentuan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan dokumen RPJPD dan isu strategis. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai. Strategi adalah serangkaian langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada tabel VI.I berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel VI.1.
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

Tujuan/Sasaran		Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah		
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal		
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan perdesaan
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tujuan/Sasaran	Strategi
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana

Penjabaran dari strategi RPD Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain:

1. Strategi 1, Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai tahap pemerintahan yang baik. Bentuk reformasi birokrasi ini berupa birokrasi yang cepat, melayani, responsive terhadap perubahan dan perkembangan jaman. Selain itu, keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan urusan daerah yang diyakini mampu mendorong partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan akan berjalan lebih baik dan efisien. Keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari tercapainya pemerintah daerah Tapanuli Tengah yang bersih, akuntabel dan kapabel. Untuk mencapai predikat tersebut diperlukan sinergitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana birokrasi melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai "*publik servant*" pada semua tingkatan dan lini pemerintahan. Selain itu, Menciptakan sistem kerja yang tertib, rapih dan efisien untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas aparat pemerintah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tata kelola pemerintah yang baik juga terwujud pada pelayanan publik sebagai salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Di era teknologi dan pandemi ini, pelayanan publik berbasis teknologi dan mudah diakses melalui rumah merupakan salah satu pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah Tapanuli Tengah berupaya untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. **Strategi 2**, Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua urusan yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana negara maju dapat dikenali dari mutu kesehatan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Fokus peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari akses, sarana dan prasarana serta kualitas guru. Terlebih di era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh masih berlaku sehingga aktivitas belajar mengajar menggunakan teknologi informasi sangat diperlukan. Peningkatan pendidikan yang berkualitas diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal serta masyarakat penyandang cacat termasuk penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pendidikan khusus.

Isu kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga sekarang. Penanganan Covid-19 masih dilakukan, namun tidak mengesampingkan isu kesehatan lainnya seperti stunting dan kesehatan ibu hamil. Peningkatan kualitas kesehatan diarahkan untuk



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

meningkatkan jumlah, jaringan, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat sejak usia dini serta pengembangan manajemen kesehatan.

3. **Strategi 3**, Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Sebagian besar penduduk di Tapanuli Tengah bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang juga merupakan komoditi utama perekonomian di Tapanuli Tengah. Di era pandemi ini, seluruh sektor pembentuk PDRB terdampak. Namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung stabil sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan di Tapanuli Tengah tidak turun drastis. Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran diperlukan stimulus bagi masyarakat, terutama masyarakat kelompok usia produktif. Salah satu stimulus yang diberikan adalah pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Pengembangan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja juga diupayakan melalui kebijakan untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang Pertanian dan kelautan. Upaya ini, berkaitan dengan teknologi pengolahan tanaman pangan dan hasil perikanan yang merupakan sektor-sektor dominan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kesinambungan antara pelatihan dan tenaga kerja dapat dikembangkan secara sinergis.

4. **Strategi 4**, Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan perdesaan

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena hakikatnya pembangunan desa adalah titik pusat dari segala upaya pembangunan. Sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dilaksanakan secara bersama-sama di dalam musyawarah, mufakat, gotong-royong merupakan cara



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di Indonesia. Pembangunan di desa dilakukan secara mandiri dikarenakan adanya dana desa yang bersumber pada APBN yang diperuntukan bagi desa. Pembangunan desa yang efektif dapat dilakukan dengan memetakan potensi dari setiap desa di Tapanuli Tengah, seperti potensi wisata dan potensi hasil pertanian. Setelah memetakan potensi sumber daya wilayah, pembangunan perdesaan diarahkan kepada pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur jalan dan kelistrikan di pedesaan, perluasan akses terhadap sumber daya produksi dan pasar, dan pengembangan sistem agribisnis berbasis pengembangan wilayah. Di era pandemi Covid-19 ini, upaya pembangunan desa dilakukan dengan melakukan digitalisasi desa untuk membantu memasarkan berbagai potensi dan produk yang dihasilkan oleh desa. Dengan digitalisasi, proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif dan menguntungkan.

5. **Strategi 5**, Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah

Potensi perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di masa pandemi Covid-19 ini, pemanfaatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara optimal menjadi produk yang memiliki nilai tambah diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri. Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pendekatan ini dapat ditingkatkan bagi pendapatan pelaku agribisnis dan agroindustri. Proses pengembangan agribisnis dan agroindustri di era teknologi ini sangat baik, dikarenakan sistem pemasaran, penyediaan sarana pengangkutan, penyebaran produk kelembagaan agribisnis dan agroindustri lebih mudah.

Sektor potensi lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sektor pariwisata. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panorama keindahan alam yang sangat kaya. Pesona alam Kabupaten Tapanuli Tengah berupa pantai, laut, bawah laut dan danau sangat potensial untuk menjadi pusat kunjungan wisata untuk Kawasan Barat Sumatera Utara. Hal ini menuntut adanya peningkatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pembangunan infrastruktur untuk mengakses daerah objek wisata, serta selanjutnya peningkatan pemasaran wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produk-produk wisata dan apresiasi serta peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam meningkatkan efektifitas promosi, investasi kepariwisataan dan sinergisitas dalam jasa pelayanan pariwisata.

6. **Strategi 6**, Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah

Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi agar menjadi lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Pembangunan infrastuktur bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah, karena jika kesenjangan antarwilayah dapat teratasi maka daya saing antarwilayah akan meningkat. Pembangunan infrastruktur terdiri dari fasilitas fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan dan saling mendukung. Pembangunan fasilitas fisik berupa infrastruktur perhubungan/transportasi, sedangkan infrastruktur non fisik seperti infrastruktur teknologi dan infomasi.

Penyediaan dan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata, kawasan terisolir, dan kawasan ekonomi strategis. Sedangkan infrastruktur teknologi dan informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju di mana komunikasi dapat terjalin melalui internet. Infrastruktur teknologi dan informasi di era pandemi ini merupakan suatu kebutuhan dikarenakan proses pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi telah mempengaruhi proses belajar, proses ekonomi masyarakat dan proses pelayanan publik dilakukan secara online.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

7. **Strategi 7**, Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjalin keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang di dalamnya terdapat pemanfaatan, penataan, pengawasan, pemulihan pengendalian, pemeliharaan juga pengembangan lingkungan hidup itu sendiri. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga pemerintahan yang handal dan penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengacu pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan kebencanaan dikarenakan upaya menjaga kelestarian lingkungan juga dapat meminimalisir kejadian bencana. Pemetaan dan pemantauan wilayah rawan bencana, diarahkan pemantauan wilayah rawan bencana yang diakibatkan kondisi topografi dan geografis di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah serta hutan maupun lahan perkebunan, seperti bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan banjir.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

6.2.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar VI.1.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026



Penjabaran tema/agenda pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 sesuai gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Tema Pembangunan Tahun 2023: Percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui sinergitas pembangunan

Tema pembangunan di Tapanuli Tengah tahun 2023 adalah Percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui sinergitas pembangunan. Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi seluruh belahan dunia berdampak pada semua sektor, baik sosial, politik maupun ekonomi. Di tahun 2023, diharapkan keadaan sudah kembali normal sehingga hal yang dilakukan adalah memulihkan kembali perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor pertanian dan pariwisata memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberikan stimulus bagi masyarakat yang kurang mampu dengan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

memberikan pelatihan kewirausahaan dan suntikan modal bagi masyarakat golongan kurang mampu untuk berwirausaha.

2. Tema Pembangunan Tahun 2024: Pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM

Fokus tema pembangunan di tahun 2024 adalah infrastruktur dan SDM, sehingga kalimat tema 2024 adalah Pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM. Pemerataan infrastruktur hingga ke desa tertinggal diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menunjang perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas SDM. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui penyediaan akses dan infrastruktur terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi gender, etnis, dan agama dengan dilandasi penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM); meningkatkan kesadaran dan kualitas beragama dan toleransi antar umat beragama, serta kesadaran akan pluralisme.

3. Tema Pembangunan Tahun 2025: Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan

Perekonomian merupakan fokus pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah bergantung pada komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dalam pemanfaatannya memerhatikan aspek lingkungan. Tema pembangunan di tahun 2025 adalah Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan ekonomi mandiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

masyarakat, pemerataan ekonomi, dan daya saing daerah. Perekonomian mandiri bermakna bahwa kegiatan ekonomi berdasarkan swadaya yaitu masyarakat secara gotong-royong mengatur mekanisme sumber penghidupan. Tapanuli Tengah mampu mengelola ekonomi secara mandiri dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada keunggulan sumber daya daerah dan daya dukung lingkungan; pengembangan ekonomi terintegrasi berbasis kawasan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan atau laut dan daya dukung wilayah; serta mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

4. Tema Pembangunan Tahun 2026: Terwujudnya masyarakat yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

Tema di tahun 2026 merupakan implementasi dari ketercapaian visi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Terwujudnya masyarakat yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Makna dari tiga frasa dalam dokumen RPJPD adalah **1. Sejahtera**, Tingkat kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh kesejahteraan masyarakatnya. Indikatornya dapat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat, termasuk derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi yang membaik berupa pendapatan dan daya beli yang tinggi, serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan sosial, baik pendidikan, kesehatan maupun pelayanan administrasi. **2. Demokratis**, Sifat masyarakat Tapanuli Tengah mengutamakan musyawarah termasuk dalam merumuskan tujuan pembangunan. Moto masyarakat Tapanuli Tengah yang tertera dalam lambang daerah yang berbunyi, "**SAHATA SAOLOAN**" menegaskan mengenai pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Proses musyawarah dilakukan dalam suasana yang demokratis, memiliki respek terhadap pihak lain, adanya perasaan satu sikap, satu kata yang tidak didasarkan oleh pemaksaan tetapi melalui kesadaran yang dibangun bersama dalam situasi yang demokratis. **3. Berkeadilan**, Adanya keunikan dan perbedaan dalam suatu masyarakat merupakan keniscayaan yang tidak mungkin



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

dihindari. Namun demikian perbedaan dan keunikan tersebut tidak menjadi penghalang bagi anggota masyarakat untuk merasakan dan menikmati keberhasilan pembangunan. Kebiasaan untuk bermusyawarah yang dilandasi oleh perasaan respek akan mendukung kepada bentuk perlakuan adil bagi segenap anggota masyarakatnya tanpa memandang perbedaan, baik perbedaan gender, agama dan latar belakang sosial ekonomi. Di tahun 2026, diharapkan Tapanuli Tengah dapat mencapai Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan sesuai dengan visi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Guna mendukung pencapaian tema pembangunan Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing tema adalah sebagai berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tabel VI.2.

Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)						
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah serta manajemen pemerintah daerah				
		Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT				
		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah				
		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT						
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah						



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan				
			Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya				
			Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT				
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah							
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan				
			Pembinaan dan Pendampingan bagi UMKM, IKM dan Koperasi melalui sistem kemitraan				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal		Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi				
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan perdesaan	Implementasi Digitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi desa				
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan							
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan				
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif		Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis				
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Penyediaan infrastruktur penunjang destinasi wisata unggulan				
			Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan				



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

6.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW bertujuan untuk mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya, serta RTRW Provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah memuat rincian pembangunan spasial dalam 20 tahun (2013-2033) memuat Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas keseluruhan sebesar $\pm 2.19,98 \text{ Km}^2$ (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima kilometer persegi). Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk mewujudkan ruang kabupaten sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di Kawasan Barat dari Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri memiliki kawasan strategis provinsi. Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan dan menetapkan kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga sebagai kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga merupakan satu kesatuan dari pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh, mencakup Kecamatan Tapan Nauli, Sarudik dan Kota Sibolga. Gambaran tentang rencana kawasan strategis di Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Gambar VI.2.
Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah

Indikasi program yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033 yang akan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tabel VI.3.

Indikasi Program Tahap ke III (2023-2027) RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
I	RENCANA STRUKTUR RUANG			
	Sistem Pusat Permukiman			
A	PKL			
1.1	Pengembangan Fungsi Kota Pandan sebagai: Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Distribusi, Pusat Kolektor Utama, Perdagangan dan Jasa, Pusat Pendidikan, Pusat Kesehatan, Pariwisata, Pengembangan Interaksi dengan hinterlandnya, Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	Pandan	APBD dan Provinsi	Bappeda, PU dan Tarukim Provinsi
1.2	Pengembangan Fungsi Kota Baru sebagai: Sub Pusat Kolektor Utama, Sub Pusat Perdagangan dan Jasa, Sub Pusat Pengolahan hasil-hasil Pertanian, Pelabuhan laut, Pengembangan Industri (UMKM), Pariwisata, Pengembangan Interaksi dengan hinterlandnya, Pengembangan Prasarana Kota, Air Bersih, Listrik, Telepon, Persampahan, Limbah, Drainase, Sub Terminal,	Barus	APBD dan Provinsi	Bappeda, Perairan, Kebersihan PU, Perhubungan dan Tarukim Provinsi
B	PPK			
1.1	Pengembangan Fungsi sebagai: Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pusat Kegiatan Industri	Tapian Nauli	APBD dan Provinsi	Bappeda, PU, Perdagangan dan Tarukim Provinsi



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	Besar,Air Bersih, Listrik, Telepon,Limbah, Drainase.			
1.2	Pengembangan Fungsi: PusatPemerintahan Kecamatan,Pusat Kegiatan Industri Perikanan, Perdagangan, Pengembangan Interaksi dengan interlandnya, PengembanganPrasarana Kota, Air Bersih, Listrik, Telepon, Limbah, Drainase.	Sarudik	APBD dan Provinsi	PU, Perhubungan, Kebersihan dan Tarukim Provinsi
1.3	Pengembangan Fungsi Kota Pinagsori sebagai: Sub Pusat Kolektor Utama, Sub Pusat Perdagangan dan Jasa, Pengembangan Interaksi dengan interlandnya, Pengembangan Prasarana Kota, Air Bersih, Listrik, Telepon, persampahan, Limbah, , Sub Terminal dan Bandar Udara	Pinagsori	APBD dan Provinsi	PU, Perhubungan, Kebersihan dan Tarukim Provinsi
1.4	Pengembangan Fungsi sebagai: Pusat Pemerintahan Kecamatan,Perdagangan, Pusat pengumpulan hasil pertanian,Sub Pusat Pengolahan hasil-hasil PertanianSimpul transportasi, Kawasan strategis ekonomi	Manduamas	APBD	Bappeda, Perdagangan, Pertanian, Perhubungan dan PU
1.5	Pengembangan Fungsi sebagai: Pusat Pemerintahan Kecamatan,Pusat industri, Pusat pengumpulanhasil pertanian, Kawasan strategisekonomi,	Sorkam Barat	APBD	Bappeda, Pertanian, Perdagangan, Kelautan, Pariwisata danPU



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	Pelabuhan laut, Perikanan, Kawasan wisata			
C	PPL			
2	KAWASAN PERKOTAAN			
2.1	Pegembangan fungsi kota-kota dan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya	Kota Pandan Kota Tappian Nauli Kota Barus Kota Pinagsori Kota Manduamas Kota Sorkam Barat Setiap Ibukota Kecamatan	APBD	Bappeda dan PU
2.2	Pengembangan jaringan transportasi		APBD	Bappeda,Perhubungandan PU
2.3	Perbaikan kualitas permukimanperkotaan		APBD	Bappeda,Kebersihan,Bapedal da, Pertamanan dan PU
2.4	Pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa		APBD	Bappeda dan PU
2.5	Pengembangan sekolah-sekolahkejuruan di kota-kota tersier yang disesuaikan dengan potensi pengembangan ekonomi masing- masing wilayah		APBD	Bappeda,Pendidikandan PU
2.6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatanproduksi dan pemasaran oleh koperasi dan usaha kecil menengah lainnya		APBD	Bappeda,Perdangan,Koperas idan PU
2.7	Mendorong terciptanya tata kaitan antara sentral penghasil sumber daya alam dengan pusat pengumpul sumber daya alam		APBD	Bappeda,Pertanian,Perikana n, Perkebunan, Perdagangandan PU
3	KAWASAN PERDESAAN			
3.1	Pengembangan ekonomi lokal perdesaan	Kawasan perdesaan di Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda,Perdagangandan PU
3.2	Peningkatan infrastrukturperdesaan,		APBD	Bappeda,Pertaniandan PU



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	utama jalan usaha tani			
3.3	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam perdesaan		APBD	Bappeda, Bapedalda, Kehutan dan PU
3.4	Pemberdayaan masyarakat perdesaan		APBD	Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat Desadan PU
4	TRANSPORTASI DARAT			
4.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan regional	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBN, APBD dan Provinsi	Bappeda, PU dan Perhubungan
4.2	Pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBN, APBD dan Provinsi	Bappeda, PU dan Perhubungan
4.3	Pembuatan dan pengembangan jaringan dan jembatan baru bagi daerah terisolir	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, PU dan Perhubungan
4.4	Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan pusat sekunder dengan pusat tersier	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, PU dan Perhubungan
4.5	Pengembangan jaringan jalan penghubung antar pusat-pusat permukiman dengan hinterlandnya	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, PU dan Perhubungan
4.6	Pengembangan jaringan jalan lokal yang menghubungkan kota-kota tersier dengan sumber daya alam	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, PU dan Perhubungan
5	TRANSPORASI AIR			
5.1	Pengembangan pelabuhan laut	Tapian Nauli	APBD	Bappeda, Perhubungan, dan PU



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
6	LISTRIK, AIR BERSIH DAN TELEKOMUNKASI			
6.1	Pengembangan jaringan infrastruktur primer dan sekunder dijalar Regional dengan daya dan kapasitas yang dapat mendukung perkembangan permukiman, industri dan jasa	Kabupaten Tapanuli Tengah	BUMN dan swasta	Bappeda, PLN, PDAM dan Telkom
6.2	Pengembangan jaringan pelayanandi pusat tersier		BUMN dan swasta	Bappeda, PLN, PDAM dan Telkom
7	PERSAMPAHAN			
7.1	Penetapan lokasi TPA baru yang dapat melayani seluruh kecamatan	Lokasi disesuaikan pada daerah pelayanan	APBD	Bappeda, Kebersihan
7.2	Pengadaan alat-alat pendukung persampahan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kebersihan, Bapedalda
8	PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERDAGANGAN			
8.1	Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda dan Pendidikan
8.2	Peningkatan mutu pendidikan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda dan Pendidikan
8.3	Penambahan sarana dan prasarana pendidikan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda dan Pendidikan
8.4	Peningkatan sarana dan prasarana	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kesehatan,PU
8.5	Peningkatan mutu kesehatan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kesehatan dan Bapedalda
8.6	Penambahan sarana dan prasarana kesehatan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kesehatan dan PU
8.7	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan umum (pasar)	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Perdagangan dan PU
8.8	Penataan dan peningkatan pasar tradisional	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Perdagangan.dan PU



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
B	RENCANA POLA RUANG			
1	KAWASAN LINDUNG			
1.2	Kawasan hutan berfungsi lindung			
	a. relokasi pemukiman penduduk dikawasan lindung	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Kehutanan, Bappeda dan PU
	c. pengendalian aktivitas budidaya pada hutan berfungsi lindung yang tersisa	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kehutanan dan Bappedalda
	d. rehabilitasi lahan kritis	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda, Kehutanan dan Bappedalda
1.3	Kawasan hutan kota			
	pembangunan kawasan hutankota	Pinagsori, Manduamas, Barus dan Pandan	APBD	Kehutanan, Bappeda dan Bappedalda
2	KAWASAN PERTANIAN			
2.1	Hortikultura			
	Peningkatan Produksi tanaman hortikultura	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
2.2	Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah			
	Pembangunan irigasi baru	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian dan PU
	Intensifikasi	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
	Peningkatan kualitas dan produktifitas lahan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
2.3	Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering			
	Diversifikasi tanaman	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
	Pengembangan teknologi pertanian untuk peningkatan kualitas dan produktifitas lahan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
	Peningkatan kualitas dan produktifitas	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
	Pegembangan teknologi penanganan pasca panen	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	Pengembangan agro industri yang terkait dengan perkebunan rakyat	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
	Pengembangan pola pemasaran dan distribusi hasil pertanian rakyat	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Pertanian
2.4	PETERNAKAN			
	Pemanfaatan lahan pertanian lahan kering, lahan basah, kebun rakyat sebagai lokasi peternakan.	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Peternakan
	Pemberian pinjaman lunak bagi peternak rakyat	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Peternakan, Perdagangan dan Perbankan
	Pengembangan pola kemitraan dan pendampingan antara swasta/Pemerintah Daerah dengan peternak rakyat	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Peternakan dan Perdagangan
	Pengembangan pola pemasaran	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Dinas Peternakan dan Perdagangan
	KAWASAN PERKEBUNAN			
3.1	PERKEBUNAN			
	Mempertahankan luas lahan yang tersedia	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Perkebunan
	Pengembangan teknologi penanganan pasca panen		APBD	Perkebunan
	Pengembangan agribisnis yang terkait dengan perkebunan rakyat		APBD	Perkebunan dan Perdagangan
	Pengembangan pola pemasaran dan distribusi hasil pertanian rakyat		APBD	Perkebunan dan Perdagangan
4	KAWASAN PERIKANAN			
4.1	PERIKANAN BUDIDAYA (DARAT)			



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	Peningkatan kualitas dan produktifitas perikanan budidaya	kecamatan pesisir	APBD	Perikanan dan Perdagangan
	Pengembangan sistem pemasaran dan distribusi hasilperikanan	kecamatan pesisir	APBD	Perikanan dan Perdagangan
4.2	PERIKANAN TANGKAP (LAUT)			
	Kredit ringan bagi para nelayan untuk meningkatkan alat dan sarana pendukung	kecamatan pesisir	BUMN dan swasta	Kelautan,Perdagangan dan Perbankan
	Pengembangan sistem pemasaran dan distribusi hasilperikanan	kecamatan pesisir	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	SEKTOR INDUSTRI			
5.1	Industri Besar diorientasikan	Kecamatan Tapian Nauli (Labuhan Angin)	APBD	Bappeda dan Perindustrian
5.2	Industri Menengah diorientasikanke Besar	Kecamatan Manduamas,Barus, Tapian Nauli, Sarudik dan Lumut	APBD	Bappeda dan Perindustrian
5.3	Industri pengolahan	Kecamatan Tapian Nauku, Barus, Manduamas Lumut, Sarudik, Sibabangun	APBD	Bappeda dan Perindustrian
5.4	Pengembangan infrastuktur bagikawasan industri	Kecamatan Manduamas,Barus, Tapian Nauli, Sarudik, Lumut	APBD	Bappeda, Perindustrian dan PU
5.5	Pengembangan akses dari kawasan industri ke setra-sentrasumber daya	Semua kecamatan	APBD dan swasta	Bappeda, Perindustrian dan PU
5.5	Pengembangan industri pengolahan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD dan swasta	Bappeda dan Perindustrian
5.6	Pengembangan industri	Kabupaten	APBD dan	Bappeda dan Perindustrian



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	hilir yangterkait dengan industri hulu	Tapanuli Tengah	swasta	
6	SEKTOR PARIWISATA			
6.1	Pengembangan eko wisata	1. Kawasan Wisata Barus, Badiri, Pandan, TapaniNauli. 2. Serta kawasan wisatalainnya yang berpotensi dan terdapat di Kabupaten TapanuliTengah	APBD	Bappeda dan Pariwisata
6.2	Pengembangan sarana transportasi darat, laut dan udara penunjang pariwisata secara terpadu		APBD	Bappeda, Pariwisata dan perhubungan
6.3	Pengembangan kegiatan promosipariwisata yang terpadu		APBD dan swasta	Bappeda, Pariwisata, Kominko dan swasta
6.4	Pengembangan pusat informasi wisata		APBD	Bappeda, Pariwisata dan Kominko
6.5	Peningkatan sadar wisata		APBD	Bappeda dan Pariwisata
7	KAWASAN PERTAMBANGAN			
7.1	Eksplorasi dan operasi produksi kegiatan pertambangan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD dan swasta	Bappeda ,Pertambangan dan swasta
7.2	Pengembangan fasilitas kegiatan pertambangan		APBD	Bappeda dan Pertambangan
7.3	Penyediaan pinjaman/modal bagi pertambangan rakyat		APBD, perbankan dan swasta	Bappeda Pertambangan, Penanaman Modal dan Perbankan
7.4	Reklamasi dan rehabilitasi lahanbekas pertambangan		APBD dan swasta	Bappeda , Pertambangan dan swasta
III	RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN			
1	KAWASAN STRATEGIS			
1.1	Pemantapan Kawasan Lindung	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD	Bappeda dan Kehutanan
1.2	Pengendalian aktifitas perambahan hutan di kawasan lindung		APBD	Bappeda ,Kehutanan dan Bappedalda
1.3	Pemantapan Kawasan Lindung	Kawasan Pulau Mursala	APBD	Bappeda dan Kehutanan
1.4	Pengendalian aktifitas			



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	OPD pelaksana
	perambahan hutan di Kawasan lindung		APBD	Bappeda dan Kehutanan
1.5	Pengendalian aktifitas perambahan hutan mangrove di kawasan lindung	Kawasan Pesisir Pantai	APBD	Kehutanan, kelautan dan Bapedalda

6.3 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Kabupaten Tapanuli Tengah sudah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2039. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Oleh karena itu RPIK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatra Utara 2018-2038 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perikanan dan juga pertanian, di antaranya yang menonjol adalah sawit, karet, kelapa, kakao dan perikanan. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Tapanuli Tengah, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan sawit, industri pengolahan karet, serta industri pengolahan ikan yang merupakan komoditi utama daerah. Maka dari dokumen RPIK ini bertujuan untuk mengarahkan sektor industri menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Tapanuli tengah.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tabel VI.4.

Program, Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2029

Nama Program dan Sasaran Periode 2019-2029	Strategi	Rencana Aksi
Program Pembangunan Industri Pangan		
<p>a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;</p> <p>b) Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;</p> <p>c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;</p> <p>d) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>f) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan.</p>	<p>a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;</p> <p>b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing);</p> <p>c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;</p> <p>d) Mengembangkan lokasi klaster</p> <p>e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>f) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan;</p> <p>g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</p> <p>h) Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;</p> <p>i) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>;</p> <p>j) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.</p>	<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi</p> <p>d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah</p> <p>e) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;</p> <p>f) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan</p>



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

		<p>ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>g) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>h) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>i) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>j) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>k) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan</p> <p>l) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi</p> <p>m) Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya.</p> <p>n) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan Land Banking untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan</p>
<p>Program Pembangunan Industri Pengolahan Sampah Dan Limbah</p>		
<p>a) Menyelesaikan masalah sampah saat ini melalui Program Manajemen Sampah <i>Zero</i>.</p>	<p>a) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi dan lembaga terkait</p> <p>b) Melakukan sosialisasi dan</p>	<p>a) Melakukan program edukasi/sosialisasi ke masyarakat, lembaga terkait dan sekolah mengenai</p>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

<p>b) Mengubah sampah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi melalui teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.</p> <p>c) Masyarakat mampu melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya.</p> <p>d) Didirikannya Industri Pengolahan Sampah dan Limbah skala pilot di RW/Kelurahan yang mencakup Industri Pupuk dan Pakan Organik (IPPO), Industri BBM dari sampah, dan Industri Daur Ulang Sampah.</p> <p>e) Memperkuat sektor pertanian dan peternakan serta memenuhi kebutuhan BBM.</p> <p>f) Tersedianya SDM lokal yang kompeten di bidang Industri Pengolahan Sampah dan Limbah.</p>	<p>edukasi masyarakat dan lembaga terkait mengenai program sampah Zero dan pemilahan sampah.</p> <p>c) Melakukan pengolahan sampah di dekat sumber.</p> <p>d) Melibatkan masyarakat, pemerintah, dan industri.</p> <p>(i) Masyarakat memilah sampah di sumber.</p> <p>(ii) Pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat, menyediakan fasilitas, dan mengolah sampah B2 (Bahan Berbahaya).</p> <p>(iii) Industri melakukan <i>recycle</i> dan <i>recovery</i>.</p> <p>e) Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.</p> <p>f) Membuat manajemen untuk program <i>sustainability</i>.</p> <p>g) Memfasilitasi pemasaran produk dari Industri Pengolahan Sampah dan Limbah.</p>	<p>pemilahan sampah di sumber.</p> <p>b) Membangun Industri Pengolahan Sampah dan Limbah sebagai pilot project.</p> <p>c) Membangun infrastruktur dan wilayah administrasi.</p> <p>d) Melakukan manajemen pengangkutan sampah dari sumber ke Industri Pengolahan Sampah dan Limbah.</p> <p>e) Mengembangkan sistem pengumpulan sampah secara digital (aplikasi <i>smartphone</i>)</p> <p>f) Mengembangkan pemasaran produk melalui <i>e-commerce</i>.</p> <p>g) Mendorong peran serta perusahaan lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan Industri Pengolahan Sampah dan Limbah.</p> <p>h) Mendorong peran serta industri agro dan peternakan untuk menggunakan dan memasarkan produk pupuk dan pakan organik.</p> <p>i) Mendorong industri daur ulang untuk bekerjasama dalam hal <i>recycle</i> sampah daur ulang.</p> <p>j) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten.</p> <p>k) Bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mengembangkan industri kerajinan dari sampah daur ulang.</p>
<p>Program Pembangunan Industri Agro non Pangan</p>		
<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas agro non pangan sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu.</p>	<p>a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas agro non pangan;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri agro non</p>	<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

<p>c) Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal;</p> <p>d) Berkembangnya perkebunan rakyat.</p> <p>e) Penerapan standar mutu produk SNI.</p>	<p>pangan;</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri agro non pangan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;</p> <p>d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;</p> <p>e) Melibatkan industri agro non pangan dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak agro non pangan</p>	<p>b) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas agro non pangan untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>c) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas agro non pangan di sentra-sentra industri.</p> <p>d) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri agro non pangan melalui diklat industri</p> <p>e) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri agro non pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>g) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>h) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</p> <p>i) Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk rumah tangga</p> <p>j) Memfasilitasi pengadaan</p>
---	--	--



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

		permodalan bagi IKM;
Program Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka		
<ul style="list-style-type: none"> a) Pemantapan kluster industri tekstil dan aneka b) Peningkatan kualitas SDM ahli c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku d) Revitalisasi mesin dan alat produksi e) Peningkatan ekspor industri tekstil dan aneka sesuai target f) Teramankannya pasar lokal, g) Tercapainya penyerapan tenaga kerja h) Terwujudnya <i>green industry</i> i) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperbaiki iklim usaha di bidang fiskal & moneter, energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> c) Mengembangkan <i>supply /produksi</i> melalui pengembangan industri alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri d) Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri e) Mengembangkan kluster industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota kluster b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri c) Menetapkan kebijakan pengamanan suplai dan diversifikasi energi d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan f) Meningkatkan kualitas SDM ahli g) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal h) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang i) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual j) Menyiapkan penerapan SNI k) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah
Program Pembangunan Industri Farmasi dan Kosmetik		
<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya budidaya yang baik cengkeh dan hasil laut unggulan yang memiliki potensi pasar b) Penerapan budidaya terstandar <i>Good Agricultural Practises / Good Agricultural and</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memanfaatkan Obat Tanaman untuk tindakan preventif b) Mengembangkan bahan baku terstandar dan bermutu c) Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi agar produk mampu memenuhi standar dan persyaratan b) Meningkatkan mutu SDM sarana c) Melakukan pelatihan budidaya tanaman obat berbasis GAP/GACP dan penanganan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

<p><i>Collection</i> (GAP/GACP) tanaman obat unggulan dan yang mempunyai potensi pasar</p> <p>c) Terlatihnya petani untuk melakukan budidaya tanaman obat berdasarkan Good Agricultural Practises (GAP) dan Good Agricultural and Collection Practises (GACP)</p> <p>d) Terjadi peningkatan jumlah tanaman obat terstandar</p> <p>e) Diterapkannya teknologi terkini pengolahan tanaman biofarmaka</p> <p>f) Terbangunnya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industri</p> <p>g) Terbangunnya sistem standarisasi produk herbal/jamu dan kosmetik</p> <p>h) Terbangunnya sistem layanan kesehatan berbasis herbal (implementasi kurikulum Jamu dalam pendidikan kedokteran herbal, perawat, farmasi, dan pendidikan kesehatan);</p> <p>i) Peningkatan pangsa pasar produk farmasi</p> <p>j) Meningkatnya kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan tangkap</p>	<p><i>Practises</i> tanaman obat</p> <p>d) Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan perlindungan HKI produk herbal</p> <p>e) Meningkatkan pemanfaatan dan integrasi produk herbal dari tanaman biofarmaka dalam pelayanan kesehatan.</p>	<p>Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>d) Menerapkan CPOTB, GMP yang diacu oleh para pemangku kepentingan (stakeholder)</p> <p>e) Melakukan diseminasi pengetahuan tanaman/ produk biofarmaka kepada masyarakat</p> <p>f) Memetakan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan pengembangan budidaya berdasarkan iklim (bioregional)</p> <p>g) Membuat SOP atau pedoman teknis budidaya berdasarkan GAP/GACP</p> <p>h) Pengaplikasian teknologi ramah lingkungan pengolahan tanaman biofarmaka menjadi produk herbal</p> <p>i) Membangun sistem pembinaan petani berdasarkan kluster</p> <p>j) Melakukan promosi</p>
<p>Program Pembangunan Industri Alat Transportasi</p>		
<p>a) Peningkatan akses informasi dan promosi</p> <p>b) Pemantapan kluster industri alat transportasi dan pendukung pariwisata</p> <p>c) Revitalisasi mesin dan peralatan</p> <p>d) Tercapainya penyerapan tenaga kerja</p> <p>e) Peningkatan ketersediaan pasar</p>	<p>a) Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri perkapalan guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing.</p> <p>b) Memperkuat dan mengembangkan kluster industri kapal dan jasa reparasi kapal.</p>	<p>a) Meningkatkan akses informasi dan promosi</p> <p>b) Memberikan akses supply bahan baku, peralatan, dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta diversifikasi produk.</p> <p>c) Mengembangkan sentra khusus industri perkapalan</p>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

<p>baru dengan kontrak yang lebih pasti.</p> <p>f) Tersusunnya dokumen kajian pengembangan industri transportasi pendukung pariwisata</p> <p>g) Terbebaskannya lahan untuk sentra alat transportasi pendukung pariwisata</p> <p>h) Didirikannya sentra industri transportasi pendukung pariwisata</p> <p>i) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri jasa reparasi kapal</p> <p>j) Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh industri komponen perkapalan,</p> <p>k) Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>l) Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi dan reparasi kapal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar</p>	<p>c) Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar SNI dan internasional,</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM ahli komponen perkapalan, tenaga penyuluh serta mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM,</p> <p>e) Meningkatkan peran stakeholder terutama UPT berkaitan dengan pengadaan mesin dan teknologi</p> <p>f) Mengembangkan daur sentra serta klaster industri oleh RPIP Sumut</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan IKM sebagai produsen yang berkualitas dan standar,</p> <p>h) Memperluas akses permodalan dan kerja sama,</p> <p>i) Memperkuat jaringan pemasaran.</p> <p>j) Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base load pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi / docking repair dalam negeri.</p> <p>k) Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).</p> <p>l) Melakukan promosi investasi.</p> <p>m) Melakukan perbaikan iklim usaha</p>	<p>dan reparasi kapal</p> <p>d) Penguatan kawasan industri modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi</p> <p>e) Memfasilitasi percepatan proses ijin rancang bangun</p> <p>f) Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang alat transportasi untuk memenuhi standar internasional</p> <p>g) Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis;</p> <p>h) Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan.</p>
--	---	--

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode. Program Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah secara terpisah terdapat pada Tabel VI.4

Tabel VI.5.

Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Batas Wilayah Daerah yang Diselesaikan	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Nilai- Nilai Keagamaan	
		Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya pengawasan secara internal dan external	INSPEKTORAT
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Data Base Kependudukan	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip/Dokumen yang diduplikasikan secara digital	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	KECAMATAN
Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah		Indeks Pembangunan Manusia	
Meningkatnya derajat kesehatan		Indeks Kesehatan	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Kesehatan Dasar yang Memenuhi Standard	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Sistem Pelaporan	
		Usia Harapan Hidup	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yaitu Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter (MoU)	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS)	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Pengawas dan Penyuluh Keamanan Pangan yang Bersertifikat	DINAS KESEHATAN	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	DINAS KESEHATAN	
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		Indeks Pendidikan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APK SD	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SMP	
		Meningkatkan APK PAUD	
		Angka Buta Aksara usia diatas 15 tahun	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan dan pengembangan minat baca tulis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah		Tingkat Kemiskinan	
Meningkatnya pendapatan		Indeks Pengeluaran	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Promosi Kesehatan Tentang Tumbuh Kembang Balita, Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wirausahaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah peserta mengikuti penyuluhan	
		PDRB per Kapita	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Kegiatan Dak Non Fisik Pendampingan dan koordinator Perkoperasian dan Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Terselenggaranya Pemuktahiran Data UMKM dan Penyusunan Data Base Koperasi berbasis Operasioanal Data System (ODS)			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Bahan Pangan Strategis	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya Tenaga Kerja Yang Terampil	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Partisipasi Angkatan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Rancangan Perda Retribusi TKA	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya tata kelola kelembagaan dan kerjasama Hubungan Industrial	DINAS KETENAGAKERJAAN	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang Mendapat Bantuan	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapat bantuan	DINAS SOSIAL



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
		Terwujudnya Pengembalian Jati Diri Penyandang Eks Penyakit Sosial Sehingga Dapat Hidup Layak di Tengah Masyarakat	
	P R O G R A M PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah masyarakat miskin	DINAS SOSIAL
	P R O G R A M PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah		LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
	P R O G R A M PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi Ikan Penduduk	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	P R O G R A M PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan hasil Produksi Pertanian yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional	DINAS PERTANIAN
	P R O G R A M PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN P R A S A R A N A PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan,holtikultura dan perkebunan	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
		LPE kategori industri pengolahan	
	P R O G R A M PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi RPIK Kabupaten Tapanuli Tengah	D I N A S PERINDUSTRIAN D A N PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif		LPE Sektor Pariwisata	
	P R O G R A M PELESTARIAN DAN P E N G E L O L A A N CAGAR BUDAYA	Penetapan situs cagar budaya kabupaten Tapanuli Tengah	DINAS PENDIDIKAN
	P R O G R A M PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Usaha dan Jasa Pariwisata	DINAS PARIWISATA
	P R O G R A M P E M A S A R A N PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	DINAS PARIWISATA
	P R O G R A M PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kerjasama dibidang pariwisata	DINAS PARIWISATA
		LPE Subsektor Ekonomi Kreatif	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD
	P R O G R A M P E N G E M B A N G A N U M K M	Tercapainya Fasilitasi Promosi Hasil Produksi UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	P R O G R A M P E L A Y A N A N P E N A N A M A N M O D A L	Jumlah Aduan Perizinan yang ditindaklanjuti	DINAS PENANAMAN M O D A L D A N P E L A Y A N A N P E R I Z I N A N T E R P A D U S A T U P I N T U
	P R O G R A M P E N G E M B A N G A N I K L I M P E N A N A M A N M O D A L	Jumlah Dokumen Kajian/Desain	DINAS PENANAMAN M O D A L D A N P E L A Y A N A N P E R I Z I N A N T E R P A D U S A T U P I N T U
	P R O G R A M P E N I N G K A T A N S A R A N A D I S T R I B U S I P E R D A G A N G A N	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	DINAS PENANAMAN M O D A L D A N P E L A Y A N A N P E R I Z I N A N T E R P A D U S A T U P I N T U
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata		Indeks Infrastruktur	
	P R O G R A M P E N G E L O L A A N S U M B E R D A Y A A I R (SDA)		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N G E L O L A A N D A N P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E N Y E D I A A N A I R M I N U M		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N G E L O L A A N D A N P E N G E M B A N G A N S I S T E M A I R L I M B A H		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N G E L O L A A N D A N P E N G E M B A N G A N S I S T E M D R A I N A S E		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N G E M B A N G A N P E R M U K I M A N		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E N A T A A N R U A N G		DINAS PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G
	P R O G R A M K A W A S A N P E R M U K I M A N	Luas Kawasan Kumuh	DINAS PERUMAHAN D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N
		Jumlah Rumah	
	P R O G R A M P E R U M A H A N D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N K U M U H	Jumlah Rumah	DINAS PERUMAHAN D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	NAMA OPD	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Kasiba/ Lisiba	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penyelesaian Kasus Tanah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	DINAS PERHUBUNGAN	
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan		
		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Membangun Keterbukaan Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendali dan Teratasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terpilihnya Personal/Kelompok/Sekolah Usaha untuk mendapat penghargaan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Layanan Angkutan Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Indeks Risiko Bencana		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Terlaksananya Program Penanggulangan Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Simulasi evakuasi bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana				
Gladi Posko dan Gladi Lapangan				



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2023-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2023-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memerhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif,



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan di mana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023–2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 dan Tabel VII. 2 berikut ini:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

Tabel VII.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan	APBD (Prognosis)	Proyeksi			
		2021		2022	2023	2024	2025	2026
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	624,469.14		863,980.65	897,772.72	933,076.76	969,979.82	1,008,575.46
	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	691,085.29		704,907	719,005	733,385	748,053	763,014
1	BELANJA OPERASI	454,997.86		464,098	473,38	482,847	492,504	502,354
01.01	Belanja Pegawai	444,375.48	2%	453,263	462,328	471,575	481,006	490,626
01.02	Belanja Bunga	6,804.19	2%	6,94	7,079	7,221	7,365	7,512
01.03	Belanja Subsidi	-	2%	-	-	-	-	-
01.04	Belanja Hibah	3,296.68	2%	3,363	3,43	3,498	3,568	3,64
01.05	Belanja Bantuan Sosial	521.50	2%	532	543	553	564	576
2	BELANJA TAK TERDUGA	768.34		784	799	815	832	848
02.01	Belanja Tak Terduga	768.34	2%	784	799	815	832	848
3	TRANSFER	176,818.90		180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
03.01	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	176,818.90		180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
03.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	2%	-	-	-	-	-
03.01.02	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	176,818.90	2%	180,355	183,962	187,642	191,394	195,222
03.01.03	Transfer Dana Desa	-	2%	-	-	-	-	-
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,500.20		59,67	60,864	62,081	63,322	64,589
04.01	Penyertaan Modal/Investasi	3,200.20	2%	3,264	3,329	3,396	3,464	3,533
04.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55,300.00	2%	56,406	57,534	58,685	59,858	61,056

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026

Tabel VII.2
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD (PROGNOSIS)	Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025	2026
01.00	Pendapatan	1,411,382.80	1,456,122.92	1,502,593.96	1,550,887.37	1,601,101.15
02.00	Penerimaan Pembiayaan	157,504.84	160,654.94	163,868.04	167,145.40	170,488.31
	TOTAL PENERIMAAN					
	(Dikurangi):					
03.00	Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	704,907.00	719,005.14	733,385.24	748,052.94	763,014.00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	863,980.65	897,772.72	933,076.76	969,979.82	1,008,575.46

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026

Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah dimasukkan ke dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

VII.3 Proyeksi Pagu OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Perubahan	APBD	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.161.137,92	1.411.382,80	1.456.122,92	1.502.593,96	1.550.887,37	1.601.101,15
2	Penerimaan Pembiayaan	154.416,51	157.505	160.655	163.868	167.145	170.488
Kapasitas Pagu OPD		1.315.554,43	1.568.887,64	1.616.777,85	1.666.462,00	1.718.032,77	1.771.589,46

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 (diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada tabel VII.4.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 - 2026**

2022-03-08

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.065.726.497.296		1.098.476.644.782		1.132.470.395.549		1.244.672.294.161		4.541.345.831.788		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			535.137.745.017		551.582.713.804		568.652.146.717		626.189.545.418		2.281.562.150.956		
	DINAS PENDIDIKAN			535.137.745.017		551.582.713.804		568.652.146.717		626.189.545.418		2.281.562.150.956		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja OPD		6 dokumen	244.223.980.001	6 dokumen 8 dokumen	251.729.070.000	6 dokumen 8 dokumen	259.519.149.999	6 dokumen 8 dokumen	285.777.840.000		1.041.250.040.000	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100 %		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya sarana penunjang aparatur		100		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan		100		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		100		100		100		100				DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6dokumen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja OPD		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8dokumen		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya sarana penunjang aparatur		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6dokumen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Renja dan Evaluasi Renja OPD	8 dokumen	8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8dokumen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya sarana penunjang aparatur	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APK SD		99,88 %	288.330.890.000	99,88 %	297.191.400.001	99,88 %	306.388.360.000	99,88 %	337.389.370.000		1.229.300.020.001	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SMP		99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen				DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatkan APK PAUD		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen				DINAS PENDIDIKAN
		Angka Buta Aksara usia diatas 15 tahun		0		0		0		0				DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SD		99,88 %		99,88 %		99,88 %		99,88 %		99,88 %		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SMP		99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen		99,59persen		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatkan APK PAUD		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80Persen		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Buta Aksara usia diatas 15 tahun		0		0		0		0		0		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SD	99,88 %	99,88 %		99,88 %		99,88 %		99,88 %		99,88 %		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya APK SMP	99,59 persen	99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen		99,59 persen		99,59persen		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatkan APK PAUD	56,80 Persen	56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80 Persen		56,80Persen		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Buta Aksara usia diatas 15 tahun	0	0		0		0		0		0		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				164.860.000		169.930.001		175.190.001		192.910.000		702.890.002	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik		100%	2.231.170.001	100%	2.299.730.001	100%	2.370.900.001	100%	2.610.790.001		9.512.590.004	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				131.890.001		135.940.000		140.150.001		154.330.001		562.310.003	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				54.955.014		56.643.801		58.396.715		64.305.416		234.300.946	DINAS PENDIDIKAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0		0		0		0		0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				0		0		0		0		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				344.296.935.878		354.877.301.393		365.859.427.412		402.877.846.237		1.467.911.510.920	
	DINAS KESEHATAN				344.296.935.878		354.877.301.393		365.859.427.412		402.877.846.237		1.467.911.510.920	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelaporan renja		100 persen	135.915.630.672	100 persen	140.092.365.641	100 persen	144.427.700.720	100 persen	159.041.196.274		579.476.893.307	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				DINAS KESEHATAN
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100				DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100				DINAS KESEHATAN
		Persentase Sarana Kesehatan Dasar yang Memenuhi Standard		80		80		80		80				DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Sistem Pelaporan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tersedianya Pengawas dan Penyuluh Keamanan Pangan yang Bersertifikat		90 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang				DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa Siaga Aktif		150 Desa		150 Desa		150 Desa		150 Desa				DINAS KESEHATAN
		Persentase Peningkatan Pelaporan renja		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Terseleenggaranya administrasi perkantoran		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Persentase Peningkatan Pelaporan renja	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Terselenggaranya administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN	
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100	100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN	
		Mendukung Operasional Kantor	100	100	100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Kesehatan Dasar yang Memenuhi Standard		80	197.368.320.378	80	203.433.518.040	80	209.729.025.031	80	230.949.844.576	80	841.480.708.025	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Sistem Pelaporan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100Persen		DINAS KESEHATAN
		Usia Harapan Hidup		0		0		0		0		0		DINAS KESEHATAN
		Persentase Sarana Kesehatan Dasar yang Memenuhi Standard	80	80		80		80		80		80		DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Sistem Pelaporan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100Persen		DINAS KESEHATAN
		Usia Harapan Hidup	0	0		0		0		0		0		DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yaitu Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter (MoU)		1 Tahun	10.441.452.681	1 Tahun	10.762.322.182	1 Tahun	11.095.375.826	1 Tahun	12.218.029.060	1Tahun	44.517.179.749	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS)		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yaitu Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter (MoU)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Pengawas dan Penyuluh Keamanan Pangan yang Berserti?kat		90 Orang	228.612.859	90 Orang	235.638.212	90 Orang	242.930.334	90 Orang	267.510.531	90Orang	974.691.936	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Pengawas dan Penyuluh Keamanan Pangan yang Berserti?kat	90 Orang	90 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang		90Orang		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif		150 Desa	342.919.288	150 Desa	353.457.318	150 Desa	364.395.501	150 Desa	401.265.796	150Desa	1.462.037.903	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa Siaga Aktif	150 Desa	150 Desa		150 Desa		150 Desa		150 Desa		150Desa		DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			137.360.815.751		141.581.961.764		145.963.394.277		160.732.274.501		585.638.446.293		
	DINAS PENDIDIKAN			0		0		0		0		0		
1.03.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			137.360.815.751		141.581.961.764		145.963.394.277		160.732.274.501		585.638.446.293		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.623.173.958		7.857.436.765		8.100.595.064		8.920.230.144		32.501.435.931	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				75.148.780.000		77.458.130.001		79.855.170.000		87.935.080.001		320.397.160.002	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				17.409.752.068		17.944.758.199		18.500.080.993		20.371.960.128		74.226.551.388	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.104.958.297		3.200.374.754		3.299.414.390		3.633.256.010		13.238.003.451	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				549.550.141		566.438.010		583.967.149		643.054.161		2.343.009.461	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				10.086.287.767		10.396.242.926		10.717.967.786		11.802.434.087		43.002.932.566	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				22.256.780.715		22.940.739.388		23.650.669.524		26.043.693.522		94.891.883.149	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				824.325.212		849.657.014		875.950.723		964.581.242		3.514.514.191	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1		1		1		1		4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				357.207.592		368.184.706		379.578.647		417.985.205		1.522.956.150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0		0		0		0		0		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				0		0		0		0		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.726.573.757		11.056.205.500		11.398.348.601		12.551.654.282		45.732.782.140		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.726.573.757		11.056.205.500		11.398.348.601		12.551.654.282		45.732.782.140		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	4.829.903.397	100 Persen	4.978.328.022	100 Persen	5.132.388.664	100 Persen	5.651.694.439	100 Persen	20.592.314.522	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100		100		100		100		100		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana		20 Unit	1.274.950.000	20 Unit	1.314.130.000	20 Unit	1.354.800.000	20 Unit	1.491.880.001	20 Unit	5.435.760.001	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana	20 Unit	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah	100 Unit	100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh		10,04 Ha	2.071.810.359	10,04 Ha	2.135.477.478	10,04 Ha	2.201.559.936	10,04 Ha	2.424.319.840	10,04 Ha	8.833.167.613	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Luas Kawasan Kumuh	10,04 Ha	10,04 Ha		10,04 Ha		10,04 Ha		10,04 Ha		10,04 Ha		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah	100 Unit	100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah		100 unit	1.318.920.001	100 unit	1.359.450.000	100 unit	1.401.520.001	100 unit	1.543.320.001	100 unit	5.623.210.003	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah	100 unit	100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Kasiba/ Lisiba		1 Unit	1.230.990.000	1 Unit	1.268.820.000	1 Unit	1.308.080.000	1 Unit	1.440.440.001	1 Unit	5.248.330.001	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Kasiba/ Lisiba	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.919.831.160		32.900.738.759		33.918.893.648		34.967.076.174		133.706.539.741		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			27.065.625.160		27.897.361.308		28.760.680.366		31.670.745.904		115.394.412.738		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	11.940.444.554	100	12.307.378.601	100	12.688.245.965	100	13.972.069.117	100	50.908.138.237	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah		100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100		100		100		100			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	9.700.241.433	100	9.998.333.252	100	10.307.744.295	100	11.350.703.330	100	41.357.022.310	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		75	1.115.586.786	75	1.149.869.159	75	1.185.453.312	75	1.305.399.947	75	4.756.309.204	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	75	75		75		75		75		75		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Program Penanggulangan Kebakaran		6 Kegiatan	4.309.352.387	6 Kegiatan	4.441.780.296	6 Kegiatan	4.579.236.794	6 Kegiatan	5.042.573.510	6 Kegiatan	18.372.942.987	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran		100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Program Penanggulangan Kebakaran	6 Kegiatan	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100	100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.854.206.000		5.003.377.451		5.158.213.282		3.296.330.270		18.312.127.003	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	2.817.023.627	100	2.903.591.750	100	2.993.447.061	100	3.296.330.270	100	12.010.392.708	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	P R O G R A M PENANGGULANGAN BENCANA	Simulasi evakuasi bencana		150 Orang	2.037.182.373	150 Orang	2.099.785.701	150 Orang	2.164.766.221	150 Orang	0	150 Orang	6.301.734.295	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Gladi Posko dan Gladi Lapangan		95 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Simulasi evakuasi bencana	150 Orang	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Gladi Posko dan Gladi Lapangan	95 Orang	95 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang		B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.284.595.733		6.477.723.562		6.678.184.894		7.353.897.549		26.794.401.738		
	DINAS SOSIAL			6.284.595.733		6.477.723.562		6.678.184.894		7.353.897.549		26.794.401.738		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Operasional Kedinasan		100	4.542.906.470	100	4.682.511.579	100	4.827.417.810	100	5.315.865.996	100	19.368.701.855	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS SOSIAL
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		DINAS SOSIAL
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS SOSIAL
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS SOSIAL
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		DINAS SOSIAL
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang Mendapat Bantuan		18704 Oran	193.441.650	18704 Oran	199.386.179	18704 Oran	205.556.436	18704 Oran	226.355.065	18704 Oran	824.739.330	DINAS SOSIAL
		Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang Mendapat Bantuan	18704 Oran	18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapat bantuan		1050 Orang	291.591.305	1050 Orang	300.552.008	1050 Orang	309.852.969	1050 Orang	341.204.538	1050 Orang	1.243.200.820	DINAS SOSIAL
		Terwujudnya Pengembalian Jati Diri Penyandang Eks Penyakit Sosial Sehingga Dapat Hidup Layak di Tengah Masyarakat		1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		DINAS SOSIAL
		Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapat bantuan	1050 Orang	1050 Orang		1050 Orang		1050 Orang		1050 Orang		1050 Orang		DINAS SOSIAL
		Terwujudnya Pengembalian Jati Diri Penyandang Eks Penyakit Sosial Sehingga Dapat Hidup Layak di Tengah Masyarakat	1891 Orang	1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		1891 Orang		DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah masyarakat miskin		18704 Oran	241.802.062	18704 Oran	249.232.724	18704 Oran	256.945.545	18704 Oran	282.943.831	18704 Oran	1.030.924.162	DINAS SOSIAL
		Jumlah masyarakat miskin	18704 Oran	18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		18704 Oran		DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tersedianya pelayanan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial		2365 Orang	1.014.854.246	2365 Orang	1.046.041.072	2365 Orang	1.078.412.134	2365 Orang	1.187.528.119	2365 Orang	4.326.835.571	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi Kemasyarakatan		47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		DINAS SOSIAL
		Tersedianya pelayanan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2365 Orang	2365 Orang		2365 Orang		2365 Orang		2365 Orang		2365 Orang		DINAS SOSIAL
		Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi Kemasyarakatan	47 Ormas	47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		47 Ormas		DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			113.054.357.585		116.528.558.931		120.134.677.775		132.290.167.443		482.007.761.734		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.033.154.265		1.064.903.458		1.097.858.239		1.208.941.823		4.404.857.785		
	DINAS KETENAGAKERJAAN			1.033.154.265		1.064.903.458		1.097.858.239		1.208.941.823		4.404.857.785		
2.07.02	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya Tenaga Kerja Yang Terampil		48 Orang	439.640.113	48 Orang	453.150.408	48 Orang	467.173.719	48 Orang	514.443.329	48 Orang	1.874.407.569	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Tersedianya Tenaga Kerja Yang Terampil	48 Orang	48 Orang		48 Orang		48 Orang		48 Orang		48 Orang		DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Partisipasi Angkatan Kerja		94	296.757.076	94	305.876.525	94	315.342.260	94	347.249.247	94	1.265.225.108	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Rancangan Perda Retribusi TKA		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Partisipasi Angkatan Kerja	94	94		94		94		94		94		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Rancangan Perda Retribusi TKA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya tata kelola kelembagaan dan kerjasama Hubungan Industrial		1 Tahun	296.757.076	1 Tahun	305.876.525	1 Tahun	315.342.260	1 Tahun	347.249.247	1 Tahun	1.265.225.108	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya tata kelola kelembagaan dan kerjasama Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		DINAS KETENAGAKERJAAN	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.054.058.290	4.178.640.921	4.307.954.239	4.743.842.017					17.284.495.467		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.054.058.290	4.178.640.921	4.307.954.239	4.743.842.017					17.284.495.467		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100	2.989.052.699	100	3.080.907.336	100	3.176.249.903	100	3.497.629.482	100	12.743.839.420	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		100	142.663.217	100	147.047.307	100	151.597.872	100	166.936.860	100	608.245.256	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan		100	238.005.770	100	245.319.770	100	252.911.500	100	278.501.612	100	1.014.738.652	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Peningkatan ekonomi perempuan		100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Peningkatan ekonomi perempuan	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Terpilah dan Anak dan Pengembangan SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak		100	118.483.010	100	122.124.035	100	125.903.317	100	138.642.476	100	505.152.838	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tersedianya Data Terpilah dan Anak dan Pengembangan SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak		100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tersedianya Data Terpilah dan Anak dan Pengembangan SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tersedianya Data Terpilah dan Anak dan Pengembangan SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Sosialisasi Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan		50	185.976.509	50	191.691.632	50	197.623.771	50	217.619.756	50	792.911.668	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Sosialisasi Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	50	50	50		50		50		50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlaksananya koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan		100	379.877.085	100	391.550.841	100	403.667.876	100	444.511.831	100	1.619.607.633	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terlaksananya koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			7.064.137.334		7.281.220.750		7.506.547.317		8.266.075.407		30.117.980.808		
	DINAS KETAHANAN PANGAN			7.064.137.334		7.281.220.750		7.506.547.317		8.266.075.407		30.117.980.808		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100	4.559.287.790	100	4.699.396.303	100	4.844.825.052	100	5.335.034.542	100	19.438.543.687	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75		75		75		75		75		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100	100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	75		75		75		75		75		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100	100		100		100		100			DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan		100 Skor	181.351.547	100 Skor	186.924.543	100 Skor	192.709.159	100 Skor	212.207.873	100 Skor	773.193.122	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan	100 Skor	100 Skor		100 Skor		100 Skor		100 Skor		100 Skor		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Balai Penyuluhan yang difasilitasi dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan		2 Unit	1.834.398.371	2 Unit	1.890.770.076	2 Unit	1.949.282.343	2 Unit	2.146.514.789	2 Unit	7.820.965.579	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Balai Penyuluhan yang difasilitasi dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani		60	423.153.609	60	436.157.267	60	449.654.705	60	495.151.704	60	1.804.117.285	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	60	60		60		60		60		60		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Pangan		100	65.946.017	100	67.972.561	100	70.076.058	100	77.166.499	100	281.161.135	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Pangan	100	100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			307.750.733		317.207.649		327.029.173		360.121.636		1.312.109.191		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			307.750.733		317.207.649		327.029.173		360.121.636		1.312.109.191		
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jenis Sistem Pendaftaran Tanah		1 Kegiatan	65.946.017	1 Kegiatan	67.972.561	1 Kegiatan	70.076.058	1 Kegiatan	77.166.499	1 Kegiatan	281.161.135	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jenis Sistem Pendaftaran Tanah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Kasus Tanah		5 Kasus	76.937.020	5 Kasus	79.301.321	5 Kasus	81.755.401	5 Kasus	90.027.583	5 Kasus	328.021.325	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelesaian Kasus Tanah	5 Kasus	5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Kasus Tanah		5 Kasus	54.955.352	5 Kasus	56.645.024	5 Kasus	58.397.871	5 Kasus	64.315.402	5 Kasus	234.313.649	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelesaian Kasus Tanah	5 Kasus	5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penyelesaian Kasus Tanah		5 Kasus	54.957.330	5 Kasus	56.644.942	5 Kasus	58.403.128	5 Kasus	64.306.736	5 Kasus	234.312.136	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelesaian Kasus Tanah	5 Kasus	5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penyelesaian Kasus Tanah		5 Kasus	54.955.014	5 Kasus	56.643.801	5 Kasus	58.396.715	5 Kasus	64.305.416	5 Kasus	234.300.946	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelesaian Kasus Tanah	5 Kasus	5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.655.010.457		20.259.015.818		20.885.956.633		22.999.241.223		83.799.224.131	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				19.655.010.457		20.259.015.818		20.885.956.633		22.999.241.223		83.799.224.131	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	4.542.381.578	100 Persen	4.681.970.554	100 Persen	4.826.860.042	100 Persen	5.315.251.796	100 Persen	19.366.463.970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Layanan Administrasi Perkantoran		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Layanan Administrasi Perkantoran	70 Persen	70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH		1 Dokumen	549.550.141	1 Dokumen	566.438.010	1 Dokumen	583.967.149	1 Dokumen	643.054.161	1 Dokumen	2.343.009.461	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Tersedianya Dokumen RPPLH	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendali dan Teratasinya Kerusakan Lingkungan Hidup		5 Perusahaan	549.550.141	5 Perusahaan	566.438.010	5 Perusahaan	583.967.149	5 Perusahaan	643.054.161	5 Perusahaan	2.343.009.461	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terkendali dan Teratasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Perusahaan	5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Luas Wilayah ber HPL/HGB		22,74 perse	219.820.056	22,74 perse	226.575.204	22,74 perse	233.586.859	22,74 perse	257.221.664	22,74 perse	937.203.783	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Luas Wilayah ber HPL/HGB	22,74 perse	22,74 perse		22,74 perse		22,74 perse		22,74 perse		22,74 perse		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terkendalinya B3 dan Limbah B3		5 Perusahaan	109.910.028	5 Perusahaan	113.287.602	5 Perusahaan	116.793.430	5 Perusahaan	128.610.832	5 Perusahaan	468.601.892	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terkendalinya B3 dan Limbah B3	5 Perusahaan	5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH		5 Perusahaan	164.865.042	5 Perusahaan	169.931.403	5 Perusahaan	175.190.145	5 Perusahaan	192.916.248	5 Perusahaan	702.902.838	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	5 Perusahaan	5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		5 Perusahaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan Terhadap Kelompok Masyarakat Yang Terlibat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1 Kelompok	82.432.521	1 Kelompok	84.965.701	1 Kelompok	87.595.072	1 Kelompok	96.458.124	1 Kelompok	351.451.418	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengakuan Terhadap Kelompok Masyarakat Yang Terlibat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Kelompok	1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terpilihnya Personal/Kelompok/Sekolah Usaha untuk mendapat penghargaan Lingkungan Hidup		70 persen	192.342.549	70 persen	198.253.303	70 persen	204.388.502	70 persen	225.068.956	70 persen	820.053.310	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terpilihnya Personal/Kelompok/Sekolah Usaha untuk mendapat penghargaan Lingkungan Hidup	70 persen	70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Layanan Angkutan Sampah		92 Persen	13.244.158.401	92 Persen	13.651.156.031	92 Persen	14.073.608.285	92 Persen	15.497.605.281	92 Persen	56.466.527.998	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Layanan Angkutan Sampah	92 Persen	92 Persen		92 Persen		92 Persen		92 Persen		92 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			13.580.140.245		13.997.462.714		14.430.631.865		15.890.753.249		57.898.988.073		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			13.580.140.245		13.997.462.714		14.430.631.865		15.890.753.249		57.898.988.073		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	11.024.863.981	100 Persen	11.363.661.914	100 Persen	11.715.324.776	100 Persen	12.900.705.736	100 Persen	47.004.556.407	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Melengkapi Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Meningkatnya sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Melengkapi Administrasi Perkantoran	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Mendukung Kelancaran Operasional Pendaftaran Penduduk		98	883.456.807	98	910.605.744	98	938.785.588	98	1.033.773.869	98	3.766.622.008	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Mendukung Kelancaran Operasional Pendaftaran Penduduk	98	98		98		98		98		98		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Mendukung Kelancaran Operasional Pencatatan Sipil		100	735.078.269	100	757.667.482	100	781.114.458	100	860.149.245	100	3.134.009.454	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Kelancaran Operasional Pencatatan Sipil	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	589.513.427	100	607.629.382	100	626.433.240	100	689.817.059	100	2.513.393.108	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Data Base Kependudukan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Data Base Kependudukan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Pro?l Kependudukan		100	347.227.761	100	357.898.192	100	368.973.803	100	406.307.340	100	1.480.407.096	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Pro?l Kependudukan	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6.170.486.510		6.360.107.724		6.556.929.285		7.220.373.045		26.307.896.564		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6.170.486.510		6.360.107.724		6.556.929.285		7.220.373.045		26.307.896.564		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	2.680.925.026	100	2.763.310.792	100	2.848.824.932	100	3.137.074.972	100	11.430.135.722	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		90		90		90		90		90		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase peningkatan pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	90	90	90		90		90		90		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100	2.857.578.822	100	2.945.393.221	100	3.036.542.132	100	3.343.785.788	100	12.183.299.963	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terciptanya masyarakat/kelompok masyarakat yang berdaya dalam pembangunan		235 Kelompok	631.982.662	235 Kelompok	651.403.711	235 Kelompok	671.562.221	235 Kelompok	739.512.285	235 Kelompok	2.694.460.879	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Terciptanya masyarakat/kelompok masyarakat yang berdaya dalam pembangunan	235 Kelompok	235 Kelompok		235 Kelompok		235 Kelompok		235 Kelompok		235 Kelompok		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				21.086.779.346		21.734.783.466		22.407.393.773		24.674.620.543		89.903.577.128	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				21.086.779.346		21.734.783.466		22.407.393.773		24.674.620.543		89.903.577.128	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Di Dinas PPKB		100	7.694.201.432	100	7.930.646.940	100	8.176.070.818	100	9.003.342.692	100	32.804.261.882	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Mebel		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Jasa Surat Menyurat		1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Di Dinas PPKB	100	100		100		100		100		100		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Mebel	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1000 Persen	1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		1000 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal		1 Tahun	228.612.859	1 Tahun	235.638.212	1 Tahun	242.930.334	1 Tahun	267.510.531	1 Tahun	974.691.936	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersusunnya Pro?l Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Tersusunnya Pro?l Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan Keikutsertaan ber KB		100 Persen	11.720.846.384	100 Persen	12.081.032.101	100 Persen	12.454.894.888	100 Persen	13.715.107.093	100 Persen	49.971.880.466		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Akseptor KB		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat menjadi Akseptor KB		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Keikutsertaan ber KB	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Akseptor KB	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat menjadi Akseptor KB	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Promosi Kesehatan Tentang Tumbuh Kembang Balita, Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		100 Persen	1.443.118.671	100 Persen	1.487.466.213	100 Persen	1.533.497.733	100 Persen	1.688.660.227	100 Persen	6.152.742.844		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Promosi Kesehatan Tentang Tumbuh Kembang Balita, Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			12.040.294.439		12.410.296.907		12.794.349.210		14.088.908.109		51.333.848.665			
	DINAS PERHUBUNGAN			12.040.294.439		12.410.296.907		12.794.349.210		14.088.908.109		51.333.848.665			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	4.635.013.801	100	4.777.449.399	100	4.925.293.601	100	5.423.645.066	100	19.761.401.867		DINAS PERHUBUNGAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen			DINAS PERHUBUNGAN
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100			DINAS PERHUBUNGAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen			DINAS PERHUBUNGAN
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100			DINAS PERHUBUNGAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen			DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		100		100		100		DINAS PERHUBUNGAN	
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90 Persen	90 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan		9 Angkutan	7.240.415.596	9 Angkutan	7.462.916.105	9 Angkutan	7.693.865.464	9 Angkutan	8.472.346.795	9 Angkutan	30.869.543.960	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	9 Angkutan	9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan	3 Persen	3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Jumlah Sarpras	2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		2 Jumlah Sarpras		DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	9 Angkutan	9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		9 Angkutan		DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan	3 Persen	3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		3 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Rasio Kondisi Sarana Perhubungan		73	164.865.042	73	169.931.403	73	175.190.145	73	192.916.248	73	702.902.838	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Rasio Kondisi Sarana Perhubungan	73	73		73		73		73		73		DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.217.799.928		5.378.146.480		5.544.575.168		6.105.586.167		22.246.107.743		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.217.799.928		5.378.146.480		5.544.575.168		6.105.586.167		22.246.107.743		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	3.467.631.140	100	3.574.192.660	100	3.684.800.563	100	4.057.636.359	100	14.784.260.722	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Membangun Keterbukaan Publik		5 Kegiatan	698.320.000	5 Kegiatan	719.780.001	5 Kegiatan	742.050.000	5 Kegiatan	817.140.001	5 Kegiatan	2.977.290.002	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Membangun Keterbukaan Publik	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah		30 Kegiatan	1.051.848.788	30 Kegiatan	1.084.173.819	30 Kegiatan	1.117.724.605	30 Kegiatan	1.230.809.807	30 Kegiatan	4.484.557.019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.679.532.211	2.761.875.175	2.847.344.888	3.135.445.173	11.424.197.447						
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			2.679.532.211	2.761.875.175	2.847.344.888	3.135.445.173	11.424.197.447						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Lakip dan Renja SKPD		100 Persen	2.003.891.122	100 Persen	2.065.471.399	100 Persen	2.129.390.019	100 Persen	2.344.846.135	100 Persen	8.543.598.675	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		100		100		100		100		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		100		100		100		100		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya Administrasi Perkantoran		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terlaksananya Sarana dan Prasarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penyusunan Lakip dan Renja SKPD	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100	100		100		100		100		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Sarana dan Prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase masyarakat sadar koperasi		70	77.396.409	70	79.774.827	70	82.243.560	70	90.565.134	70	329.979.930	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Tercapainya monitoring , Evaluasi dan Pelaporan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase masyarakat sadar koperasi	70	70		70		70		70		70		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Tercapainya monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terselenggaranya operasioanal Pendukung Serti?kasi hak atas tanah bagi usaha mikro		1 Kegiatan	56.054.114	1 Kegiatan	57.776.677	1 Kegiatan	59.564.649	1 Kegiatan	65.591.524	1 Kegiatan	238.986.964	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya Sosialisasi KUR dan Koordinasi		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya operasioanal Pendukung Serti?kasi hak atas tanah bagi usaha mikro	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya Sosialisasi KUR dan Koordinasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlakananya Kegiatan Dak Non Fisik Pendampingan dan koordinator Perkoperasian dan Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah		5 Kegiatan	485.037.351	5 Kegiatan	499.942.719	5 Kegiatan	515.414.077	5 Kegiatan	567.564.747	5 Kegiatan	2.067.958.894	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terselenggaranya Pemuktahiran Data UMKM dan Penyusunan Data Base Koperasi berbasis Operasioanal Data System (ODS)		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terlakananya Kegiatan Dak Non Fisik Pendampingan dan koordinator Perkoperasian dan Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terselenggaranya Pemuktahiran Data UMKM dan Penyusunan Data Base Koperasi berbasis Operasioanal Data System (ODS)	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tercapainya Fasilitasi Promosi Hasil Produksi UMKM		1 Kegiatan	57.153.215	1 Kegiatan	58.909.553	1 Kegiatan	60.732.583	1 Kegiatan	66.877.633	1 Kegiatan	243.672.984	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Tercapainya Fasilitasi Promosi Hasil Produksi UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.722.951.708		7.960.280.721		8.206.621.655		9.036.984.726		32.926.838.810		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU			7.722.951.708		7.960.280.721		8.206.621.655		9.036.984.726		32.926.838.810		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Publik		100 Persen	5.911.414.623	100 Persen	6.093.074.467	100 Persen	6.281.632.346	100 Persen	6.917.220.991	100 Persen	25.203.342.427	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatkan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kajian/Desain		1 Kajian	516.577.133	1 Kajian	532.451.729	1 Kajian	548.929.120	1 Kajian	604.470.911	1 Kajian	2.202.428.893	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Dokumen Kajian/Desain	1 Kajian	1 Kajian		1 Kajian		1 Kajian		1 Kajian		1 Kajian		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi		7 Unit	313.243.580	7 Unit	322.869.665	7 Unit	332.861.275	7 Unit	366.540.872	7 Unit	1.335.515.392	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi	7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Aduan Perizinan yang ditindaklanjuti		1 Ijin	659.460.169	1 Ijin	679.725.611	1 Ijin	700.760.578	1 Ijin	771.664.993	1 Ijin	2.811.611.351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Aduan Perizinan yang ditindaklanjuti	1 Ijin	1 Ijin		1 Ijin		1 Ijin		1 Ijin		1 Ijin		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN		5 Unit	212.346.175	5 Unit	218.871.647	5 Unit	225.644.906	5 Unit	248.476.127	5 Unit	905.338.855	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jumlah Investasi PMDN	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan		60 Persen	109.910.028	60 Persen	113.287.602	60 Persen	116.793.430	60 Persen	128.610.832	60 Persen	468.601.892	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan	60 Persen	60 Persen		60 Persen		60 Persen		60 Persen		60 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9.580.523.912		9.874.936.770		10.180.529.152		11.210.616.294		40.846.606.128		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			9.580.523.912		9.874.936.770		10.180.529.152		11.210.616.294		40.846.606.128		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelaporan renja		100 persen	2.204.999.878	100 persen	2.272.760.298	100 persen	2.343.093.734	100 persen	2.580.172.837	100 persen	9.401.026.747	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase Peningkatan Pelaporan renja	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wirausahaan		60 Orang	1.626.668.418	60 Orang	1.676.656.508	60 Orang	1.728.542.760	60 Orang	1.903.440.317	60 Orang	6.935.308.003	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah peserta mengikuti penyuluhan		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wirausahaan	60 Orang	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah peserta mengikuti penyuluhan	400 orang	400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Kompetisi Olah raga		20 Kompetisi	5.748.855.616	20 Kompetisi	5.925.519.964	20 Kompetisi	6.108.892.658	20 Kompetisi	6.727.003.140	20 Kompetisi	24.510.271.378	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah Gedung/ gelanggang olahraga		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah Kompetisi Olah raga	20 Kompetisi	20 Kompetisi		20 Kompetisi		20 Kompetisi		20 Kompetisi		20 Kompetisi		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah Gedung/ gelanggang olahraga	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			54.400.001		56.070.001		57.810.001		63.660.000		231.940.003		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			54.400.001		56.070.001		57.810.001		63.660.000		231.940.003		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pengembangan Data Informasi Statistik Sektoral Data/ Informasi Statistik Sektoral		30 Publikasi Statistik Sektoral	54.400.001	30 Publikasi Statistik Sektoral	56.070.001	30 Publikasi Statistik Sektoral	57.810.001	30 Publikasi Statistik Sektoral	63.660.000	30 Publikasi Statistik Sektoral	231.940.003	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengembangan Data Informasi Statistik Sektoral Data/ Informasi Statistik Sektoral	30 Publikasi Statistik Sektoral	30 Publikasi Statistik Sektoral		30 Publikasi Statistik Sektoral		30 Publikasi Statistik Sektoral		30 Publikasi Statistik Sektoral		30 Publikasi Statistik Sektoral		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			84.630.722		87.231.453		89.930.941		99.030.341		360.823.457		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemerintah Daerah		40 Jumlah Web	84.630.722	40 Jumlah Web	87.231.453	40 Jumlah Web	89.930.941	40 Jumlah Web	99.030.341	40 Jumlah Web	360.823.457	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemerintah Daerah	40 Jumlah Web	40 Jumlah Web		40 Jumlah Web		40 Jumlah Web		40 Jumlah Web		40 Jumlah Web		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.670.655.014		1.721.996.513		1.775.276.243		1.954.912.201		7.122.839.971		
	DINAS PENDIDIKAN			1.670.655.014		1.721.996.513		1.775.276.243		1.954.912.201		7.122.839.971		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				109.919.136		113.295.497		116.795.373		128.611.058		468.621.064	DINAS PENDIDIKAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pekan Kebudayaan Nasional		1 Kegiatan	164.867.872	1 Kegiatan	169.933.630	1 Kegiatan	175.195.430	1 Kegiatan	192.924.434		702.921.366	DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya Pekan Kebudayaan Nasional		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya Pekan Kebudayaan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DINAS PENDIDIKAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				76.942.062		79.302.723		81.755.545		90.033.831		328.034.161	DINAS PENDIDIKAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan situs cagar budaya kabupaten Tapanuli Tengah		3 situs	879.283.798	3 situs	906.309.133	3 situs	934.354.061	3 situs	1.028.896.551		3.748.843.543	DINAS PENDIDIKAN
		Penetapan situs cagar budaya kabupaten Tapanuli Tengah		3 situs		3 situs		3 situs		3 situs		3 situs		DINAS PENDIDIKAN
		Penetapan situs cagar budaya kabupaten Tapanuli Tengah	3 situs	3 situs		3 situs		3 situs		3 situs		3 situs		DINAS PENDIDIKAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				439.642.146		453.155.530		467.175.834		514.446.327		1.874.419.837	DINAS PENDIDIKAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				990.942.494		1.021.394.504		1.053.002.846		1.159.547.867		4.224.887.711	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				990.942.494		1.021.394.504		1.053.002.846		1.159.547.867		4.224.887.711	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	654.397.988	100	674.507.867	100	695.381.364	100	765.741.499	100	2.790.028.718	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan dan pengembangan minat baca tulis		12000 Orang	336.544.506	12000 Orang	346.886.637	12000 Orang	357.621.482	12000 Orang	393.806.368	12000 Orang	1.434.858.993	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan dan pengembangan minat baca tulis	12000 Orang	12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			61.109.976		62.987.907		64.937.147		71.507.622		260.542.652		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip/Dokumen yang diduplikasikan secara digital		100	61.109.976	100	62.987.907	100	64.937.147	100	71.507.622	100	260.542.652	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Persentase Arsip/Dokumen yang diduplikasikan secara digital	100	100		100		100		100		100		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			60.918.191.854		62.790.229.242		64.733.352.142		71.283.207.524		259.724.980.762		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.679.293.112		16.161.123.285		16.661.249.644		18.347.069.582		66.848.735.623		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.679.293.112		16.161.123.285		16.661.249.644		18.347.069.582		66.848.735.623		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Operasional Kantor		100	3.863.965.078	100	3.982.706.079	100	4.105.955.947	100	4.521.405.119	100	16.474.032.223	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		51192 Ton	9.397.307.413	51192 Ton	9.686.089.964	51192 Ton	9.985.838.243	51192 Ton	10.996.226.154	51192 Ton	40.065.461.774	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	51192 Ton	51192 Ton		51192 Ton		51192 Ton		51192 Ton		51192 Ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		158,62 Ton	1.978.380.508	158,62 Ton	2.039.176.834	158,62 Ton	2.102.281.735	158,62 Ton	2.314.994.980	158,62 Ton	8.434.834.057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	158,62 Ton	158,62 Ton		158,62 Ton		158,62 Ton		158,62 Ton		158,62 Ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi Ikan Penduduk		36 Kg/Tahun	439.640.113	36 Kg/Tahun	453.150.408	36 Kg/Tahun	467.173.719	36 Kg/Tahun	514.443.329	36 Kg/Tahun	1.874.407.569	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Tingkat konsumsi Ikan Penduduk	36 Kg/Tahun	36 Kg/Tahun		36 Kg/Tahun		36 Kg/Tahun		36 Kg/Tahun		36 Kg/Tahun		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6.114.985.984		6.302.901.647		6.497.952.894		7.155.429.301		26.071.269.826		
	DINAS PARIWISATA			6.114.985.984		6.302.901.647		6.497.952.894		7.155.429.301		26.071.269.826		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	4.026.695.448	100	4.150.437.210	100	4.278.877.729	100	4.711.823.489	100	17.167.833.876	DINAS PARIWISATA
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PARIWISATA
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PARIWISATA
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	100		100		100		100		DINAS PARIWISATA	
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PARIWISATA	
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PARIWISATA	
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		100		100		100		DINAS PARIWISATA	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Usaha dan Jasa Pariwisata		0	439.640.113	0	453.150.408	0	467.173.719	0	514.443.329	0	1.874.407.569	DINAS PARIWISATA
		Jumlah Usaha dan Jasa Pariwisata	0	0		0		0		0		0		DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata		306269 Ora	1.209.010.310	306269 Ora	1.246.163.621	306269 Ora	1.284.727.727	306269 Ora	1.414.719.154	306269 Ora	5.154.620.812	DINAS PARIWISATA
		Jumlah Kunjungan Wisata	306269 Ora	306269 Ora		306269 Ora		306269 Ora		306269 Ora		306269 Ora		DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kerjasama dibidang pariwisata		18 Unit	439.640.113	18 Unit	453.150.408	18 Unit	467.173.719	18 Unit	514.443.329	18 Unit	1.874.407.569	DINAS PARIWISATA
		Jumlah Kerjasama dibidang pariwisata	18 Unit	18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			31.226.169.759		32.185.760.901		33.181.789.897		36.539.192.504		133.132.913.061		
	DINAS PERTANIAN			31.226.169.759		32.185.760.901		33.181.789.897		36.539.192.504		133.132.913.061		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	9.541.428.037	100	9.834.639.465	100	10.138.984.796	100	11.164.868.394	100	40.679.920.692	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan hasil Produksi Pertanian yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional		57 Persen	3.445.918.531	57 Persen	3.551.812.816	57 Persen	3.661.728.146	57 Persen	4.032.229.426	57 Persen	14.691.688.919	DINAS PERTANIAN
		Meningkatkan hasil Produksi Pertanian yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional	57 Persen	57 Persen		57 Persen		57 Persen		57 Persen		57 Persen		DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan,holtikultura dan perkebunan		66 Persen	15.219.716.419	66 Persen	15.687.423.639	66 Persen	16.172.890.765	66 Persen	17.809.297.535	66Persen	64.889.328.358	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70Persen		DINAS PERTANIAN
		jumlah produksi tanaman pangan,holtikultura dan perkebunan	66 Persen	66 Persen		66 Persen		66 Persen		66 Persen		66Persen		DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	70 Persen	70 Persen		70 Persen		70 Persen		70 Persen		70Persen		DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan/ternak yang ditangani		75 Persen	856.968.490	75 Persen	883.303.432	75 Persen	910.638.372	75 Persen	1.002.778.658	75 Persen	3.653.688.952	DINAS PERTANIAN
		Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan/ternak yang ditangani	75 Persen	75 Persen		75 Persen		75 Persen		75 Persen		75 Persen		DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		66 Persen	447.113.995	66 Persen	460.853.965	66 Persen	475.115.672	66 Persen	523.188.865	66 Persen	1.906.272.497	DINAS PERTANIAN
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	66 Persen	66 Persen		66 Persen		66 Persen		66 Persen		66 Persen		DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Fasilitasi Kerjasama pemasaran hasil produksi pertanian		1 kegiatan	372.594.996	1 kegiatan	384.044.970	1 kegiatan	395.929.727	1 kegiatan	435.990.721	1 kegiatan	1.588.560.414	DINAS PERTANIAN
		Fasilitasi Kerjasama pemasaran hasil produksi pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Balai Penyuluh yang difasilitasi dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan		2 Unit	1.342.429.291	2 Unit	1.383.682.614	2 Unit	1.426.502.419	2 Unit	1.570.838.905	2 Unit	5.723.453.229	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Balai Penyuluh yang difasilitasi dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		DINAS PERTANIAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				439.345.626		452.838.664		466.861.937		514.103.086		1.873.149.313	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				439.345.626		452.838.664		466.861.937		514.103.086		1.873.149.313	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Meningkatnya pelayanan Masyarakat		75	35.540.000	75	36.630.000	75	37.770.000	75	41.590.001	75	151.530.001	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Meningkatnya pelayanan Masyarakat	75	75		75		75		75		75		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		75	283.630.001	75	292.340.001	75	301.390.001	75	331.890.001	75	1.209.250.004	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	75	75		75		75		75		75		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Bahan Pangan Strategis		1 kegiatan	35.540.000	1 kegiatan	36.630.000	1 kegiatan	37.770.000	1 kegiatan	41.590.001	1 kegiatan	151.530.001	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Bahan Pangan Strategis	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan kepada Konsumen		75	84.635.625	75	87.238.663	75	89.931.936	75	99.033.083	75	360.839.307	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan kepada Konsumen	75	75		75		75		75		75		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.896.677.242		4.016.431.707		4.140.715.647		4.559.678.791		16.613.503.387		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan		100	3.657.768.084	100	3.770.172.581	100	3.886.845.328	100	4.280.124.433	100	15.594.910.426	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		85		85		85		85		85		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Peningkatan Laporan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	85	85		85		85		85		85		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi RPIK Kabupaten Tapanuli Tengah		100	190.540.025	100	196.395.387	100	202.473.090	100	222.959.738	100	812.368.240	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi RPIK Kabupaten Tapanuli Tengah	100	100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Advis Teknis		1 tahun	24.185.109	1 tahun	24.930.482	1 tahun	25.695.550	1 tahun	28.297.125	1 tahun	103.108.266	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Advis Teknis	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dana yang dibutuhkan		1 tahun	24.184.024	1 tahun	24.933.257	1 tahun	25.701.679	1 tahun	28.297.495	1 tahun	103.116.455	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Dana yang dibutuhkan	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			3.561.720.131		3.671.173.038		3.784.782.123		4.167.734.260		15.185.409.552		
	DINAS KETENAGAKERJAAN			3.561.720.131		3.671.173.038		3.784.782.123		4.167.734.260		15.185.409.552		
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100	3.561.720.131	100	3.671.173.038	100	3.784.782.123	100	4.167.734.260	100	15.185.409.552	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			139.725.430.860		144.019.242.324		148.476.099.560		163.499.220.539		595.719.993.283		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			78.384.338.376		80.793.116.568		83.293.361.539		91.721.157.330		334.191.973.813		
	DINAS KETENAGAKERJAAN			78.384.338.376		80.793.116.568		83.293.361.539		91.721.157.330		334.191.973.813		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Operasional Kantor		100	50.833.345.754	100	52.395.472.286	100	54.016.916.310	100	59.482.460.401	100	216.728.194.751	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Operasional Kantor	100	100	100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100	100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Batas Wilayah Daerah yang Diselesaikan		80	22.826.290.239	80	23.527.750.139	80	24.255.846.064	80	26.710.103.085	80	97.319.989.527	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Batas Wilayah Daerah yang Diselesaikan	80	80		80		80		80		80		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	23 Produk Hukum	23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		23 Produk Hukum		DINAS KETENAGAKERJAAN
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan dalam rangka Promosi Potensi daerah		11 Kegiatan	4.724.702.383	11 Kegiatan	4.869.894.143	11 Kegiatan	5.020.599.165	11 Kegiatan	5.528.593.844	11 Kegiatan	20.143.789.535	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Kegiatan dalam rangka Sistem Pengawasan Internal		100		100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase e-procument		100		100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jumlah Kegiatan dalam rangka Promosi Potensi daerah	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		11 Kegiatan		11 Kegiatan		11 Kegiatan		DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Persentase Kegiatan dalam rangka Sistem Pengawasan Internal	100	100	100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Persentase e-proucment	100	100	100		100		100		100		DINAS KETENAGAKERJAAN	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			60.110.100.168	61.957.304.615		63.874.651.608		70.337.621.888		256.279.678.279			
	SEKRETARIAT DPRD			60.110.100.168	61.957.304.615		63.874.651.608		70.337.621.888		256.279.678.279			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan		100	28.372.420.803	100	29.244.315.239	100	30.149.317.486	100	33.199.888.220	100	120.965.941.748	SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
		Terseleenggaranya administrasi perkantoran		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
		Terseleenggaranya administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD		100	31.737.679.365	100	32.712.989.376	100	33.725.334.122	100	37.137.733.668	100	135.313.736.531	SEKRETARIAT DPRD
		Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
4.05				1.230.992.316		1.268.821.141		1.308.086.413		1.440.441.321		5.248.341.191		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.230.992.316		1.268.821.141		1.308.086.413		1.440.441.321		5.248.341.191		
4.05.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		420 Orang	1.230.992.316	420 Orang	1.268.821.141	420 Orang	1.308.086.413	420 Orang	1.440.441.321	420 Orang	5.248.341.191	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	420 Orang	420 Orang		420 Orang		420 Orang		420 Orang		420 Orang		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			160.729.971.568		165.669.259.929		170.796.104.283		70.183.967.878		567.379.303.658		
5.01	PERENCANAAN			7.956.536.557		8.201.043.710		8.454.835.359		9.310.313.212		33.922.728.838		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			7.956.536.557		8.201.043.710		8.454.835.359		9.310.313.212		33.922.728.838		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Dokumen Capaian Laporan Capaian Keuangan		100	6.194.295.208	100	6.384.648.068	100	6.582.229.062	100	7.248.232.709	100	26.409.405.047	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Tersedianya Dokumen Capaian Laporan Capaian Keuangan	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah		6 Dokumen	334.570.001	6 Dokumen	344.850.000	6 Dokumen	355.520.000	6 Dokumen	391.500.000	6 Dokumen	1.426.440.001	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1 Tahun	1.427.671.348	1 Tahun	1.471.545.642	1 Tahun	1.517.086.297	1 Tahun	1.670.580.503	1 Tahun	6.086.883.790	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.02	KEUANGAN			145.690.515.750	150.167.636.364	154.814.763.413	52.585.601.652	503.258.517.179						
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			145.690.515.750	150.167.636.364	154.814.763.413	52.585.601.652	503.258.517.179						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	42.014.449.368	100 Persen	43.305.568.123	100 Persen	44.645.713.589	100 Persen	49.163.059.872	100 Persen	179.128.790.952	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75		75		75		75		75		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100		100		100		100		100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	75		75		75		75		75		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik		100	100.751.183.174	100	103.847.302.346	100	107.060.988.194	100	1	100	311.659.473.715	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik	100	100	100		100		100		100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.286.660.025		1.326.199.539		1.367.240.458		1.505.580.694		5.485.680.716	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.638.223.183		1.688.566.356		1.740.821.172		1.916.961.085		6.984.571.796	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
5.03	KEPEGAWAIAN			6.423.459.092		6.620.854.243		6.825.744.933		7.516.388.021		27.386.446.289		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.423.459.092		6.620.854.243		6.825.744.933		7.516.388.021		27.386.446.289		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	5.214.448.782	100 Persen	5.374.690.622	100 Persen	5.541.017.206	100 Persen	6.101.668.867	100 Persen	22.231.825.477	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya sumber daya aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang profesional dan berkompeten		70	1.209.010.310	70	1.246.163.621	70	1.284.727.727	70	1.414.719.154	70	5.154.620.812	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang profesional dan berkompeten	70	70		70		70		70		70		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				659.460.169		679.725.612		700.760.578		771.664.993		2.811.611.352	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				659.460.169		679.725.612		700.760.578		771.664.993		2.811.611.352	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		1 Tahun	659.460.169	1 Tahun	679.725.612	1 Tahun	700.760.578	1 Tahun	771.664.993	1 Tahun	2.811.611.352	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Penelitian dan pengembangan daerah		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Penelitian dan pengembangan daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			6.370.468.301		6.566.235.025		6.769.435.456		7.454.381.033		27.160.519.815		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			6.370.468.301		6.566.235.025		6.769.435.456		7.454.381.033		27.160.519.815		
	INSPEKTORAT			6.370.468.301		6.566.235.025		6.769.435.456		7.454.381.033		27.160.519.815		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		100	4.897.673.923	100	5.048.181.159	100	5.204.403.498	100	5.730.995.882	100	20.881.254.462	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung peningkatan pengembanbagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya administrasi perkantoran		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		INSPEKTORAT
		Meningkatnya pelayanan perkantoran		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Mendukung operasional kedinasan		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Mendukung peningkatan pengembanbagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		INSPEKTORAT
		Meningkatnya pelayanan perkantoran	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Mendukung operasional kedinasan	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya pengawasan secara internal dan external		100	1.107.013.804	100	1.141.032.727	100	1.176.343.424	100	1.295.368.302	100	4.719.758.257	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya pengawasan secara internal dan external	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya pemahaman terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi		100	365.780.574	100	377.021.139	100	388.688.534	100	428.016.849	100	1.559.507.096	INSPEKTORAT
		Meningkatnya pemahaman terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN			66.286.566.620		68.323.576.038		70.437.935.334		77.564.992.325		282.613.070.317		
	KECAMATAN PANDAN			13.752.684.782		14.175.309.607		14.613.982.454		16.092.655.633		58.634.632.476		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	9.726.786.299	100	10.025.693.852	100	10.335.951.603	100	11.381.764.712	100	41.470.196.466	KECAMATAN PANDAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		KECAMATAN PANDAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PANDAN
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PANDAN
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
		Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		KECAMATAN PANDAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PANDAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PANDAN
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	654.808.777	100	674.931.280	100	695.817.880	100	766.222.182	100	2.791.780.119	KECAMATAN PANDAN
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	3.274.368.881	100	3.374.991.385	100	3.479.434.753	100	3.831.491.207	100	13.960.286.226	KECAMATAN PANDAN
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	96.720.825	100	99.693.090	100	102.778.218	100	113.177.532	100	412.369.665	KECAMATAN PANDAN
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PANDAN
	KECAMATAN SARUDIK			3.735.038.966		3.849.818.023		3.968.955.501		4.370.542.684		15.924.355.174		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	3.162.747.451	100	3.259.939.789	100	3.360.822.742	100	3.700.877.786	100	13.484.387.768	KECAMATAN SARUDIK
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SARUDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK	
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK	
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SARUDIK	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	132.551.494	100	136.624.848	100	140.852.876	100	155.104.663	100	565.133.881	KECAMATAN SARUDIK
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan		100		100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SARUDIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				439.740.021		453.253.386		467.279.883		514.560.235		1.874.833.525	KECAMATAN SARUDIK
	KECAMATAN TUKKA				4.801.228.008		4.948.771.426		5.101.917.404		5.618.140.034		20.470.056.872	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	3.891.613.988	100	4.011.204.650	100	4.135.336.440	100	4.553.758.394	100	16.591.913.472	KECAMATAN TUKKA
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TUKKA
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2023		2024		2025		2026		K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA	
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TUKKA
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	212.785.815	100	219.324.797	100	226.112.080	100	248.990.571	100	907.213.263		KECAMATAN TUKKA	
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan		100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	612.197.483	100	631.010.526	100	650.537.943	100	716.360.728	100	2.610.106.680		KECAMATAN TUKKA	
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	84.630.722	100	87.231.453	100	89.930.941	100	99.030.341	100	360.823.457		KECAMATAN TUKKA	
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TUKKA
KECAMATAN BADIRI				2.811.795.764		2.898.203.232		2.987.891.789		3.290.212.902		11.988.103.687				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung penunjang urusan pemerintah daerah		1 Tahun	2.395.653.059	1 Tahun	2.469.272.317	1 Tahun	2.545.687.066	1 Tahun	2.803.264.983	1 Tahun	10.213.877.425	KECAMATAN BADIRI
		Mendukung urusan pemerintahan daerah kabupaten		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung penunjang urusan pemerintah daerah		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung urusan pemerintahan daerah kabupaten	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		1 Tahun	96.553.161	1 Tahun	99.520.273	1 Tahun	102.600.053	1 Tahun	112.981.341	1 Tahun	411.654.828	KECAMATAN BADIRI
		Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Mendukung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		1 Tahun	249.466.946	1 Tahun	257.133.152	1 Tahun	265.090.462	1 Tahun	291.912.867	1 Tahun	1.063.603.427	KECAMATAN BADIRI
		Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
		Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		1 Tahun	60.450.516	1 Tahun	62.308.181	1 Tahun	64.236.386	1 Tahun	70.735.958	1 Tahun	257.731.041	KECAMATAN BADIRI
		Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Mendukung Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Tahun	9.672.082	1 Tahun	9.969.309	1 Tahun	10.277.822	1 Tahun	11.317.753	1 Tahun	41.236.966	KECAMATAN BADIRI
		Mendukung Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN BADIRI
KECAMATAN PINANGSORI					4.319.627.793		4.452.371.468		4.590.155.723		5.054.597.239		18.416.752.223	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.449.856.955		3.555.872.268		3.665.913.224		4.036.837.958		14.708.480.405	KECAMATAN PINANGSORI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				168.492.073		173.669.894		179.044.328		197.160.406		718.366.701	KECAMATAN PINANGSORI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				622.684.137		641.819.438		661.681.350		728.631.648		2.654.816.573	KECAMATAN PINANGSORI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				78.594.628		81.009.868		83.516.821		91.967.227		335.088.544	KECAMATAN PINANGSORI
KECAMATAN LUMUT					2.305.269.210		2.376.110.940		2.449.642.693		2.697.502.642		9.828.525.485	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen	2.067.902.506	100 Persen	2.131.449.876	100 Persen	2.197.410.282	100 Persen	2.419.748.832	100 Persen	8.816.511.496	KECAMATAN LUMUT
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN LUMUT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	68.604.625	100	70.712.868	100	72.901.168	100	80.277.459	100	292.496.120	KECAMATAN LUMUT
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LUMUT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	137.718.037	100	141.950.160	100	146.342.987	100	161.150.275	100	587.161.459	KECAMATAN LUMUT
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LUMUT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	31.044.042	100	31.998.036	100	32.988.256	100	36.326.076	100	132.356.410	KECAMATAN LUMUT
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LUMUT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	KECAMATAN LUMUT
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LUMUT
KECAMATAN SIBABANGUN				1.921.377.729		1.980.422.339		2.041.709.008		2.248.293.378		8.191.802.454		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembuatan Lakip dan Renja Kecamatan		2 Dokumen	1.686.024.273	2 Dokumen	1.737.836.390	2 Dokumen	1.791.615.931	2 Dokumen	1.972.895.362	2 Dokumen	7.188.371.956	KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Gaji dan Tingan serta TPP PNS Kecamatan Sibabangun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Penunjang Operasional Kantor		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Mendukung Operasional Kantor		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Penunjang Operasional Kedinasan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN
		Pembuatan Lakip dan Renja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Gaji dan Tingan serta TPP PNS Kecamatan Sibabangun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Penunjang Operasional Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Mendukung Operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Penunjang Operasional Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Adanya Forum Komunikasi Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan		1 Kegiatan	79.784.349	1 Kegiatan	82.236.150	1 Kegiatan	84.781.051	1 Kegiatan	93.359.374	1 Kegiatan	340.160.924	KECAMATAN SIBABANGUN
		Terlaksananaya Kegiatan Bulan Bakti Gotongroyong		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN
		Tersedianya Operasional Kelurahan dan Honorarium Kepala Lingkungan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Adanya Forum Komunikasi Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		KECAMATAN SIBABANGUN	
		Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti Gotongroyong	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN	
		Tersedianya Operasional Kelurahan dan Honorarium Kepala Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		KECAMATAN SIBABANGUN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1 Tahun	109.955.532	1 Tahun	113.334.504	1 Tahun	116.841.783	1 Tahun	128.664.078	1 Tahun	468.795.897	KECAMATAN SIBABANGUN
		Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Kegiatan MTQ dan Natal Kecamatan		2 Kegiatan	40.118.074	2 Kegiatan	41.350.915	2 Kegiatan	42.630.572	2 Kegiatan	46.944.022	2 Kegiatan	171.043.583	KECAMATAN SIBABANGUN
		Terselenggaranya Kegiatan MTQ dan Natal Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		KECAMATAN SIBABANGUN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Adanya Tim Koordinasi Dana Desa		1 Tahun	5.495.501	1 Tahun	5.664.380	1 Tahun	5.839.671	1 Tahun	6.430.542	1 Tahun	23.430.094	KECAMATAN SIBABANGUN
		Adanya Tim Koordinasi Dana Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SIBABANGUN
	KECAMATAN SUKABANGUN				1.512.911.538		1.559.403.840		1.607.661.560		1.770.328.106		6.450.305.044	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan di Kecamatan Sukabangun		1 Kegiatan	1.366.731.201	1 Kegiatan	1.408.731.330	1 Kegiatan	1.452.326.298	1 Kegiatan	1.599.275.699	1 Kegiatan	5.827.064.528	KECAMATAN SUKABANGUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
		Terlaksananya Perencanaan di Kecamatan Sukabungun	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		KECAMATAN SUKABANGUN
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Tahun	24.180.206	1 Tahun	24.923.272	1 Tahun	25.694.555	1 Tahun	28.294.383	1 Tahun	103.092.416	KECAMATAN SUKABANGUN
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	mendukung program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		12 bulan	71.441.518	12 bulan	73.636.941	12 bulan	75.915.729	12 bulan	83.597.041	12 bulan	304.591.229	KECAMATAN SUKABANGUN
		mendukung program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		KECAMATAN SUKABANGUN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Tahun	50.558.613	1 Tahun	52.112.297	1 Tahun	53.724.978	1 Tahun	59.160.983	1 Tahun	215.556.871	KECAMATAN SUKABANGUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SUKABANGUN
KECAMATAN TAPIAN NAULI				2.805.190.114		2.891.394.589		2.980.872.443		3.282.483.325		11.959.940.471		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	2.541.475.442	100	2.619.575.874	100	2.700.641.956	100	2.973.898.533	100	10.835.591.805	KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan		100	55.400.150	100	57.102.616	100	58.869.728	100	64.826.289	100	236.198.783	KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	127.042.501	100	130.946.561	100	134.998.868	100	148.658.335	100	541.646.265	KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	47.419.732	100	48.876.957	100	50.389.515	100	55.488.032	100	202.174.236	KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	33.852.289	100	34.892.581	100	35.972.376	100	39.612.136	100	144.329.382	KECAMATAN TAPIAN NAULI
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TAPIAN NAULI
KECAMATAN SITAHUIS					2.103.228.274		2.167.861.216		2.234.948.417		2.461.085.153		8.967.123.060	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen	1.882.771.014	100 Persen	1.940.629.228	100 Persen	2.000.684.448	100 Persen	2.203.117.868	100 Persen	8.027.202.558	KECAMATAN SITAHUIS
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN SITAHUIS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SITAHUIS
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SITAHUIS
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SITAHUIS
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SITAHUIS
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SITAHUIS
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN SITAHUIS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	32.973.008	100	33.986.281	100	35.038.029	100	38.583.250	100	140.580.568	KECAMATAN SITAHUIS
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SITAHUIS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	122.637.335	100	126.406.022	100	130.317.816	100	143.503.644	100	522.864.817	KECAMATAN SITAHUIS
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SITAHUIS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan		100	64.846.917	100	66.839.685	100	68.908.124	100	75.880.391	100	276.475.117	KECAMATAN SITAHUIS
		Terselenggaranya Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN SITAHUIS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	KECAMATAN SORKAM				3.343.403.140		3.446.147.091		3.552.792.461		3.912.271.400		14.254.614.092	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.676.676.928		2.758.932.149		2.844.310.786		3.132.104.076		11.412.023.939	KECAMATAN SORKAM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				98.655.241		101.686.951		104.833.783		115.441.082		420.617.057	KECAMATAN SORKAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		1 Tahun	488.166.380	1 Tahun	503.167.904	1 Tahun	518.739.069	1 Tahun	571.226.168	1 Tahun	2.081.299.521	KECAMATAN SORKAM
		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SORKAM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				79.904.591		82.360.087		84.908.823		93.500.074		340.673.575	KECAMATAN SORKAM
	KECAMATAN SORKAM BARAT				2.158.274.453		2.224.598.984		2.293.442.006		2.525.497.245		9.201.812.688	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung admistrasi umum kantor		12 bulan	1.677.396.647	12 bulan	1.728.943.634	12 bulan	1.782.447.976	12 bulan	1.962.799.776	12 bulan	7.151.588.033	KECAMATAN SORKAM BARAT
		mendukung penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		KECAMATAN SORKAM BARAT
		mendukung pemeliharaan barang milik daerah dan operasional		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		KECAMATAN SORKAM BARAT
		Mendukung admistrasi umum kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		KECAMATAN SORKAM BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		mendukung penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT	
		mendukung pemeliharaan barang milik daerah dan operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan		12 bulan	105.513.627	12 bulan	108.756.098	12 bulan	112.121.693	12 bulan	123.466.399	12 bulan	449.857.817	K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		Mendukung operasioanl Kelurahan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		Mendukung operasioanl Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersedianya pembinaan PKK Kecamatan		1 kegiatan	224.391.764	1 kegiatan	231.287.402	1 kegiatan	238.444.882	1 kegiatan	262.571.232	1 kegiatan	956.695.280	K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		Mendukung Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		Tersedianya pembinaan PKK Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
		Mendukung Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		K E C A M A T A N SORKAM BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		3 kegiatan	150.972.415	3 kegiatan	155.611.850	3 kegiatan	160.427.455	3 kegiatan	176.659.838	3 kegiatan	643.671.558	K E C A M A T A N SORKAM BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	KECAMATAN SORKAM BARAT	
KECAMATAN KOLANG				4.218.346.883	4.347.978.161	4.482.531.834	4.936.083.740	17.984.940.618						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 Persen	3.574.274.118	100 Persen	3.684.112.814	100 Persen	3.798.122.335	100 Persen	4.182.424.263	100 Persen	15.238.933.530	KECAMATAN KOLANG
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN KOLANG
		Terselenggaranya administrasi perkantoran		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN KOLANG
		Mendukung Operasional Kedinasan		100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN KOLANG
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN KOLANG
		Terselenggaranya administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN KOLANG
		Mendukung Operasional Kedinasan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	102.216.326	100	105.357.470	100	108.617.890	100	119.608.074	100	435.799.760	KECAMATAN KOLANG
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	362.703.093	100	373.849.086	100	385.418.318	100	424.415.746	100	1.546.386.243	KECAMATAN KOLANG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	142.883.037	100	147.273.882	100	151.831.459	100	167.194.082	100	609.182.460	KECAMATAN KOLANG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	36.270.309	100	37.384.909	100	38.541.832	100	42.441.575	100	154.638.625	KECAMATAN KOLANG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOLANG
KECAMATAN PASARIBU TOBING					1.626.170.086		1.676.142.862		1.728.013.219		1.902.857.196		6.933.183.363	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Operasional Kantor		100	1.439.323.038	100	1.483.553.939	100	1.529.464.389	100	1.684.218.782	100	6.136.560.148	KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PASARIBU TOBING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN PASARIBU TOBING
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	21.982.006	100	22.657.520	100	23.358.686	100	25.722.166	100	93.720.378	KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASARIBU TOBING
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	38.468.510	100	39.650.661	100	40.877.700	100	45.013.791	100	164.010.662	KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASARIBU TOBING
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	98.919.025	100	101.958.842	100	105.114.087	100	115.749.749	100	421.741.703	KECAMATAN PASARIBU TOBING
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASARIBU TOBING
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				27.477.507		28.321.900		29.198.357		32.152.708		117.150.472	KECAMATAN PASARIBU TOBING
	KECAMATAN BARUS				3.890.103.653		4.009.647.901		4.133.731.516		4.551.991.078		16.585.474.148	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	3.281.134.226	100	3.381.964.632	100	3.486.623.796	100	3.839.407.653	100	13.989.130.307	KECAMATAN BARUS
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75		75		75		75		75		KECAMATAN BARUS
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	75		75		75		75		75		KECAMATAN BARUS
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	56.823.485	100	58.569.690	100	60.382.203	100	66.491.799	100	242.267.177	KECAMATAN BARUS
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	318.140.787	100	327.917.364	100	338.065.181	100	372.271.320	100	1.356.394.652	KECAMATAN BARUS
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan		100	139.036.186	100	143.308.816	100	147.743.689	100	162.692.702	100	592.781.393	KECAMATAN BARUS
		Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	94.968.969	100	97.887.399	100	100.916.647	100	111.127.604	100	404.900.619	KECAMATAN BARUS
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS
KECAMATAN SOSORGADONG				2.148.261.659		2.214.278.492		2.282.802.136		2.513.780.810		9.159.123.097		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Tahun	1.906.363.179	1 Tahun	1.964.946.387	1 Tahun	2.025.754.134	1 Tahun	2.230.724.156	1 Tahun	8.127.787.856	KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kelancaran Kantor		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kelancaran Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Kelancaran Kantor		1 Tahun	78.585.670	1 Tahun	81.000.635	1 Tahun	83.507.302	1 Tahun	91.956.744	1 Tahun	335.050.351	KECAMATAN SOSORGADONG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Mendukung Kelancaran Operasional Kelurahan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kelancaran Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kelancaran Operasional Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Tahun	127.042.501	1 Tahun	130.946.561	1 Tahun	134.998.868	1 Tahun	148.658.335	1 Tahun	541.646.265	KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kesehatan Masyarakat		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		KECAMATAN SOSORGADONG
		Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
		Mendukung Kesehatan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		KECAMATAN SOSORGADONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		1 Tahun	36.270.309	1 Tahun	37.384.909	1 Tahun	38.541.832	1 Tahun	42.441.575	1 Tahun	154.638.625	KECAMATAN SOSORGADONG
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		KECAMATAN SOSORGADONG
	KECAMATAN BARUS UTARA				1.418.813.897		1.462.414.545		1.507.670.809		1.660.220.081		6.049.119.332	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Operasional Kantor		100	1.203.939.792	100	1.240.937.283	100	1.279.339.654	100	1.408.785.905	100	5.133.002.634	KECAMATAN BARUS UTARA
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Mendukung Operasional Kantor	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BARUS UTARA
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BARUS UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	64.297.367	100	66.273.247	100	68.324.156	100	75.237.336	100	274.132.106		KECAMATAN BARUS UTARA
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN BARUS UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan		100	117.603.730	100	121.217.734	100	124.968.970	100	137.613.590	100	501.404.024		KECAMATAN BARUS UTARA
		Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN BARUS UTARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	32.973.008	100	33.986.281	100	35.038.029	100	38.583.250	100	140.580.568		KECAMATAN BARUS UTARA
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN BARUS UTARA
	KECAMATAN ANDAM DEWI				2.023.092.079		2.085.262.406		2.149.793.483		2.367.314.065		8.625.462.033		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	1.768.732.439	100	1.823.086.207	100	1.879.503.909	100	2.069.676.031	100	7.540.998.586		KECAMATAN ANDAM DEWI
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			KECAMATAN ANDAM DEWI
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100		100		100		100			KECAMATAN ANDAM DEWI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ANDAM DEWI
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN ANDAM DEWI
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ANDAM DEWI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100	49.377.069	100	50.894.443	100	52.469.436	100	57.778.403	100	210.519.351		KECAMATAN ANDAM DEWI
		Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Kecamatan		100		100		100		100		100			KECAMATAN ANDAM DEWI
		Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN ANDAM DEWI
		Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Kecamatan	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN ANDAM DEWI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	131.942.499	100	135.997.138	100	140.205.741	100	154.392.050	100	562.537.428		KECAMATAN ANDAM DEWI
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100			KECAMATAN ANDAM DEWI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terciptanya Iklim Kondusif bagi terpeliharanya kedamaian dan persatuan dan kesatuan bangsa		100	51.167.976	100	52.740.385	100	54.372.504	100	59.874.026	100	218.154.891		KECAMATAN ANDAM DEWI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terciptanya Iklim Kondusif bagi terpeliharanya kedamaian dan persatuan dan kesatuan bangsa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ANDAM DEWI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	21.872.096	100	22.544.233	100	23.241.893	100	25.593.555	100	93.251.777	KECAMATAN ANDAM DEWI
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ANDAM DEWI
KECAMATAN SIRANDORUNG				2.061.164.192		2.124.504.490		2.190.249.963		2.411.864.015		8.787.782.660		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pendukung dokumen kantor		1 tahun	1.792.653.993	1 tahun	1.847.742.879	1 tahun	1.904.923.614	1 tahun	2.097.667.752	1 tahun	7.642.988.238	KECAMATAN SIRANDORUNG
		tersediaanya gaji dan tunjangan ,tambahan penghasilan ASN		0		0		0		0		0		KECAMATAN SIRANDORUNG
		Mendukung Kelancaran Operasional kantor		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG
		Terselenggaranya Adminstrasi Perkantoran		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG
		Penunjang urusann perkantoran		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG
		pendukung dokumen kantor	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG
		tersediaanya gaji dan tunjangan ,tambahan penghasilan ASN	0	0		0		0		0		0		KECAMATAN SIRANDORUNG
		Mendukung Kelancaran Operasional kantor	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Terselenggaranya Adminstrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			KECAMATAN SIRANDORUNG
		Penunjang urusann perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			KECAMATAN SIRANDORUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya kegiatan di Kelurahan		1 keg	188.275.878	1 keg	194.061.662	1 keg	200.067.145	1 keg	220.310.355	1 keg	802.715.040	KECAMATAN SIRANDORUNG
		Tercapainya kegiatan di Kelurahan	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		KECAMATAN SIRANDORUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang partisipasi Masyarakat dan pembangunan masyarakat		1 tahun	80.234.321	1 tahun	82.699.949	1 tahun	85.259.204	1 tahun	93.885.908	1 tahun	342.079.382	KECAMATAN SIRANDORUNG
		Merangsang partisipasi Masyarakat dan pembangunan masyarakat	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		KECAMATAN SIRANDORUNG
KECAMATAN MANDUAMAS				3.330.584.400		3.432.934.426		3.539.170.915		3.897.271.599		14.199.961.340		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelaporan renja		100 persen	2.874.194.824	100 persen	2.962.519.838	100 persen	3.054.198.754	100 persen	3.363.228.945	100 persen	12.254.142.361	KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Kelancaran operasional kantor		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Mendukung Operasional Kantor		100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung operasional Kedinasan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		Persentase Peningkatan Pelaporan renja	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Kelancaran operasional kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung operasional Kedinasan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MANDUAMAS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Operasional Kantor		100	109.910.028	100	113.287.602	100	116.793.430	100	128.610.832	100	468.601.892	KECAMATAN MANDUAMAS
		Mendukung Operasional Kantor	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	329.993.044	100	340.133.846	100	350.659.717	100	386.140.197	100	1.406.926.804	KECAMATAN MANDUAMAS
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	16.486.504	100	16.993.140	100	17.519.014	100	19.291.625	100	70.290.283	KECAMATAN MANDUAMAS
		Merangsang Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MANDUAMAS
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3.966.365.916		4.088.253.729		4.214.769.901		4.641.229.097		16.910.618.643		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.966.365.916		4.088.253.729		4.214.769.901		4.641.229.097		16.910.618.643		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor		100	2.632.452.025	100	2.713.348.197	100	2.797.316.182	100	3.080.354.459	100	11.223.470.863	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		100		100		100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Kualitas Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Masyarakat		70 kali	151.126.289	70 kali	155.770.453	70 kali	160.590.966	70 kali	176.839.894	70 kali	644.327.602	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Meningkatnya Kualitas Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Masyarakat	70 kali	70 kali		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan		75 kali	820.462.146	75 kali	845.675.234	75 kali	871.845.722	75 kali	960.060.888	75 kali	3.498.043.990	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan	75 kali	75 kali	75 kali		75 kali		75 kali		75 kali		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		80	36.270.309	80	37.384.909	80	38.541.832	80	42.441.575	80	154.638.625	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	80	80		80		80		80		80		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		80 kali	326.055.147	80 kali	336.074.936	80 kali	346.475.199	80 kali	381.532.281	80 kali	1.390.137.563	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80 kali	80 kali		80 kali		80 kali		80 kali		80 kali		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL:				1.616.777.850.000	1.666.462.000.000	1.718.032.770.000	1.771.589.460.000	6.772.862.080.000						



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target			
			2023	2024	2025	2026
1	IPM	69,61	70,36	70,74	71,11	71,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,67	12,00	11,67	11,33	11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,24	6,74	6,50	6,25	6,00
4	Indeks Gini	0,335	0,318	0,312	0,306	0,300
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,56	3,00	3,25	3,50	4,00



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023-2026**

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target			
			2023	2024	2025	2026
	(LPE) (%)					
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	28,75	26,74	26,83	26,91	27,00

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36	70,74	71,11	71,49
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3	3,25	3,5	4
3	PDRB per Kapita		28,75	26,74	26,83	26,91	27,00
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00	68,49	68,98	69,47
5	Indeks Infrastruktur	-	na	71,00	71,50	72,00	72,50
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	12,00	11,67	11,33	11,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74	6,50	6,25	6,00
8	Indeks Gini	-	0,335	0,318	0,312	0,306	0,300
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	60,00 (B)	60,50 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)
10	Indeks Pelayanan Publik	-	na	65,00	66,00	68,00	70,00



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023–2026

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

**Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36	70,74	71,11	71,49
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3	3,25	3,5	4
3	PDRB per Kapita		26,48	26,74	26,83	26,91	27,00
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,75	3,00	3,25	3,50
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	2,60	2,90	3,20	3,50
6	LPE Sektor Pariwisata	%	na	3,00	3,15	3,30	3,45
	LPE Subsektor Ekonomi Kreatif	%	na	2,75	2,90	3,05	3,20
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00	68,49	68,98	69,47
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10	180,40	177,70	175,00
9	Indeks Infrastruktur	-	na	71,00	71,50	72,00	72,50
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	12,00	11,67	11,33	11,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74	6,50	6,25	6,00
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710	0,712	0,714	0,716
13	Indeks Gini	-	0,335	0,318	0,312	0,306	0,300
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	60,00 (B)	60,50 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)
15	Nilai SAKIP	-	na	71,00 (BB)	72,00 (BB)	73,50 (BB)	75,00 (BB)
16	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	na	3,25	3,30	3,35	3,40
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		na	70,00	70,50	71,00	71,50
18	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	na	65,00	66,00	68,00	70,00
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,730	0,731	0,732	0,734
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,673	0,681	0,688	0,696
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	%	na	82,77%	85,18%	87,59%	90,00%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
	berpartisipasi dalam PAUD						
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	na	99,00%	99,33%	99,67%	100,00%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	na	83,29%	85,53%	87,76%	90,00%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	na	6,89%	7,92%	8,96%	10,00%
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	na	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	na	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	na	94,40%	96,27%	98,13%	100,00%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	na	92,26%	94,84%	97,42%	100,00%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	na	95,76%	97,17%	98,59%	100,00%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	na	81,29%	84,19%	87,10%	90,00%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	na	74,32%	76,21%	78,11%	80,00%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	na	50,22%	53,48%	56,74%	60,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	na	62,86%	66,90%	70,95%	75,00%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	na	25,21%	26,80%	28,40%	30,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	na	99,23%	99,48%	99,74%	100,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	na	83,12%	85,41%	87,71%	90,00%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	na	64,67%	68,11%	71,56%	75,00%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	64,35%	66,23%	68,12%	70,00%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	na	64,41%	66,27%	68,14%	70,00%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	97,24%	98,16%	99,08%	100,00%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	86,76%	87,84%	88,92%	90,00%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	59,87%	63,25%	66,62%	70,00%
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	na	75,17%	76,78%	78,39%	80,00%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	na	5%	4,50%	4%	3,50%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	na	6,16%	7,44%	8,72%	10,00%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	na	88,68%	90,78%	92,89%	95,00%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	na	400 Orang	450 Orang	500 Orang	600 Orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	na	400 Orang	450 Orang	500 Orang	600 Orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	na	1100 Orang	1200 Orang	1350 Orang	1500 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	na	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	na	93,75%	95,83%	97,92%	100,00%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	na	1,39%	1,76%	2,13%	2,50%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	na	95,22%	96,81%	98,41%	100,00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	na	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	na	5,00%	6,67%	8,33%	10,00%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	na	2,14%	2,26%	2,38%	2,50%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	na	1,26%	1,67%	2,09%	2,50%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	na	1,25%	1,67%	2,08%	2,50%
c) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	na	1,60%	1,90%	2,20%	2,50%
d) Pertanian							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	na	0%	0%	0%	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	na	0%	0%	0%	0%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	na	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	na	73,68	74,12	74,56	75
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	na	7,30%	8,20%	9,10%	10,00%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	na	72,50%	75,00%	77,50%	80,00%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	na	99,84%	99,89%	99,95%	100,00%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	na	31,71%	34,47%	37,24%	40,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	na	96,29%	97,53%	98,76%	100,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	na	29,46%	32,97%	36,49%	40,00%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	na	19,11%	21,07%	23,04%	25,00%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	na	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	na	77,04%	78,02%	79,01%	80,00%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	na	0%	0%	0%	0%
i) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	na	70%	72,50%	75%	77,50%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	na	50%	52,50%	55%	57,50%
j) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	na	20,00%	24,00%	28,00%	32,00%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	na	94,74%	96,49%	98,25%	100,00%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	na	15%	17,50%	20%	22,50%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
l) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	15%	17%	19%	21%
m) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	na	1%	1,25%	2%	1,75%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	na	5%	6%	7%	8%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	na	2 Medali	2 Medali	2 Medali	3 Medali
n) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
o) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	na	15%	17,50%	20%	22,50%
p) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
q) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	42,50%	44%	45,50%	47%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	30,00	31,50	33,00	35,00
r) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	na	3,13%	3,75%	4,38%	5,00%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	1,19%	1,46%	1,73%	2,00%
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	na	1.250,00 Ton	1.300,00 Ton	1.400,00 Ton	1.500,00 Ton
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	na	5%	5%	10%	10%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	na	55,12%	56,75%	58,37%	60,00%
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	na	0,60%	0,73%	0,87%	1,00%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	na	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%
c) Pertanian							



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	na	0,67%	0,78%	0,89%	1,00%
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	0,75%	0,83%	0,92%	1,00%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	na	17,14%	19,76%	22,38%	25,00%
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	na	10,00%	11,66%	13,33%	15,00%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
h) Transmigrasi							
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	na	13,72%	14,15%	14,57%	15,00%
2	Rasio PAD	%	na	1,26%	1,67%	2,09%	2,50%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	na	54,09%	54,39%	54,70%	55,00%
6	Opini Laporan Keuangan	-	na	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	na	50%	50%	40%	40%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	na	50,0%	52,5%	55,0%	57,5%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	na	34,75%	36,50%	38,25%	40,00%
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	238,96%	242,64%	246,32%	250,00%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	19,90%	23,26%	26,63%	30,00%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	84,62%	86,41%	88,21%	90,00%
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	na	87,50%	88,33%	89,17%	90,00%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	na	99,91%	99,94%	99,97%	100,00%
3	Manajemen Aset	-	na	ADA	ADA	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)						
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)						



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023- 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)						
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)						
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	na	9,23%	8,82%	8,41%	8,00%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	na	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I. Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Pangan						
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	390.000	415.000	440.000	465.000
2	Pertanian						
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	99,00	100,00	101,00	102,00
II Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	ESDM						
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	87,14	88,10	89,05	90,00
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	59,73	63,15	66,58	70,00
III Iklim Berinvestasi							
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	50,00	47,50	45,00	42,50
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)	0,5894 (Tertinggal)	0,5947 (Tertinggal)	0,6000 (Berkembang)
IV Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan						
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	10,00	10,50	11,00	11,50



BAB IX

PENUTUP

Bab Penutup dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menguraikan bagaimana mengoperasionalkan dokumen RPD ini sehingga mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala daerah berakhir di tahun 2022. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2022 terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah pada periode 2023-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026. Tujuan disusunnya kaidah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023– 2026

pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023-2026 sesuai Diktum ketiga dan Diktum Keempat serta Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2023 hingga 2026;
4. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra dilakukan dengan ketentuan Kepala Bappeda bertanggungjawab terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
5. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas; dan
6. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Indikator Kinerja Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan dengan baik bagi keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang.